**PRINSIP KERJA SAMA TUTURAN DEKLARATIF BAHASA
PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan*

Oleh:

Riana Fatmalia

156210026

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PRINSIP KERJA SAMA TUTURAN DEKLARATIF BAHASA PERSIDANGAN DI
PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PEKANBARU

Dipersiapkan Oleh

Nama : RIANA FATMALIA
NPM : 156210026
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Pembimbing

Drs. Herwandi, M.Pd.
NIDN 1016026503

Mengetahui
Ketua Program Studi

Muhammad Mukhlis, S.Pd., M.Pd.
NIDN 1018088901

Skrripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Islam Riau

Pekanbaru, 21 Mei 2019
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Sri Annah, M.Si.
NIDN 0007107005

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan Kh. Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Pekanbaru-Provinsi Riau, Kode Pos: 28284

SURAT KETERANGAN

Nomor : 136/PSPBSI/IV/2019

Hal : Bebas Plagiarisme

Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini.

Nama : Riana Fatmalia

NPM : 156210026

Judul Skripsi : Prinsip Kerjasama Tuturan Deklaratif Bahasa Persidangan Di Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru

Bahwa skripsi mahasiswa di atas telah memenuhi syarat bebas plagiat kurang dari 30%. Surat ini digunakan sebagai syarat untuk pengurusan surat *keterangan* bebas pustaka. Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 April 2019
Ketua Program Studi,

Muhammad Mukhlis, S.Pd., M.Pd.
NIDN 1018088901

Berita Acara Bimbingan Skripsi

Telah melaksanakan bimbingan skripsi terhadap

Nama : Riana Fatamalia

NPM : 156210026

Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Pembimbing : Drs. Herwandi, M.pd

Judul Skripsi : "Prinsip Kerja Sama Tuturan Deklaratif
Bahasa Persidangan Di Pengadilan Negeri
Kelas 1 A Pekanbaru"

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Tanda Tangan
1	14 November 2018	Pengajuan judul dan ACC Judul
2	11 Desember 2018	Perbaikan Latar Belakang Dan Rumusan Masalah
3	19 Desember 2018	Perbaikan Sumber data
4	19 Desember 2018	Acc Ujian Proposal
5	29 Januari 2019	Ujian Proposal
6	06 Febuari 2019	Konsultasi revisi proposal dan skripsi
7	12 Maret 2019	Perbaikan situasi data
8	21 Maret 2019	Perbaikan tabel data	

9	24 April 2019	ACC Untuk Ujian Skripsi
---	---------------	-------------------------	---

Pekanbaru, April 2019
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Sri Amnah, M.Si
NIDN 0007107005

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riana Fatmalia

NPM : 156210016

Profram Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Judul Skripsi : Prinsip Kerja Sama Tuturan Deklaratif Bahasa Persidangan Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru

Menyatakan bahwa skripsi/karya ilmiah ini merupakan hasil karya saya sendiri kecuali riangkasan dan kutipan (baik secara langsung maupun tidak langsung) yang saya ambil dari berbagai sumber dan disebutkan sumbernya. Secara ilmiah saya bertanggung jawab atas kebenaran data dan fakta skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, April 2019

Yang menyatakan

Riana Fatmalia

NPM 156210026

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FKIP UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 216 /FKIP-UIR/Kpts/2019

Tentang : Penunjukan Pembimbing I Dan Pembimbing II Penulisan Skripsi Mahasiswa FKIP
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan skripsi, maka perlu ditunjuk Pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
2. Bahwa saudara-saudara yang namanya tersebut tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk membimbing skripsi mahasiswa, maka untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 339/U/1994 Tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
b. Nomor 224/U/1995 Tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
c. Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
d. Nomor 124/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Studi Perguruan Tinggi.
e. Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
5. Surat Keputusan Pimpinan YLPI Riau Nomor 66/Kep/YLPI-II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor. 112/UIR/Kpts/2016 Tentang Pengangkatan Dekan FKIP Universitas Islam Riau Tanggal.31 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menunjuk nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Pembimbing skripsi

No	Nama	Pangkat/Golongan	Pembimbing
1.	Drs. Herwandi, M.Pd	Penata Muda Tk.I III/b Asisten Ahli	Pembimbing Utama
			Pembimbing Pendamping

Nama Mahasiswa	:	Riana Fatmalia
NIM	:	15 621 0026
Program Study	:	Pendidikan Bahasa Indonesia
Judul Skripsi	:	Prinsip Kerjasama Tuturan Deklaratif Bahasa Persidangan Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru

2. Tugas-tugas Pembimbing berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
3. Dalam melaksanakan bimbingan, pembimbing supaya memperhatikan usul dan saran seminar proposal
4. Kepada Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini diberi honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak surat keputusan ini diterbitkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kutipan** : Disampaikan pada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan : di Pekanbaru
Tanggal : 15 Februari 2019
Dekan

Drs. Alzaber, M.Si
NIP. 19591204 198610 1001
Sertifikasi.11110100600810

Tembusan disampaikan kepada :

- 1.Yth.Rektor UIR Pekanbaru
- 2.Yth.Kepala Biro Keuangan UIR Pekanbaru
- 3.Yth.Ketua Program Study Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UIR Pekanbaru
- 4.Pertinggal..

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

الجامعة الإسلامية الربيونية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: edufac.fkip@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Pekanbaru, 15 Februari 2019

Nomor : 216 /E-UIR/27-Fk/2019

Hal : *Izin riset*

Kepada Yth Bapak Gubernur Riau
C/q Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Di –
Pekanbaru

Assalamu' alaikum Wr, Wbr.

Bersama ini datang menghadap Bapak/Ibu mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau:

Nama : Riana Fatmalia
Nomor Pokok Mhs : 15 621 0026
Jurusan : Pendidikan Bahasa dan Seni
Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia

Untuk meminta izin melakukan penelitian dengan judul ***"Prinsip Kerjasama Tuturan Deklaratif Bahasa Persidangan Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru"***.

Untuk kepentingan itu, kami berharap agar Bapak/Ibu berkenan memberikan rekomendasi izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Drs. Alzaber, M.Si

NIP/NPK : 19591 204 198910 1001

Sertifikasi. 11110100600810

NIDN.0004125903

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Mhik

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/18829
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

182010

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Nomor : 216/E-UIR/27-FK/2019 Tanggal 18 Februari 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: Riana Fatmalia
2. NIM / KTP	: 156210026
3. Program Studi	: BAHASA INDONESIA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: JL. KARYA 2
6. Judul Penelitian	: Prinsip Kerjasama Tuturan Deklaratif Bahasa Persidangan Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru
7. Lokasi Penelitian	: PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PEKANBARU

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Februari 2019

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru

PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN

TINDAK PIDANA KORUPSI PEKANBARU

Jl. Teratai No. 85 Telp. (0761) 24953 - Fax. No. (0761) 22573

PEKANBARU 28127

Website : <http://pn-pekanbaru.go.id>, email : admin@pn-pekanbaru.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 6/HK.03/III/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDDI SANGAPTA SINUHADJI, SH.,MH

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Universitas Islam Riau
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan :

Nama : **RIANA FATMALIA**

NIM : 156210026

Judul : PRINSIP KERJASAMA TUTURAN DEKLARATIF
BAHASA PERSIDANGAN DI PENGADILAN
NEGERI KELAS 1 A PEKANBARU.

Adalah benar telah melakukan penelitian, meminta bahan / data /
informasi yang berkaitan dengan penulisan Skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat ini disampaikan, dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pekanbaru, 27 Februari 2019

Panitera

EDDI SANGAPTA SINUHADJI, SH.,MH
NIP. 19670625 199103 1 005

DAFTAR PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA

Nama : RIANA FATMALIA
 Tempat/Tgl.Lahir : TEMBILAHAN / 27 Juni 1996
 NPM : 156210026
 Fakultas : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
 Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

KODE MK	MATA KULIAH	NILAI	AM	K	KM
BI12002	APRESIASI PUISI POETRY APPRECIATION	A-	3.67	3	11.01
BI12006	BAHASA INGGRIS ENGLISH LANGUAGE	A	4	2	8
BI12005	BERBICARA SPEAKING	A	4	2	8
FK12001	LANDASAN PENDIDIKAN INTRODUCTION OF EDUCATION	A-	3.67	2	7.34
BI12001	LINGUISTIK UMUM GENERAL LINGUISTICS	A-	3.67	2	7.34
BI12004	MEMBACA READING	A	4	2	8
BI12003	MENYIMAK LISTENING	A	4	2	8
BI12006	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA GUIDANCE AND DEVELOPMENT OF INDONESIAN	A	4	2	8
BI12001	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ISLAMIC EDUCATION	B	3	2	6
MKU601102	PENDIDIKAN PANCASILA PANCASILA EDUCATION	A	4	2	8
BI32017	TEORI BELAJAR BAHASA LANGUAGE LEARNING THEORY	A	4	2	8
BI32018	TEORI SASTRA LITERATURE THEORY	B	3	2	6
BI22002	AL ISLAM 1 (FIKIH IBADAH) AL ISLAM 1 (FIQH IBADAH)	A-	3.67	2	7.34
BI22012	APRESIASI PROSA FIKSI PROE FICTION APPRECIATION	A	4	2	8
BI22013	DIALEKTOLOGI*** DIALECTOLOGY***	A	4	2	8
BI22008	FONOLOGI BAHASA INDONESIA INDONESIAN PHONOLOGY	A	4	2	8
BI22004	ILMU KEALAMAN NATURAL SCIENCES	A-	3.67	2	7.34
BI32006	KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN CURRICULUM AND LEARNING	A	4	2	8
BI22007	MENULIS WRITING	A-	3.67	2	7.34
BI12008	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN CITIZENSHIP	A	4	2	8
BI22011	SASTRA MELAYU MALAY LITERATURE	A	4	2	8

BI22009	SEJARAH SASTRA <i>LITERATURE HISTORY</i>	B	3	2	6
BI22010	TULISAN ARAB MELAYU <i>MALAY ARABIC SCRIPT</i>	A-	3.67	2	7.34
BI32005	AL ISLAM 2 (FIQIH MU`AMALAH) <i>AL ISLAM 2 (FIQIH MU`AMALAH)</i>	A-	3.67	2	7.34
BI32023	APRESIASI DRAMA <i>DRAMA APPRECIATION</i>	A	4	2	8
BI32022	BAHASA ARAB <i>ARABIC</i>	A-	3.67	2	7.34
BI32016	BELAJAR DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA <i>LEARNING AND INDOONESIAN EDUCATION</i>	A	4	2	8
BI32024	LEKSIKOGRAFI*** <i>LEXICOGRAPHY***</i>	A-	3.67	2	7.34
BI33019	MORFOLOGI BAHASA INDONESIA <i>INDONESIAN MORPHOLOGY</i>	A	4	3	12
BI32021	PEMBELAJARAN MENULIS <i>WRITING LEARNING</i>	A-	3.67	2	7.34
BI32028	RETORIKA*** <i>RHETORIC***</i>	A	4	2	8
BI32020	TRADISI MELAYU <i>MALAY TRADITION</i>	A	4	2	8
BI42007	AL ISLAM 3 (ULUM AL-QUR`AN DAN HADIST) <i>AL ISLAM 3 (ULUM AL-QUR`AN AND HADIST)</i>	A-	3.67	2	7.34
BI42010	ETIKA DAN PROFESI PENDIDIKAN <i>ETIC AND EDUCATIONAL PROFESSION</i>	A	4	2	8
BI43030	MEDIA PEMBELAJARAN DAN TIK PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA <i>MEDIA LEARNING AND ICT EDUCATION INDOONESIAN</i>	A	4	3	12
BI42034	MENULIS KARYA ILMIAH <i>WRITING SCIENTIFIC WORKS</i>	A-	3.67	2	7.34
BI42032	PEMBELAJARAN MEMBACA <i>READING SKILL INSTRUCTIONS</i>	A	4	2	8
BI42035	PEMBELAJARAN MENYIMAK <i>LISTENING SKILL INSTRUCTIONS</i>	A-	3.67	2	7.34
BI42009	PENGELOLAAN DAN PENDIDIKAN <i>MANAGEMENT OF EDUCATION</i>	A	4	2	8
BI42008	PSIKOLOGI PENDIDIKAN <i>EDUCATIONAL PSYCHOLOGY</i>	A-	3.67	2	7.34
BI42036	SEMIOTIKA*** <i>SEMIOTICS***</i>	A-	3.67	2	7.34
BI43031	SINTAKSIS BAHASA INDONESIA <i>INDONESIAN SYNTAX</i>	A	4	3	12
BI42033	WACANA BAHASA INDONESIA <i>INDONESIAN DISCOURSE</i>	A-	3.67	2	7.34
BI52046	ANALISIS WACANA KRITIS*** <i>DISCOURSE ANALYSIS***</i>	A-	3.67	2	7.34
BI53040	EVALUASI DAN TEKNIK PENCAPAIAN HASIL BELAJAR SISWA BI <i>EVALUTION AND TECHNICAL ACHIEVEMENT STUDENT RESULT LANGUAGE EDUCATION</i>	A	4	3	12
BI52011	FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM <i>PHILOSHOPHY OF ISLAMIC EDUCATION</i>	A-	3.67	2	7.34
BI52044	PEMBELAJARAN SASTRA <i>LEARNING LITERATURE</i>	A	4	2	8
BI52042	PSIKOLINGUISTIK <i>PSYCHOLINGUISTIC</i>	A	4	2	8
BI52045	SASTRA NUSANTARA <i>LITERATURE NUSANTARA</i>	B	3	2	6

BI52043	SOSIOLINGUISTIK <i>SOCIOLINGUISTICS</i>	A	4	2	8
BI53012	STATISTIK PENDIDIKAN <i>EDUCATIONAL STATISTIC</i>	B	3	3	9
BI53041	TELAH BUKU TEKS BAHASA INDONESIA <i>TEXTBOOKS INDONESIAN STUDY</i>	A-	3.67	3	11.01
BI53039	TELAH KURIKULUM DAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN <i>THE STUDY CURRICULUM & DEVELOPMENT PLANNING EDUCATION LEARNING INDONES</i>	A	4	3	12
BI62056	ANALISIS KESALAHAN BAHASA <i>ERROR ANALYSIS</i>	A-	3.67	2	7.34
BI62014	BIMBINGAN DAN KONSELING <i>GUIDANCE AND COUNSELING</i>	A	4	2	8
BI62011	KEWIRAUSAHAAN DI BIDANG PENDIDIKAN <i>ENTERPRENEURSHIP EDUCATION</i>	A	4	2	8
BI62054	PEMBELAJARAN BERBICARA <i>SPEAKING SKILL INSTRUCTIONS</i>	A-	3.67	2	7.34
BI63049	PENELITIAN PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA <i>INDONESIAN EDUCATION RESARCH</i>	A-	3.67	3	11.01
BI62053	PERBANDINGAN BAHASA NUSANTARA <i>COMPARISON OF NUSANTARA LANGUAGE</i>	A	4	2	8
BI62052	PRAGMATIK <i>PRAGMATIC</i>	A	4	2	8
BI62055	SASTRA KONTEMPORER <i>CONTEMPORARY LITERATURE</i>	A-	3.67	2	7.34
BI62051	SEMANTIK BAHASA INDONESIA <i>SEMANTICS INDONESIAN</i>	A	4	2	8
BI62057	STILISTIKA*** <i>STILISTIKA***</i>	A-	3.67	2	7.34
BI63050	TEORI DAN PRAKTEK PENGAJARAN MIKRO PEND. BAHASA INDONESIA <i>THEORY AND PRACTICE OF MICROTEACHING EDUCATION INDONESIAN</i>	A-	3.67	3	11.01
BI74015	KULIAH PRAKTEK LAPANGAN PENDIDIKAN (KPLP) <i>EDUCATION FIELD AND PRACTICE</i>	A	4	4	16
BI73060	SEMINAR PEND. BIDANG STUDI PEND. BAHASA INDONESIA <i>EDUCATIONAL SEMINARS FIELD STUDY INDONESIAN LANGUAGE AND LITERATURE</i>	A-	3.67	3	11.01
BI86016	SKRIPSI <i>UNDERGRADUATE THESIS</i>	B+	3.5	6	21
		Jumlah		151	570.53
		IPK		3.78	

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

Pekanbaru, 04 Juli 2019
 Kepala BAAK,

 Akmar Efendi, S.Kom, M.Kom

ABSTRAK

Riana Fatmalia. 2019. Skripsi. Prinsip Kerja Sama Tuturan Deklaratif Bahasa Persidangan Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kalimat deklaratif dan pematuhan serta pelanggaran maksim prinsip kerjasama saksi di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru. Masalah penelitian ini adalah apa sajakah tuturan deklatif saksi, bagaimanakah bentuk tuturan deklaratif saksi yang mematuhi prinsip kerja sama dan bagaimanakah bentuk tuturan deklaratif yang melanggar prinsip kerja sama di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru. Penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Grice (Wijana, 1996) sebagai acuan teori. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ditemukan 196 tuturan deklaratif tuturan yang terdiri dari menyatakan informasi faktual 84 tuturan, menyatakan keputusan atau penilaian terdapat 6 tuturan, menyatakan perjanjian, peringatan dan nasehat 1 tuturan, menyatakan ucapan terimakasih atas suatu keberhasilan atau ucapan prihatin atas kemalangan 1 tuturan, dan menyatakan penjelasan atau keterangan 72 tuturan. Dalam penuturan saksi lebih banyak menyatakan informasi faktual kepada hakim, tuturan saksi adalah jawaban yang diharapkan oleh hakim karena jawabanya memberikan informasi yang sebenarnya. Pada prinsip kerja sama terdapat empat maksim yang terdiri maksim kuantitas 77 tuturan kooperatif, maksim kualitas 36 tuturan kooperatif, maksim relevansi 33 tuturan kooperatif, dan maksim pelaksanaan 1 tuturan kooperatif. Sedangkan pelanggaran prinsip kerja sama terdapat empat maksim yaitu pelanggaran maksim kuantitas 19 tuturan tidak kooperatif, maksim kualitas 1 tuturan tidak kooperatif, maksim relevansi 21 tuturan tidak kooperatif, dan maksim pelaksanaan 8 tuturan tidak kooperatif.

Kata kunci : Prinsip kerja sama, Tuturan, Tuturan Deklaratif, Bahasa persidangan

ABSTRACT

His study aims to determine the declarative and obedient sentence forms and violations of the maximal principle of witness cooperation in the Class 1 A District Court in Pekanbaru. The problem of this research is what are the declarative speeches of witnesses, how are the declarative speech forms of witnesses who obey the principle of the same principle and how is the declarative speech form that violates the principle of cooperation in the Class 1 A Pekanbaru District Court. The author uses the theory put forward by Grice (Wijana, 1996) as a theoretical reference. This research uses a descriptive method. The results of this study indicate that there are 196 declarative speech utterances consisting of expressing 84 utterance factual information, stating that there are 6 speeches or judgments, stating agreements, warnings and advice 1 utterance, expressing gratitude for a success or utterance concerned with misfortune 1 , and state an explanation or explanation of 72 speeches. In the statement the witness stated more factual information to the judge, the witness's speech was the answer expected by the judge because the answer provided the actual information. On the principle of cooperation there are four maxims which consist of quantity maxim 77 cooperative speech, maxim quality 36 cooperative speech, maxim relevance 33 cooperative speech, and maxim implementation of 1 cooperative speech. Whereas the violation of the principle of cooperation has four maxims, namely violation of quantity maxim 19 uncooperative speech, maxim of quality 1 speech is not cooperative, maxim relevance 21 uncooperative speech, and maximal implementation of 8 non-cooperative speeches.

Keywords: Principle of cooperation, speech, declarative speech, language of trial

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Prinsip Kerja Sama Tuturan Deklaratif Bahasa Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru”, dapat terselesaikan dengan baik. Selawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah yang tidak bermoral ke alam yang bermoral seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan karya tulis penulis yang dapat terselesaikan dengan baik. Namun, masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, semua itu di luar kemampuan penulis. Banyak rintangan dan hambatan yang dialami penulis yang begitu banyak pihak pula yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis menyatakan terimakasih kepada:

1. Drs.Alzaber,M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
2. Dr.Sri Amnah, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam hal akademik perkuliahan.
3. Muhamad Mukhlis,S.Pd.,M.Pd. selaku ketua Prodi Studi Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau yang telah

memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan proposal ini.

4. Drs. Herwandi, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan masukan, pengetahuan, dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun proposal ini.
5. orang tua, ayahanda Fauri dan Ibu nda Maimunah yang selalu memberikan semangat serta dukungan baik dari segi moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
6. kakekku, Alm M.Madil yang telah memberikan semangat atas jasanya sehingga penulis bisa melanjutkan ke Perguruan Tinggi.
7. pihak Pengadilan Negeri kelas 1 A Pekanbaru sebagai sumber data yang memberikan izin kepada penulis.
8. adikku Mayada Fahrina dan Riskia Annisa yang menjadi sumber semangat bagi penulis.
9. sahabatku Uly, Anita, Elda yang selalu memotivasi penulis .
10. teman-teman seperjuangan kelas 7G pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FKIP UIR yang telah memberikan bantuan serta berbagi ilmu dalam penulisan proposal ini.

Semoga penelitian ini bermanfaat untuk peneliti selanjutnya. Dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan proposal ini.

Pekanbaru, 2019

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DATA TABEL.....	iii
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4.1 Ruang Lingkup	7
1.4.2 Pembatasan Masalah.....	7
1.4.3 Penjelasan Istilah	8
1.5 Anggapan Dasar Dan Teori	9
1.5.1 Anggapan Dasar.....	9
1.5.2 Teori	9
1.6 Penentuan Sumber Data.....	19
1.6.1 Sumber Data	20
1.6.2 Data.....	20
1.7 Metodologi Penelitian.....	20
1.7.1 Pendekatan Penelitian	21
1.7.2 Jenis Penelitian	21
1.7.3 Metode Penelitian	21
1.7.4 Teknik Pengumpulan Data.....	22
1.8 Pemeriksaan Keabsahan Data.....	24
1.9 Teknik Analisis Data	25
BAB II PENGOLAHAN DATA	28
2.1 Deskripsi Data.....	28

2.2	Analisis Data.....	49
2.2.1	Bentuk Tuturan Deklaratif Saksi Bahasa Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru.....	49
2.2.2	Prinsip Kerja Sama Tuturan Deklaratif Saksi Bahasa Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru.....	126
2.2.3	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Tuturan Deklaratif Saksi Bahasa Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru.....	208
2.3	Interpretasi Data	214
BAB III KESIMPULAN.....		219
BAB IV HAMBATAAN DAN SARAN.....		220
4.1	Hambatan.....	220
4.2	Saran	220
DAFTAR PUSTAKA.....		221

DAFTAR TABEL

Tabel 01	Rekapulasi Bentuk Tuturan Deklaratif Saksi di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru	125
Tabel 02	Prinsip Kerja Sama Maksim Kuantitas Dalam Tuturan Deklaratif Saksi Bahasa Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru	156
Tabel 03	Prinsip Kerja Sama Maksim Kualitas Dalam Tuturan Deklaratif Saksi Bahasa Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas1 A Pekanbaru	170
Tabel 04	Prinsip Kerja Sama Maksim Relevansi Dalam Tuturan Deklaratif Saksi Bahasa Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas1 A Pekanbaru	188
Tabel 05	Prinsip Kerja Sama Maksim Pelaksanaan/ Cara Dalam Tuturan Deklaratif Saksi Bahasa Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru	186
Tabel 06	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Maksim Kuantitas Dalam Tuturan Deklaratif Saksi Bahasa Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas1 A Pekanbaru	196
Tabel 07	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Maksim Kualitas Dalam Tuturan Deklaratif Saksi Bahasa Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas1 A Pekanbaru	197
Tabel 08	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Maksim Relevansi Dalam Tuturan Deklaratif Saksi Bahasa Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas1 A Pekanbaru	207
Tabel 09	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Maksim Pelaksanaan/ Cara Dalam Tuturan Deklaratif Saksi Bahasa Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas1 A Pekanbaru	212
Tabel 10	Rekapulasi Hasil Analisis Data Maksim Tuturan Prinsip Kerja Sama Tuturan Deklaratif Saksi Bahasa Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas1 A Pekanbaru	213

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari penggunaan bahasa. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi dalam berinteraksi sosial. Susanti (2016:52) menyatakan bahwa bahasa digunakan semua orang baik individu maupun kelompok dalam bersosial. Oleh karena itu, peran bahasa sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang baik adalah bahasa yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman mitra tutur.

Sejalan dengan penjelasan mengenai hakikat bahasa maka, Sulistyowati (2003:126) menyatakan komunikasi dikatakan berhasil apabila seorang pembicara harus memperhatikan kaidah-kaidah prinsip kerja sama agar apa yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh mitra tutur. Namun, kenyataannya seringkali orang melanggar prinsip kerja sama. Grice dalam Wijana (1996:46) dalam menjalin komunikasi yang baik dengan mitra tutur, penutur harus mematuhi empat maksim dalam prinsip kerja sama yakni maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi dan maksim pelaksanaan. Dengan kata lain, jika tidak menaati atau mematuhi prinsip kerja sama tersebut, maka pertuturan atau percakapan tidak akan berjalan dengan baik.

PU : Saudara saksi, Salam Hasibuan pernah dilaporkan pemalsuan surat?

S : Pernah dilaporkan Pak.

Tuturan di atas merupakan prinsip kerja sama maksim kuantitas.

Dikatakan demikian karena maksud penutur memberikan kontribusi yang

secukupnya kepada lawan tutur. Selanjutnya adapun contoh dari pelanggaran prinsip kerja sama dalam persidangan adalah sebagai berikut.

H : Pada saat kejadian anda berada dimana?

S : Pada saat itu saya berada dirumah, ketika maling itu masuk ke kamar, saya tidak mengetahuinya Pak.

Tuturan di atas merupakan tuturan deklaratif yang mengandung pelanggaran prinsip kerja sama maksim kuantitas karena saksi telah memberikan informasi yang berlebihan kepada hakim. Hakim hanya bertanya mengenai keberadaan saksi pada saat kejadian bukan kronologis masuknya maling sehingga contoh tidak memenuhi prinsip kerja sama. Sehubungan dengan hal itu pada persidangan memang tidak terlepas dari tuturan deklaratif yang sering dijumpai ketika saksi memberikan penjelasan terhadap suatu kasus. Chaer (2009:187) Kalimat deklaratif merupakan kalimat pernyataan yang ditujukan kepada orang lain. Contohnya “Saya tidak pernah mengambil uang tersebut”.

Penjelasan mengenai tuturan deklaratif di atas apabila dipakai dalam mengamati bahasa keterangan saksi. Keterangan saksi dibutuhkan dalam suatu perkara untuk memperjelas sebuah kejadian pidana berdasarkan keahliannya dan sebagai salah satu bukti yang mengarah kepada apa yang dilihat, dirasakan dan dialami pada suatu peristiwa. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini kerana keterangan saksi memegang peranan sangat penting terutama dalam hal terdakwa menyangkal dakwanya. Bila keterangan yang diberi tidak benar atau tidak jelas, ada ancaman pidananya karena dianggap memberikan keterangan palsu dan berpengaruh terhadap keputusan hakim dalam suatu permasalahan.

Dengan adanya resiko tersebut, maka bila dihubungkan dengan Pengadilan sebagai institusi resmi tempat peristiwa tutur terjadi dan bahasa sebagai alat komunikasi, yang sudah dipastikan di persidangan menggunakan bahasa baku yang seharusnya mudah dipahami oleh mitra tutur.

Berdasarkan kenyataan dalam persidangan, masih terdapat keterangan saksi yang melanggar prinsip kerja sama sehingga informasi tidak tersampaikan dengan baik. Semakin taat dengan prinsip-prinsip kerja sama dalam bertutur saksi, maka cenderung memberikan dampak yang positif. Seperti, hakim mudah memahami perkataan saksi. Sidang berjalan dengan lancar dan waktu yang diperlukan lebih efisien. Penulis melakukan penelitian dengan judul “Prinsip Kerja Sama Tuturan Deklaratif Bahasa Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru”. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan.

Penelitian prinsip kerja sama ini sudah pernah diteliti sebelumnya oleh Suci Rahayu, Tahun 2015 yang berjudul “Prinsip Kerja Sama Dalam Tuturan Antara Pedagang dan Pembeli di Pasar Wisata Pekanbaru”. Penelitian Suci Rahayu ini merupakan skripsi sarjana di Universitas Islam Riau yang membahas tentang prinsip kerja sama yang terdapat dalam tuturan antara pedagang dan pembeli di Pasar Wisata Pekanbaru dan bentuk kalimat yang terdapat dalam tuturan antara pedagang dan pembeli di Pasar Wisata Pekanbaru berdasarkan nilai komunikatifnya.

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif dan teknik pengambilan data menggunakan: observasi, rekaman dan catat. Hasil penelitian tuturan pedagang dan pembeli di Pasar Wisata Pekanbaru yang

mengandung maksim kuantitas 26 tuturan, maksim kualitas ditemukan 28 tuturan koomperatif, maksim relevansi ditemukan sebanyak 11 tuturan kooperatif, dan maksim pelaksanaan atau cara ditemukan sebanyak 14 tuturan kooperatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian lakukan adalah sama-sama meneliti prinsip kerja sama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada lokasi penelitian, dan masalah penelitian bila penelitian sebelumnya menganalisis seluruh nilai komunikatif sedangkan penelitian ini hanya tuturan deklaratif.

Selanjutnya, penelitian mengenai prinsip kerja sama juga pernah diteliti oleh Riana Utami, Tahun 2012 dengan judul “prinsip kerja sama Dalam Tuturan Tukang Becak Terhadap Penumpang di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti”. Tahun 2012 FKIP UIR tentang prinsip kerja sama yang terdapat dalam tuturan tukang becak terhadap penumpang di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian, dan modus tuturan digunakan oleh penumpang di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Teori yang digunakan yaitu (Putu Wijana 1996). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik yang digunakan yaitu observasi, rekaman dan catat. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam prinsip kerja sama terdapat empat maksim yaitu maksim kuantitas 144 tuturan yang terdiri dari 113 tuturan kooperatif dan 31 tuturan tidak kooperatif, maksim kualitas 55 tuturan yang terdiri dari 47 tuturan kooperatif dan 8 tuturan tidak kooperatif, maksim relevansi 26 tuturan yang terdiri 16 koomperatif dan 10 tidak kooperatif, dan maksim pelaksanaan 123 tuturan 103 tuturan kooperatif dan 20 tuturan tidak kooperatif.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama tentang prinsip kerja sama, sedangkan perbedaan penelitian ini adalah lokasi dan masalah penelitian.

Selanjutnya, penelitian mengenai prinsip kerja sama juga pernah diteliti oleh Enny Melita, Tahun 2018 dengan judul “Prinsip Kerja Sama Dalam Tuturan Performatif Acara Just Alvin Episode *Nothing Is Impossible* di Metro Tv” FKIP UIR. Dengan masalah tentang tuturan performatif dalam acara Just Alvin Episode *Nothing Is Impossible* di Metro Tv dan tuturan prinsip kerja sama dalam acara Just Alvin Episode *Nothing Is Impossible* di Metro Tv. Persamaan penelitian ini dengan penelitian dengan penelitian yang penulis lakukan sama-sama meneliti prinsip kerja sama. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada objek penelitan dan masalah penelitian. Bila dipenelitian sebelumnya meneliti tuturan performatif sedangkan penelitian ini dekalaratif.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat teoritis penelitian ini berupa sumbangan wawasan terhadap ilmu pengetahuan khususnya bidang pragmatik aspek prinsip kerja sama, penutur dan lawan tutur harus bisa memahami apa yang ingin disampaikan agar komunikasi bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan prinsip kerja sama. Selanjutnya manfaat praktisnya, adalah diharapkan orang-orang yang setiap hari berkecimpung di dunia hukum terutama persidangan, lebih menyadari bahwa dalam situasi tertentu di dalam persidangan kemampuan berbahasa yang baik sangat penting artinya, agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap maksud yang ingin disampaikan pada saat berkomunikasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dapatlah dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut

1. Apa sajakah tuturan deklaratif saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru?
2. Bagaimanakah tuturan deklaratif saksi yang memenuhi prinsip kerja sama dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru?
3. Bagaimanakah tuturan deklaratif saksi yang melanggar prinsip kerja sama dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Tujuan penelitian, dirumuskan berdasarkan masalah yang ada pada penelitian.

1. Untuk mengetahui bentuk kalimat deklaratif yang terdapat pada tuturan bahasa persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui maksim yang memenuhi prinsip kerja sama dalam tuturan deklaratif pada tuturan saksi dalam bahasa persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui maksim yang melanggar prinsip kerja sama tuturan deklaratif pada tuturan saksi dalam bahasa persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.4.1 Ruang Lingkup

Penelitian tentang prinsip kerja sama dalam tuturan deklaratif bahasa persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru, ini termasuk ke dalam ruang lingkup linguistik kajian pragmatik. Yule (2006:3) menyatakan pragmatik adalah ilmu yang mempelajari maksud penutur pada saat berkomunikasi.

Pragmatik mengkaji tentang: situasi tutur, tindak tutur, prinsip kerja sama dan klasifikasi tindak tutur (lokusi, ilokusi dan perlokusi), pengungkapan tuturan (kalimat deklaratif, kalimat imperatif dan interogatif), pengungkapan tuturan (kalimat deklaratif, kalimat imperatif dan interogatif) dan tindak tutur langsung. Penulis hanya meneliti salah satu materi yang dikaji dalam pragmatik, yaitu prinsip kerja sama pada tuturan deklaratif. Adapun alasan yang penulis ambil karena dalam tuturan saksi di dalam persidangan banyak terdapat tuturan deklaratif dan prinsip kerja sama.

1.4.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup yang sudah penulis kemukakan, penelitian ini penulis batasi pada prinsip kerja sama saja dalam tuturan deklaratif saksi bahasa persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru. prinsip kerja sama terdiri dari 4 maksim yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, maksim pelaksanaan/cara. Hal ini sengaja peneliti pilih mengingat banyaknya terdapat tuturan deklaratif di dalam tuturan saksi saat memberikan penjelasannya pada suatu kasus dan pentingnya prinsip kerja sama yang baik antara tuturan

hakim dan saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1 A Pekanbaru.

1.4.3 Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan memahami arah penelitian ini maka dijelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan masalah pokok penelitian ini:

1. Prinsip kerja sama adalah kaidah adalah berkomunikasi agar penutur dan lawan tutur saling paham terhadap apa yang disampaikan.
2. Maksim kuantitas adalah maksim yang menginginkan mitra tutur untuk memberikan kontribusi secukupnya Wijana (1996:46)
3. Maksim kualitas adalah maksim yang menghendaki peserta pertuturan memerikan kontribusi yang sebenarnya Wijana (1996:48)
4. Maksim relevansi adalah maksim yang menginginkan mitra tutur memberikan kontribusi yang relevan sesuai dengan topik pembicaraan. Wijana (1996:49)
5. Maksim pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini mengharuskan penutur dan lawan tutur berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa dan tidak berlebih-lebihan serta runtut (Wijana, 1996:50)
6. Tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan berbahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu Chaer, Abdul dan Leoni Agustina 2010:50)

7. Kalimat deklaratif adalah memberitahukan sesuatu kepada mitra tutur (Rahardi, 2005:74-75)
8. Persidangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertemuan untuk membicarakan sesuatu (Depdiknas, 2008:1301)
9. Pengadilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara (Depdiknas, 2008:10)

1.5 Anggapan Dasar dan Teori

1.5.1 Anggapan Dasar

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis mempunyai anggapan bahwa tuturan deklaratif dalam bahasa persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru terdapat prinsip kerja sama yaitu (1) maksim kuantitas (2) maksim kualitas (3) maksim relevansi dan (4) maksim pelaksanaan atau cara serta diungkapkan dalam berbagai modus pengungkapan tuturan.

1.5.2 Teori

Dalam penelitian ini penulis berpegang pada teori, yaitu teori yang dijadikan dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian ini penulis merujuk beberapa teori yang berkaitan dengan prinsip kerja sama. Teori yang digunakan sebagai pegangan dalam penelitian ini adalah konsep - konsep yang berhubungan dengan prinsip kerja sama dan tindak tutur. Teori yang penulis gunakan dalam menganalisis data mengenai prinsip kerja sama adalah Wijana (1996), Nandar (2013), Kujana (2005), Leech (1993) dan teori - teori lain yang mendukung penelitian ini.

1.5.2.1 Pragmatik

Nandar (2009:5) menyatakan bahwa pragmatik adalah ilmu yang membahas mengenai maksud tuturan pada saat peristiwa tutur terjadi. Menurut Leech (1993:1) pragmatik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bahasa itu digunakan. Dalam berkomunikasi peran bahasa sangat penting ketika saat berbicara dengan mitra tutur apabila memakai bahasa yang mudah dipahami maka orang akan merespon dengan baik dan apabila tidak maka akan terjadi kesalahpahaman antara penutur dan mitra tutur. Sejalan dengan pengertian di atas Menurut Sari (2013:179) dalam pengajaran bahasa pragmatik disebut pendekatan komunikatif karena merupakan ilmu yang mempelajari maksud penutur dalam berkomunikasi.

1.5.2.2 Pristiwa Tutur

Tindak tutur adalah suatu peristiwa yang terjadi antara penutur dan mitra tutur saling berkomunikasi satu sama lain yang di dalamnya terdapat ujaran yang digunakan pada saat melakukan interaksi sosial sehingga komunikasi berjalan dengan baik tidak terjadi kesalahpahaman dan mencapai suatu tujuan dalam berkomunikasi. Pada tempat dan situasi tertentu yang melatarbelakanginya.

Chaer, Abdul dan Leoni Agustina (2010:47) “Peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam suatu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan dari dalam waktu, tempat dan situasi tertentu”.

1.5.2.3 Konteks Pemakaian Bahasa

Menurut Susanti (2016:52) Konteks bahasa adalah aspek di luar bahasa berupa kondisi sosial, politik, ekonomi dan sebagainya yang mempunyai pengaruh terhadap penggunaan bahasa. Konteks adalah yang melatarbelakangi suatu ujaran yang peranya sangat penting sekali terhadap pemaknaan suatu tuturan yang terjadi antara penutur dan mitra tutur konteks ini bisa berupa keterangan tempat, waktu, situasi dan lain sebagainya yang digunakan untuk penujung intersprestasi prinsip.

Cummings (2007:5) “Kita tidak dapat mendapatkan definisi pragmatik yang lengkap bila konteks berada di luar pengejawantahannya yang jelas seperti latar fisik tempat dihasilkannya suatu ujaran yang mencakup faktor-faktor lingustik sosial dan epistemiskerja sama”.

1.5.2.4 Deklaratif

Chaer (2009:187-189) menyatakan kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan yang ditujukan kepada orang lain. Dilihat dari maksud penggunaannya, kalimat deklaratif ini dapat dibedakan atas kalimat yang :

1. Hanya untuk menyampaikan informasi faktual. Misalnya:
 - Ibu dosen kami masih muda
 - Beliau adalah dosen yang belum menikah
 - Siska akan melanjutkan kuliah
 - Penyaluran BLT tidak berjalan lancar
 - Banyak warga tidak berani menggunakan kompor gas; lebih suka menggunakan kayu bakar.

2. Menyatakan keputusan atau penilaian. Misalnya:

- Kami menyatakan terdakwa tidak bersalah
- Saya merasa puas dengan pelayanan anda
- `
Sebaiknya huBu ngan kita sampai disini saja
- Ibu dosen itu memang cantik sekali
- Sayur ini rasanya kurang garam

3. Untuk menyatakan perjanjian, peringatan, nasihat dan sebagainya.

Misalnya:

- Kami harap anda mau menerima keputusan ini
- Kamu harus hati-hati setibanya di Jakarta
- Sebaiknya anda menelpon dulu kalau mau datang ke sini
- Besok kita harus bicarakan lagi masalah ini
- Kalian harus belajar baik-baik menjelang ujian akhir semester

4. Untuk menyatakan ucapan selamat atas suatu keberhasilan atau ucapan prihatin atas suatu kemalangan. Misalnya:

- Saya mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda mencapai gelar profesor
- Kami turut berbela sungkawa atas meninggalnya orang tua Anda
- Saya ikut merasa sedih atas musibah yang anda alami
- Kami bersyukur bahwa Anda telah berhasil menunaikan ibadah haji

5. Untuk memberi penjelasan, keterangan, atau perincian kepada seseorang.

Misalnya:

- Saya jelaskan kepada Anda bahwa saya tidak bersalah

- Kami beritahukan yang tidak hadir adalah Siti, Siskam dan Ani
- Sudah kami infokan bahwa kedatangan beliau agak terlambat karena jalan macet
- Saya terangkan sekali lagi bahwa beliau tidak terlibat dalam kasus korupsi itu
- Kami jelaskan sekali lagi bahwa pinjaman itu tidak dikenakan bunga

1.5.2.5 Prinsip Kerja Sama

Prinsip kerja sama terbagi 4 (empat maksim) :

1) Maksim Kuantitas

Wijana (1996:46) Maksim yang menghendaki mendapat informasi yang secukupnya saja contohnya ketika di tanya nama harus dijawab nama pula tidak boleh berlebihan biasanya di luar negeri seperti itu tetapi di Indonesia faktanya masih sebaliknya ketika di tanya A jawabnya B sampai ke C. Misalya penutur yang berbicara secara wajar tentu akan memilih (104) dibandingkan dengan (105).

(104) Tetangga saya hamil

(105) Tetangga saya yang perempuan hamil

Ujaran (104) disamping lebih ringkas, juga tidak menyimpangkan nilai kebenaran (*truth value*). setiap orang tentu tahu bahwa hanya orang-orang wanitalah yang mungkin hamil. Dengan demikian elemen *yang perempuan* dalam tuturan (105) sifatnya berlebih-lebihan. Kata *hamil* dalam (105) sudah menyarankan tuturan itu. Kehadiran *yang perempuan* dalam (105) justru menerangkan hal-hal yang sudah jelas. Hal ini bertentangan dengan maksim kuantitas. Adapun contoh lain yang terdapat dalam Rahayu (2015:39-44).

(1) Maksim kuantitas kooperatif

Konteks :

Hari sabtu, 6 September 2014 pukul 14.13 WIB di Pasar Wisata Pekanbaru. Seorang pembeli sedang bertanya tas ia liat di etalase dan menawarnya.

- P2 : “Kak lihat yang merah itu.”
P1 : “(mengambil tas yang ada di etalase)
P2 : “Kak yang ini ada dompetnya?” (sambil memegang tas)
P1 : “Gak.”

Penjelasan

Tuturan di atas antara penjual dan dianggap tuturan yang memenuhi maksim kuantitas karena penjual hanya memberikan kontribusi yang secukupnya saja hal ini dibuktikan pada kata ‘gak’. dan inilah tuturan penjual dan pembeli dianggap kooperatif, yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

Adapun contoh lain sebagai perbandingan maksim kuantitas yang melanggar prinsip kerja sama sebagai berikut:

(2) Maksim kuantitas tidak kooperatif

Konteks :

Hari Jum’at 5 September 2014, pukul 13.28 WIB, di Pasar Wisata Pekanbaru. Seorang pembeli sedang melihat jilbab, menanyakan bentuk dan harga jilbab yang iya pegang, lalu menawarnya.

- P2 : “Jilbab segi tiga atau segi empat ini.” (sambil memegang jilbab)
P1 : “segitiga, Agel Lelga.”
P2 : “75.000, tak dapat 30.000 Bu k?”
P1 : “Tak dapat do, bahanya bagus”
P2 : “30.000 lah ya?”
P1 : “Belum lagi, cantik bahanya. Itu dia juga.”
(sambil menunjuk jilbab yang lain)

Penjelasan

Pada tuturan antara penjual dan pembeli merupakan tuturan yang tidak memenuhi maksim kuantitas. Hal ini terlihat jelas ketika pembeli menawar bisa atau tidak dengan harga 30.000 penjual mengatakan tidak dapat dan menambahkan mengenai kualitas dari jilbab tersebut. Padahal pembeli tidak menanyakanya. Jawaban yang berlebihan seperti contoh di atas yang dianggap melanggar maksim kuantitas.

2) Maksim Kualitas

Wijana (1996:48) Maksim yang menghendaki mitra tutur memberikan jawabanya yang sebenarnya atau tidak berbohong mau apapun itu alasannya.

Untuk ini dapat diperhatikan wacana (112) di bawah ini :

- (112) Guru : Coba kamu Andi, apa ibu kota Bali?
Andi : Surabaya, Pak guru.
Guru : Bagus, kalau begitu ibu kota Jawa timur Denpasar, ya?

Dalam wacana (112) di atas tampak guru memberikan kontribusi yang melanggar maksim kualitas. Guru mengatakan ibu kota Jawa Timur Denpasar bukanya Surabaya. Jawaban yang tidak mengindahkan maksim kualitas ini diutarakan sebagai rekasi terhadap jawaban Andi yang salah. Dengan jawaban ini sang murid (Andi) sebagai individu yang memiliki kopetensi komunikatif (communicative competence) kemudian secara serta merta mencari jawaban mengapa gurunya membuat pernyataan yang salah. Mengapa kalimat Bapak guru diutarakan dengan nada yang berbeda.

Dengan bukti-bukti yang memadai akhirnya Andi mengetahui bahwa jawaban dari gurunya salah. Kata *bagus* yang diucapkan gurunya konvensional karena tidak digunakan seperti biasanya untuk memuji tetapi sebaliknya untuk mengejek. Jadi, ada alasan-alasan pragmatis mengapa guru dalam (122) memberikan kontribusi yang melanggar kualitas. Berikut contoh lain yang terdapat dalam Rahayu (2015:52).

(3) Maksim kualitas kooperatif

Konteks :

Hari Sabtu, 13 September 2014, pukul 15.40 WIB, di lantai dua Pasar Wisata Pekanbaru. Seorang pembeli ingin membeli sandal yang di pajang di etalase.

- P2 : “Berapa ni kak?”
P1 : “Rp.360.000.”
P2 : “Berapa pasnya kak?”, enggak Pakai nego-nego lagi kak !”
P1 : “Rp280.000.”
P2 : “ Rp 200.000 lah kak”
P2 : “Engak bisa.”

Penjelasan

Tuturan antara penjual dan pembeli di atas telah memenuhi maksim kerja sama hal ini terlihat jelas bahwa jawaban yang diberikan pembel memberikan kontribusi yang sebenarnya, dengan bukti bahwa sandal yang di maksud oleh pembeli tidak dapat di tawar lagi dengan harga pasnya 280.000. Selanjutnya akan di jelaskan mengenai contoh prinsip kerja sama yang melanggar maksim kualitas. Sedangkan contoh maksim yang kualitas yang tidak kooperatif terdapat dalam Riana (2012:107).

(4) Maksim kualitas tidak kooperatif

Konteks :

Hari Kamis tanggal 22 September 2011, tepatnya pukul 17.30 WIB di Pelabuhan Tanjung Harapan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Terlihat seorang tukang becak sedang berdiri di depan pintu keluar masuk penumpang mencoba menawarkan jasanya kepada salah satu calon penumpang yang baru saja tiba dari kapal.

- Penumpang : “Berape harga ke pasar pagi dekat tempekong?
(‘berapa ongkosnya ke pasar pagi dekat tempekong’)
- Becak : “Lime belas rIbu ”
- Penumpang : “Mahal betul” (mahal sekali)
- Becak : “Macam manelah Dik, minyak sekarang mahal satu botol aqua aje dua belas ribu !”
(‘Bagaimana lah Dik, minyak sekarang mahal satu botol aqua saja dua belas ribu ’)

Penjelasan

Tuturan antara tukang becak dan penumpang tidak memenuhi maksim kualitas karena tukang becak mengatakan bahwa harga minyak lima belas ribu berserta alasanya, sehingga jawaban tersebut panjang lebar dan berbelit.

3) Maksim Relevasi

Wijana (1996:49) Maksim ujaran yang dituturkan memiliki hubungan (nyambung) . Untuk lebih jelasnya perhatikan wacana (114) berikut:

114) + Pak ada tabrakan motor lawan truk di pertigaan depan.

- Yang menang apa hadiahnya?

Dialog diatas adalah percakapan antara seorang ayah dengan anaknya. Bila sang ayah sebagai peserta percakapan yang kooperatif, maka tidak selayaknyalah ia mempersamakan peristiwa kecelakaan yang dilihat anaknya itu dengan sebuah pertandingan atau kejuaraan. Di dalam kecelakaan tidak ada pemenang, dan tidak ada pula pihak yang akan menerima hadiah. Semua pihak akan menderita kerugian, bahkan ada kemungkinan salah satu, atau kedua belah pihak meninggal dunia. Agaknya di luar maksud untuk melucu kontribusi (-) dalam (114) sulit dicarikan hubungan implikasionalnya. Untuk ini dibandingkan dengan contoh dalam Rahayu (2015:54).

(5) Maksim relevansi kooperatif

Konteks :

Hari minggu. 7 September 2014, pukul 15.04 WIB, di Pasar Wisata Pekanbaru. Seorang pembeli sedang bertanya tas ransel berwarna hitam dan menawarnya.

- P2 : “Berapa pas dan kurangnya Buk”
P1 : “ 285.000.”
P2 : “Enggak di goyang lagi Buk?” (tidak digoyang lagi Buk)
P1 : “275.00 udah ya, oke ya?”
P2 : “Enggak bisa 180.000 ya?”
P1 : “Di atas 200.00 nawarnya”.
P2 : “Di atas 200.000! yalah”

Penjelasan

Tuturan antara penjual dan pembeli terlihat bahwa jawaban penjual telah memenuhi maksim relevansi dalam prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksimrelevansi karena pada tuturan tersebut, penjual memberikankontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Mengimplikasikan bahwa tas dimaksud pembeli tidak bisa ditawar dengan harga di bawah 200.000. Selanjutnya di bawah ini yang masih termasuk ke dalam prinsip kerja sama yang melanggar maksim relevansi dalam Utami (2012:119).

(6) Maksim relevansi tidak kooperatif

Konteks :

Hari rabu tanggal 21 September 2011, tepatnya pukul 12.40 Wib. di Pasar Sandang Pangan, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Terlihat ada dua orang calon penumpang datang menghampiri

seorang tukang becak yang sedang duduk di khusus tempat parkir becak.

Penumpang : “Nanti sampai simpang tu aje Pak”
Becak : “Tak sampai rumah de” (‘Tak sampai rumah’)
Penumpang : “Sampai sini aje, nah Pak” (‘Berhenti di sini saja ini Pak’)

Penjelasan

Tuturan tukang becak dan penumpang terlihat bahwa jawaban tukang becak tidak memenuhi maksim relevansi dalam prinsip kerja sama. Karena saat penumpang mengatakan turun disimpang lalu tukang becak memberikan jawaban dengan mengatakan tidak sampai rumah artinya kontribusi tidak relevan dan melanggar prinsip kerja sama.

4) Maksim Pelaksanaan

Wijana (1996:50) menghendaki penutur jelas dalam berucap tidak menimbulkan makna yang ganda, tidak kabur, tidak bertele-tele sehingga apa yang disampaikan di terima baik oleh mitra tutur. Untuk mengecoh anaknya seorang ibu sering menguapkan tuturan (118) di bawah ini :

(118) Nanti kalau di Gardena jangan lewat di tempat b-o-n-e-k-a, ya !

Untuk ini dibandingkan dengan contoh dalam Rahayu (2015:56) sebagai berikut:

(7) Maksim pelaksanaan kooperatif

Konteks :

Hari Jum’at 12 September 2014, 13.15 WIB, di lantai dua Pasar Wisata Pekanbaru. Ada dua orang wanita datang melihat- lihat sepatu yang dipajang di etalase lalu mencobanya.

P1 : “Yang mana kak tengoklah” (sambil berdiri di luar toko)
P2 : “Tengok yang dibawah ini kak yang coklat (menunjuk warna coklat) kalau yang hitam ini berapa kak menunjuk warna hitam).

Penjelasan

Pada tuturan antara penjual dan pembeli terlihat bahwa penjual telah memenuhi maksim pelaksanaan/cara dalam prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksim cara dalam tuturan tersebut, penjual memberikan kontribusi secara langsung dan tidak berlebihan hal terbukti ketika penjual menyuruh pembeli untuk meliatnya dulu dan pembeli melakukannya serta menunjuk dan menayakan salah satu jilbab berwarna coklat. Tuturan penjual adalah jawaban yang diharapkan oleh pembeli yang langsung disimpulkan oleh pembeli tersebut, tanpa melalui

panjang lebar atau berbelit. Selanjutnya di bawah ini prinsip kerja sama yang melanggar maksim pelaksanaan cara dalam Utami (2012:131):

(8) Maksim pelaksanaan tidak kooperatif

Konteks :

Hari senin tanggal 1 Agustus 2011, tepatnya pukul 13.00 WIB di Pelabuhan Tanjung Harapan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Terlihat tukang becak sedang ingin menawarkan jasanya kepada calon penumpang yang baru saja tiba di Pelabuhan Tanjung Harapan.

- Becak : “Becak Bu ?”
Penumpang : “ Kalau ke jalan Ponegoro berape bang?
(‘Kalau ke jalan Ponerogo berapa Bang?’)
Becak : “Sepuluh ribu aje Bu ” (‘Sepuluh ribu saja Bu ’)
Penumpang : “ Mahal betol! Biase nye cume lima ribu pun”.
(‘Mahal sekali! Biasanya cuma lima ribu ’)
Becak : “ Kan tempatnye jauh Bu . Apelagi semue barang dah naik”
(‘ Tempatnya jauh Bu , apalagi semua barang harganya sudah naik’)

Penjelasan

Tuturan antara tukang becak di atas terlihat bahwa jawaban tukang becak tidak memenuhi maksim pelaksanaan/cara dalam prinsip kerja sama. Dikatakan tidak memenuhi maksim cara karena dalam tuturan tersebut, tukang becak memberikan kontribusi berlebihan secara runtut. Sehingga tuturan yang diujarkan tukang becak panjang lebar atau berbelit.

1.6 Penentuan Sumber Data

1.6.1 Sumber Data

Sumber data adalah persidangan kasus tindak pidana korupsi pada dunia pendidikan di Pengadilan Negeri Pekanbaru kelas I A. yang direkam pada tanggal 26 Febuari 2019. Penelitian ini tergantung pada kecukupan data yang didapat oleh penulis. Menurut Moleong (2007:157) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif sumber data berupa kata-kata, tindakan, dan data tambahan berupa dokumen.

1.6.2 Data

Data penelitian ini adalah keseleruhan tuturan deklaratif saksi dalam Persidangan pada kasus tindak pidana korupsi pada institusi lembaga pendidikan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A Pekanbaru. Tuturan saksi, alasannya karena pada saat saksi memberikan penjelasan banyak terdapat tuturan deklaratif yang diutarakan sedangkan pada hakim banyak terdapat tuturan intogatif sehingga penulis hanya memulih tutran saksi saja. Adapun dalam penelitian ini penulis memilih program kekhususan hukum pidana. Menurut Muhammad (2004:24) menyatakan bahwa bentuk data dapat berupa narasi, deskripsi, kata-kata, dokumen pribadi, catatan lapangan, artefak, dokumen resmi, video tape, dan transkrip.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Karakteristik penelitian ini, jika dilihat dari pendekatan yang peneliti terapkan, maka penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Berkenaan dengan hal ini, Ibrahim (2015:16) menyatakan pendekatan kualitatif adalah pandangan mengenai cara kerja penelitian yang bersifat natural dengan pendekatan subjektif, serta penilaian interpretif dan kontekstual. Penelitian ini justru memaparkan secara deskriptif setiap gejala dan fakta data bahasa yang ditemukan dan menengahkannya melalui paparan pendeskripsian interaksi para partisipan pertuturan.

Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian “*participant observation*”. Menurut Ibrahim (2015:83) mengatakan bahwa obeservasi

partisipatif adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti ikut serta dalam proses pengambilan data secara langsung.

Berdasarkan pengertian kualitatif di atas, maka penelitian ini merujuk pada kajian mengenai data berupa lisan dan tulisan yang berisi fenomena atau peristiwa dalam kehidupan. Apabila dikaitkan dengan judul yang peneliti kaji, pendekatan ini dirasa sesuai karena fenomena tuturan deklaratif dan merupakan fenomena berbahasa yang ada dalam bahasa persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1 A.

1.7.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penulis melakukan pengamatan langsung di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru. Menurut Moleong (2007:26) Penelitian lapangan adalah peneliti langsung berangkat ke lapangan untuk mengamati suatu fenomena.

1.7.3 Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini dapat dilihat dari sumber data, tujuan penelitian, dan pendekatan analisis data yang diterapkan dalam penelitian. Pada penelitian ini, dalam mengumpulkan data dan informasi tentang prinsip kerja sama tuturan deklaratif penulis menggunakan metode deskriptif. Menurut Suryabrata (2003:76) penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud dapat menggambarkan mengenai kejadian-kejadian.

Sejalan dengan penjelasan mengenai hakikat penelitian deskriptif Menurut Sukardi (2003:157) menyatakan metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan suatu objek.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diaplikasikan dalam penelitian ini melibatkan beberapa teknik yakni: teknik observasi, teknik rekaman, teknik simak, dan teknik catat. Ketiga teknik dimaksud penulis uraikan sebagai berikut:

1.7.4.1 Observasi

Observasi dilakukan selama satu minggu di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru. Yang dilakukan 8 Oktober 2018 sampai 15 Oktober 2018. Menurut Sugiyono (2007:145) menyatakan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak terbatas hanya pada orang tetapi dapat juga pada obyek-obyek lain.

1.7.4.2 Rekaman

Pada teknik rekam ini penulis menggunakan alat perekam dari handphone *Oppo A37*. Penulis memilih alat perekam jenis handphone ini dengan alasan bahwa handphone ini sangat mudah digunakan dalam pengumpulan data. Menurut Muhammad (2004:210) teknik rekam adalah teknik yang dilakukan dengan cara menggunakan alat perekam agar data dapat diawetkan untuk distranskrip baik secara fonetik, fonemis, maupun ortografis.

1.7.4.3 Teknik Simak

Teknik simak digunakan dengan baik saat persidangan berlangsung dengan menyimak penulis dapat mencatat tuturan apa saja yang ucapkan penutur dan mitra tutur. Hal ini memudahkan penulis dalam penyalinan data agar data yang didapat jelas. Sudaryanto dalam Muhammad (2004:207) menyatakan teknik

simak adalah teknik pengumpulan data dengan cara mendengarkan setiap tuturan yang diucapkan.

Penulis menyimak tuturan keseluruhan dialog yang terdapat saat persidangan berlangsung. Teknik ini penulis lakukan dengan cara melihat, mendengarkan, menyimak, mengikuti dengan seksama, serta memperhatikan seluruh tuturan dari awal sampai akhir. Melalui cara ini, penulis akhirnya mendapatkan data tulis sebagai imbas dari hasil penyimakan dimaksud. Bentuk korpus data yang seperti ini sering juga dimakan sebagai proses pentranskripsian data, yakni pengubahan wujud data dari data bahasa lisan menjadi data bahasa tulis.

Wujud korpus data yang telah diubah suai dari wujud korpus data bahasa lisan ke dalam bentuk bahasa tulis, sesungguhnya hanya untuk kepentingan mempermudah pekerjaan pengidentifikasian saat menginventarisasi data dalam tahap pengumpulan data penelitian.

1.7.4.4 Teknik Catat

Teknik catat digunakan baik pada saat persidangan antara hakim dan saksi yaitu dari tanggal 8 Oktober 2018 sampai 15 Oktober 2018. Teknik catat penulis gunakan untuk mencatat tuturan yang terdapat pada persidangan Menurut Muhammad (2004:211) “Selain menggunakan teknik rekam untuk menjalankan metode simak, peneliti dapat menggunakan teknik catat atau *taking note method*”. Penerapan teknik catat dalam pengumpulan data tuturan dalam persidangan ini peneliti aplikasikan bersamaan dengan teknik simak. Hal ini dimungkinkan, karena penulis menyimak jalannya sidang sekaligus mencatat tuturan tersebut

dengan cara memperhatikan setiap ucapan yang terjadi saat persidangan berlangsung.

Secara rinci dan terstruktur, tahapan *pengumpulan data* dengan penerapan empat teknik yang telah dipaparkan di atas, dapat disimak berikut ini.

1. Melakukan observasi dengan cara datang ke Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dan ikut terlibat langsung dalam persidangan.
2. Melakukan penyimakan dan mencatat tuturan pada saat persidangan dengan teknik simak sebagai pelengkap apabila pada teknik rekaman kurang jelas. Teknik ini juga mereduksi korpus data sehingga menghasilkan data dalam wujud *transkripsi data*. Korpus data telah berubah wujud dari data lisan menjadi data tulis.
3. Mencatat apa peristiwa yang menjadi *konteks* (gambaran situasi atau informasik leksikal) atas data tertentu.

1.8 Pemeriksaan Keabsahan Data

Ibrahim (2015:120) “Keabsahan data adalah menguji kebenaran atau keabsahan data. Pertama, perpanjangan keikutsertaan peneliti terlibat langsung dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai instrumen penelitian, termasuk sebagai insrumen pengumpul data. Dengan demikian, semua data yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, ketekunan pengamatan peneliti dalam menentukan konteks data. Ketiga, triangulasi kecukupan teori yakni mengkaji teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang teliti, yaitu tentang jenis, strategi, dan konteks tutur.

Keempat, melakukan pengecekan sejawat, yakni melalui pengkajian ulang terhadap teori-teori yang relevan untuk pengesahan data-data penelitian. Kelima, kecakupan referensi, yakni melakukan wawancara dan diskusi mendalam dengan Pakar/ ahli pragmatik. Dalam hal ini adalah pembimbing peneliti sendiri. Diskusi mendalam tersebut telah melebihi dari yang diibutuhkan untuk pemeriksaan keabsahan data dimaksud. Keenam, kajian kasus negatif mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai sebagai pembandingan. Ketujuh pengecekan anggota yang itu kegiatan mengecek orang yang terlibat. Kedelapan uraian rinci yaitu peneliti bisa menggambarkan dengan cermat penelitiannya. Kesembilan Auditing yaitu proses pemeriksaan .

1.9 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk mengungkapkan proses pengorganisasian dan pengurutan data tuturan deklaratif bahasa persidangan dalam kategori dan satuan uraian, sehingga pada akhirnya, dapat ditarik kesimpulan tentang jenis tuturan, strategi bertutur, konteks tuturan dan pengembangan materi ajar pragmatik. Menurut Ibrahim (2015:16-17) kualitatif bersifat mengalir atau natural. Dalam hal ini, keterpaduan kerja dari beberapa metode yaitu analisis isi, struktural, dan interpretasi akan diusahakan sejauh mungkin menampilkannya secara terpadu. Dengan demikian diharapkan didapat sajian hasil penelitian yang mengkontribusikan metode-metode tersebut secara sistematis dijelaskan oleh Miles dan Huberman sebagai berikut:

Teknik Analisis Interaktif (Model 1)

Sumber: Miles & Huberman dalam Denzin & Licoiu, 1997

Sumber: (Ibrahim, 2015) (Bahan ajar)

Dari diagram di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Display data diartikan sebagai upaya menampilkan, memaparkan atau menyajikan data.
2. Sebaliknya, jika proses display data diyakini sudah mencapai dua tujuan diatas, maka sampailah penulis pada langkah analisis yang terakhir yakni penarikan kesimpulan.

Metode lanjutan yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode padan Mahsun (2005:114) menyatakan bahwa Metode pada ekstralingual adalah metode untuk menganalisis satuan bahasa dengan menggunakan alat bantu di luar bahasa.

1. Data yang masih berupa percakapan lisan yang ada pada pita rekaman, terlebih dahulu di traskripsikan kedalam bahasa tulis, tuturan hakim dan saksi ditandai dengan (H) hakim dan saksi dengan kode (S).
2. Setelah menjadi data dalam bentuk bahasa tulisan, kemudian penulis membaca berulang-ulang untuk memahami data tersebut.

3. Data yang telah diubah dari bahasa lisan ke bahasa tulis kemudian dianalisis klasifikasi/ kategori deklaratifnya seperti menyampaikan informasi faktual, menyatakan keputusan atau penilaian, menyatakan perjanjian, dan memberikan penjelasan.
4. Tuturan deklaratif yang telah teridentifikasi dan klasifikasi kategori deklaratifnya kemudian dianalisis maksim-maksim prinsip kerja samanya.
5. Semua data yang telah dianalisis kemudian diinterpretasikan dan disimpulkan.

BAB II PENGOLAHAN DATA

Pada bab ini penulis memaparkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang mengandung prinsip kerja sama tuturan bahasa persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru. Analisis data dan interpretasi data dimulai dengan mengidentifikasi setiap tuturan dan selanjutnya menentukan tuturan deklaratif dalam setiap maksim prinsip kerja sama.

2.1 Deskripsi Data

2.1.1 Data Tuturan Bahasa Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru pada Kasus Korupsi.

Tuturan dialog persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru ini penulis peroleh dari hasil rekaman dan simakan penulis di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru. Persidangan ini berlangsung pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 pada pukul 09.00 Wib. Jumlah tuturan yang diperoleh yaitu 509 tuturan. Para partisipan yang terlibat dalam pertuturan yang menjadi data dalam penelitian ini adalah:

1. HK : Hakim Ketua;
2. HA1 : Hakim Anggota 1;
3. HA2 : Hakim Anggota 2;
4. PU : Penuntut Umum;
5. SP : Saksi Pria;
6. SW : Saksi Wanita;
7. T : Terdakwa.

Berikut ini akan penulis paparkan data penelitian yang dimaksud.

Situasi [1] : Hakim membuka sidang pukul 09.00 Wib. Kemudian menanyakan kesehatan kedua terdakwa yang diperiksa sebagai saksi pada kasus tindak pidana korupsi. (Data ini berada dalam file 1 durasi 00:00 - 00:23)

HK : “Sehat para terdakwa?”
SP : “Sehat.” (1) (00:07)
SW : “Sehat.” (2) (00:07)
HK : “Sesuai berita acara hari ini mendengarkan kesaksian Saudara Saudara R. Silahkan duduk sebagai saksi ya sehat?”
SW : “Sehat.” (3) (0.16)
HK : “Terlebih dahulu, bersumpah ya!”

Situasi [2] : Hakim mempersilahkan kedua terdakwa yang diperiksa sebagai saksi untuk melakukan sumpah atas keterangan yang akan diberikan serta memberi intruksi untuk saksi pria yang terlebih dahulu diperiksa sementara saksi wanita dipersilahkan untuk duduk disebelah penasehat hukum. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 00:23-01:50)

HK : “Baik Saudara silahkan duduk disamping pengacara, kita mendengarkan Z sebagai saksi ya baik!”
SP : “Iya.” (4) (00:16)
HK : “Saudara sebelumnya sudah punya keterangan penyelidikan sebelum mengikuti berita acara?”
SP : “Sudah.” (5) (01:24)
HK : “Dalam Pemeriksaan Saudara ada ditekan atau diancam?”
SP : “Tidak Bu .” (6) (01:34)
HK : “Iya, berita acara tersebut Saudara tanda tangan?”
SP : “Iya Bu .” (7) (01:39)
HK : “Masih ingat inti sarinya?”
SP : “Maksudnya Bu ?”
HK : “Maksudnya intisari yang Saudara terangkan pada penyelidikan masih Saudara ingat?”
SP : “Masih Bu .” (8) (01:48)

Situasi [3] : Hakim memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk bertanya kepada saksi. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 01:50-02:41)

PU : “Berapa uang yang sudah ada di map sebelumnya?”
SP : “Waktu ditangkap Bu Rp 2000.000.” (9) (02:08)

Situasi [4] : Hakim meminta saksi untuk menggunakan *mikrofon* karena suara saksi kecil sehingga kurang jelas terdengar. (02:41-05:01)

- PU : “Gimana caranya?”
 SP : “Kalau ada murid pindah, saya terima Pak.” (10) (02:48)
 PU : “Yang Saya tanyakan itu, uangnya inisiatif siapa?”
 SP : “Uang maksudnya?”(Saksi merasa kebingungan saat menjawab pertanyaan)
 PU : “Kan mendapatkan uang ni, inisiatif siapa Saudara meminta uang tadi. inisiatif siapa Saudara ngambil uang tadi?
 SP : “Uang tadi ditangan saya, inisiatif kepala sekolah Pak.” (11) (03:17)
 PU : “Nah itu yang saya maksud pertanyaan saya, uang itu dikembalikan semua?”
 SP : “Diserahkan kepada kepala sekolah Pak sebagian yang ada Rp 500.000 ada juga Rp 1000.000.” (12) (03:40)
 PU : “Mana banyak kepala sekolah atau Saudara?”
 SP : “Tolong anak masuk membayar meja, kursi.” (13) (04:13)
 PU : “Saudara serahkan uangnya ke dia dimana di rumah atau di sekolah?”
 SP : “Di kantor.” (14) (04:30)
 PU : “Dimana kantornya?”
 SP : “Di Jalan Soebrantas.” (15) (04:46)
 PU : “Masih ingat jumlahnya?”
 SP : “Rp 7500.000.” (16) (4.49)
 PU : “Cukup.”

Situasi [5] :Penutup Umum mengakhiri pertanyaanya karena sudah merasa cukup dan sidang diambil alih oleh hakim ketua untuk meanjutkan pertanyaan. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 05:01-07:19)

- HK : “Saudara di sekolah itu sebagai apa?”
 SP : “Tata usaha.” (17) (05:07)
 HK : “Sudah jadi pegawai tetap?”
 SP : “Belum.” (18) (05:10)
 HK : “Tata usaha, apakah untuk anak yang pindah di sekolah itu penerimaanya melalui Saudara?”
 SP : “Iya Bu , selama ini Saya.” (19) (05:22)
 HK : “Baik, selama ini dari kan Saudara tadi mengatakan yang pindah sekolah lalu meminta uang Rp. 2300.000 tiap orang?”
 SP : “Gak Bu ada yang Rp 2300.000.” (20) (05:40)
 HK : “Yang diperintahkan kepada Saudara?”
 SP : “Tak tentu, ada yang Rp 1500.000.” (21) (05:48)
 HK : “Terus yang menentukan besaran itu siapa?”
 SP : “Saya dan kepala sekolah Bu .” (22) (05:56)
 HK : “Makanya jadi, ketika ada pindah Saudara langsung berkoordinasi dengan kepala sekolah?”
 SP : “Iya.” (23) (06:05)
 HK : “Bukan, menetapkan langsung sekian ya?”
 SP : “Bukan. (24) (06:07)
 HK : “Paling rendah berapa?”

- SP : “Rp 1500.000.” (25) (06:13)
HK : “Yang paling tinggi?”
SP : “ Rp 2300.000.” (26) (06:17)
HK : “Itu kegunaan uang itu yang anaknya pindah ke situ, kan Saudara mengatakan ada Rp 1500.000 ada Rp 2300.000?”
SP : “Untuk seragam, meja sama kursi Bu .” (27) (06:58)
HK : “Emangnya sekolah itu gak punya anggaran untuk kursi dan meja?”
SP : “Ada.” (28) (07:13)
HK : “Kenapa ditagih kepada siswa yang pindah?”

Situasi [6] : Saksi merasa sedih dan sangat menyesali perbuatannya karna menjalankan tugas yang salah karena permintaan Kepala Sekolah. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 07:19-10:25)

- SP : “Kurang tau Bu , saya cuma menjalankan apa kata kepala sekolah.” (29) (07:20)
HK : “Itu sekolah negeri kan?”
SP : “Iya.” (30) (07:22)
HK : “Baik, itu seragamnya berapa pasang?”
SP : “3 (tiga) stel Bu .” (31) (07:27)
HK : “Terus untuk seragam itu kan, apakah Saudara yang menerapkan baju seragam atau bagaimana?”
SP : “Tidak Bu , di tukang jahit.” (32) (07:41)
HK : “Yang membuka oflet atau apa namanya, ya membuka dimana?”
SP : “Gak jauh dari sekolah itu.” (33) (07:55)
HK : “Berapa jauh dari sekolah itu?”
SP : “Sekitar 2 kilo sampai 3 kilo.” (34) (08:01)
HK : “Karena yang kemaren terdaftar ada ofletnya untuk sekolah ini, berapa satu orang?”
SP : “Rp 760.000.” (35) (08:15)
HK : “Berarti sisa Rp 750.000. Kalau jadi uang tersebut bagaimana pembagian antara Saudara dan terdakwa?”
SP : “Kadang Rp 1500.000 saya ambil.” (36) (08:30)
HK : “Baik dari uang-uang itu ada berapa siswa yang pindah. SMP berapa?”
SP : “SMP A.” (37) (08:49)
HK : “Melalui Saudara ada berapa siswa yang pindah ke sekolah?”
SP : “Jumlah 17 orang.” (38) (09:06)
HK : “Dari 17 orang, dari 17 itu berapa jumlah keseluruhan uang yang Saudara minta jumlahnya?”
SP : “Kalau saya perkirakan Rp 23600.000.” (39) (09:14)
HK : “Dari uang Rp 23600.000, berapa yang di serahkan utuk tukang jahit?”
SP : “Rencana kepada sekolah saya serahkan dari uang koran.” (40) (09:28)
HK : “Siapa yang bayar, Saudara?”

- SP : “Iya Bu saya.” (41) (09:43)
HK : “Yang saya tanyakan kan ada 17 (tujuh belas) siswa yang uang dikumpul 10 (sepuluh) berapa jumlah uang yang anda serahkan ke tukang jahit?” (Mengulangi pertanyaanya)
SP : “Tidak ada Bu .” (42) (09:54)
HK : “Terus baju mereka sudah selesai dijahit?”
SP : “Yang saya suruh sudah dijahit Bu .” (43) (10:01)
HK : “Uangnya dari mana?”
SP : “Dari uang masuk pembayaran Bu, Rp 1500.000 sampai Rp 2300.000.” (44) (10:07)
HK : “Kan diserahkan ke tukang jahit, terus tukang jahit nagih uangnya dari mana?”
SP : “Dari sekolah.” (45) (10:17)
HK : “Sama siapa?”
SP : “Sama saya juga.” (46) (10:20)
HK : “Tapi belum ada anda setor ya?”
SP : “Belum.” (47) (10:24)

Situasi [7] : Hakim mempertanyakan dan menghitung uang yang diperoleh dari orang tua siswa pindahan secara detail. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 10:25-14:06)

- HK : “Baik, itu Rp 23600.000 dari uang itu berapa banyak Saudara serahkan ke terdakwa ini?”
SP : “Rp 7600.000 Bu .” (48) (10:34)
HK : “Baik, terus sisanya?”
SP : “Merehap kursi, meja.” (49) (10:40)
HK : “Merehap kursi ada berapa?”
SP : “Rp 10.000.000 lebih lah Bu .” (50) (10:44)
HK : “Terus apalagi, kan uang Rp 23600.000. Perbaiki kursi dan meja Rp10.000.000 lebih untuk terdakwa ini Rp 7000.000 baru Rp 17000.000.”
SP : “Membeli cat untuk lokal Rp 1000.000, rokok Rp 1000.000, bayar koran Rp 1000.000.” (51) (11:03)
HK : “Baru Rp 19.000.000?”
SP : “Tanah hitam.” (52) (11:20)
HK : “Untuk apa itu?” (Hakim kaget saat mendengar saksi mengatakan tanah hitam)
SP : “Untuk bunga.” (53) (11:23)
HK : “Oh, kompos Rp 500.000, Rp 19500.000 sisanya?”
SP : “Sisanya Rp 2000.000 saya ambil Bu .” (54) (11:35)
HK : “Baru Rp 21500.000, Rp 1500.000 lagi?”
SP : “Beli rokok kawan-kawan kerja.” (55) (11:44)
HK : “Yang ketangkep Rp 2000.000?”
SP : “Rp 2000.000.” (56) (11:50)

- HK : “Berarti yang Saudara abiskan dan ketangkep berarti Rp 4500.000 iya ya?”
- SP : “Iya Bu .” (57) (11:58)
- HK : “Saudara sudah lama jadi tata usaha di situ?”
- S : “Sudah Bu .” (58) (12:09)
- HK : “Ada gak peraturan yang membolehkan kalau anak-anak pindah diminta uang?”
- SP : “Saya tidak tahu Bu .” (59) (12:17)
- HK : “Terus nanti, kalau tukang jahit menagih uang apa yang anda katakan?”
- SP : “Itu pun ada yang belum bayar.” (60) (12:25)
- HK : “Berapa orang yang belum bayar?”
- SP : “8 (delapan) orang.” (61) (12:31)
- HK : “Yang sudah bayar sudah diserahkan ke tukang jahit?”
- SP : “Mau diserahkan Bu .” (62) (12:37)
- HK : “Kan sudah ketangkep kamu.”
- SP : “Uang itu gunanya untuk merehap meja dan kursi Bu jadi, uang itu ke pakai.” (63) (12:41)
- HK : “Ada gak anggaran sekolah dari pemerintah?”
- SP : “Ada Bu .” (64) (12:54)
- HK : “Kenapa gak ambil dari situ, kenapa gak ambil dari anggaran sekolah?”
- SP : “Saya cuma belum keluar Bu , makanya didahulukan.” (65) (13:00)
- HK : “Oh, belum keluar baik, apa yang melandasi pikiran Saudara mau melakukan itu?”
- SP : “Karena itu suruhan kepala sekolah Bu .” (66) (13:14)
- HK : “Mesti itu salah?”
- SP : “Ya, kalau salah saya gak mau Bu .” (67) (13:22)
- HK : “Salah, gak ada peraturanya kan, terus kenapa anda lakukan takut Saudara dipecat?”
- SP : “Iya Bu .” (68) (13:30)
- HK : “Gaji Saudara dari mana?”
- SP : “dari APBD Bu .” (69) (13:35)
- HK : “Yang mengeluarkan SK Saudara siapa?”
- SP : “Dinas Pendidikan.” (70) (13:40)
- HK : “Bu kan terdakwa ini kan?”
- SP : “Bukan Bu .” (71) (13:43)
- HK : “Karena sebagai guru honor itu semuanya yang gaji Dinas Pendidikan.” (72) (13:50)
- SP : “Tidak semua Bu , ada honor komite juga Bu .”
- HK : “Oh begitu, Saudara honor dari ini kan, dari dinas?”
- SP : “Iya.” (73) (13:57)
- HK : “Jadi atas perintah terdakwa inilah Saudara lakukan semuanya ya?”
- SP : “Iya Bu .” (74) (14:03)

Situasi [8] :Pertanyaan diambil alih oleh hakim anggota untuk dilanjutkan sehingga kasus ini dapat dipertimbangkan dengan baik. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 14:06-20:37)

- HA1 : “Tadi Saudara jelaskan sebutkan ada 17 siswa yang melalui anda dan anda terima uangnya.”
- SP : “Iya Pak, ada yang bayar separo.” (75) (14:33)
- HA1 : “Uang mereka itu di mana anda terima?”
- SP : “Di sekolah Pak.” (76) (14:39)
- HA1 : “Di sekolah posisinya di mana?”
- SP : “Di ruang TU.” (77) (14:44)
- HA1 : “Semuanya?”
- SP : “Iya.” (78) (14:48)
- HA1 : “Cuma saksi kemaren bilang dikantin.”
- SP : “Di kantin itu yang lama Pak.” (79) (14:56)
- HA1 : “Berapa orang Saudara menerima?”
- SP : “1 (satu) orang Pak.” (80) (15:04)
- HA1 : “Baik, kenapa di kantin?”
- SP : “Itu waktu Ibu r Pak.” (81) (15:12)
- HA1 : “Yang lainnya semuanya di kantor ya?”
- SP : “Iya.” (82) (15:16)
- HA1 : “Saudara tadi menjawab apa pun diperintah, dilaksanakan. Saudara juga bilang kalau salah tidak dilaksanakan Saudara tau kalau tindakan itu merugikan negara?”
- SP : “Saya tidak tau.” (83) (15:41)
- HA1 : “Tidak tau atau pura-pura tidak tau?”
- SP : “Tidak tau.” (84) (15:47)
- HA1 : “Kenapa bisa tidak tau?”
- SP : “Biasa Pak, cuma kalau permintaan kepala sekolah baru saya apa.” (85) (15:53)
- HA1 : “Pernah gak di tegur kepala sekolah itu gak boleh lo terdakwa minta uang. Gak boleh mengutip biaya ke orang tua siswa. Pernah gak disampaikan itu ke kepala sekolah?”
- SP : “Gak ada.” (86) (16:20)
- HA1 : “Kenapa gak ada?”
- SP : “Takutnya tersinggung.” (87) (16:26)
- HA1 : “Bukan anda tidak tau tetapi takut tersinggung kan?”
- SP : “Iya.” (88) (16:41)
- HA1 : “Semua tau, tetapi takut tersinggung atau pernah menetapkan yang resmi sekian yang tidak resmi tambahkan?”
- SP : “Tidak ada.” (89) (16:56)
- HA1 : “Baik kan sudah tau ternyata tidak boleh, perasaan saudara saat ini bagaimana?”
- SP : “Ya kalau saya menyesal Pak, lepas kejadian kemaren pas saya ketangkap tangan, menyelidik langsung cek semua ruang tata usaha BB diambil sesudah itu Ibu kepala sekolah telfon saya “Jadi siswa

- itu masuk Pak “Jadi “Bisa antar uangnya? “Gak bisa saya ada tamu” jadi anaknya yang jemput pembicaraans aya dan kepala sekolah direkam.” (90) (17:12)
- HA1 : “Ada bertemu dengan terdakwa ini?”
- SP : “Tidak Pak hanya menelfon saja.” (91) (18:22)
- HA1 : “Apa katanya?”
- SP : “Ibu kepala sekolah telfon saya “Jadi anak itu masuk Pak? “Jadi Bu “Berapa uangnya? “Rp 2000.000 “Bisa diantar ke rumah gak? “Gak bisa saya ada tamu.” Saya suruh anak saya jemput selepas itu direkam sama penyelidik, Ibu sekarang dilaporkan.” (92) (18:29)
- HA1 : “Sudah berapa tahun menjadi tata usaha di sekolah SMP itu?”
- SP : “Lebih 13 tahun.” (93) (19:54)
- HA1 : “Ibu R sudah berapa tahun menjadi kepala sekolah?”
- SP : “Lebih kurang 1 (satu) tahun.” (94) (20:07)
- HA1 : “Saksi tadi mengatakan bahwa ini sudah menjadi kebiasaan ya, ada yang pindah ada perintah baju seragam gitu ya?”
- Situasi [9] : Hakim ketua mengambil alih sidang dan mulai mengajukan pertanyaan kepada saksi. (Data ini berada dalam file 1 durasi 20:37-24:39)
- HA1 : “Sebelum kepala sekolah ini menjadi kepala sekolah di situ apakah anak dimintai uang seperti yang dilaporkan?”
- SP : “Iya Pak.” (95) (20:49)
- HK : “Yang sekarang aja Pak, karena ini sudah menjadi kebiasaan.”
- HA1 : “Perintah kepala sekolah yang lama seperti dijelaskan aPakah anda mendapatkan bagian? Saudara saksi menyatakan perintah itu melalui telfon bertemu atau memang dimusyawarahkan?”
- SP : “Bertemu.” (96) (21:47)
- HA1 : “Diperintah?”
- SP : “Diperintah.” (97) (21:57)
- HA1 : “Di sekolah, di luar atau perintahnya ikuti kebiasaan sebelumnya?”
- SP : “Diperintah dan iya itu.” (98) (22:08)
- HA1 : “Saudara saksi tadi menyatakan baju seragam sekolah 2 stel ya?”
- SP : “3 stel.” (99) (22:25)
- HA1 : “Namun di BAP 4 stel mana yang benar?”
- SP : “Ada 3 stel ada 4 stel.” (100) (22:31)
- HA1 : “Berarti uang Rp 2500.000 tersebut ada 3 stel. Baju seragam sekolah Bapak selaku TU berapa seragam anak sekolah?”
- SP : “Kalau biasanya harganya, biasa satu itu harganya” (pembicaraan langsung si potong hakim karena bukan itu yang hakim harapkan jawabanya) (101) (22:49)
- HA1 : “Bukan berapa macam bajunya seragam sekolah?”
- SP : “5 macam.” (102) (22:58)
- HA1 : “Sesuai pengetahuan saksi sudah lama ni jadi TU di sekolah tersebut, baju seragamnya tahun sebelumnya ada berapa sebelumnya ada berapa di sekolah ini?”

- SP : “5 juga.” (103) (23.44)
 HA1 : “Beberapa saksi sampaikan baju 5 stel anggaranya sekian tahun-tahun sebelumnya? Terdakwa ini penerimaan siswa pindahan saja?”
 HK : “Saudara ini khusus penerimaan siswa pindahan atau siswa baru juga?”
 SP : “Iya Bu .” (104) (24.01)
 HA1 : “Saudara tau gak, atau mendengar berapa sih biaya baju tahun sebelumnya untuk 5 (lima) stel?”
 SP : “Sebelum-sebelumnya Rp 1400.000.” (105) (24:01)
 HA1 : “Rp1400.000 untuk 5 (lima) stel, Saudara saksi dalam penerimaan Siswa, saat Ibu ini jadi kepala sekolah apakah sebagai anggota?”
 SP : “Ikut.” (106) (24:33)
 HK : “Oke ada yang mau ditanyakan terdakwa?”

Situasi [10] : Saat hakim memberi kesempatan kepada terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi terdakwa malah menanggapi dan hakim terlihat kesal. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 24:39- 28:21)

- HK : “Saudara ada yang mau ditanyakan?”
 T : “Yang pertama itu tidak benar.”
 HK : “Bu kan tanggapan tapi pertanyaan namun kalau tidak ada baru tanggapan.”
 T : “Gak ada”
 HK : “Bagaimana keterangan saksi ini ada yang tidak benar?”
 T : “Sebagian” (hakim menyuruh agar saksi diberi mix)
 HK : “Yang tidak benar yang mana?”
 T : “Yang pertama, perintah tentang keterangan saya tidak pernah, yang kedua kebiasaan karena tidak cocok lagi karena kondisi sekolah yang tidak layak banyak yang rusak, kedua kursi banyak yang rusak Saya gak ada perintah dia.”
 HK : “Kan tadi sudah dikatakan kesepakatan.” (Hakim terlihat kesal atas jawaban terdakwa)
 T : “Yang perintah apa saja, saya hanya minta uang tadi”
 HK : “Iya tadi dikatakanya kalau ada siswa in sesuai kemampuan makanya ada Rp 1500.000 dengan Rp 2300.000.”
 T : “Kesepakatan itu saya tidak pernah minta” (Terdakwa berusaha mengelak dari segala tuduhan)
 HK : “Iya kalau masalah kursi oke, baju dinas oke.”
 T : “Kalau penerimaan belum ada dia kasih tapi untuk pembayaran yang dipakai oleh Saudara yang kegunaan untuk oprasional sekolah.”
 HK : “Tunggu dulu, itu gak ada pokoknya diserahkan ke Saudara sekitar Rp 7000.000 lebih.”
 T : “Benar ada tapi untuk.”
 HK : “Baik, itu untuk keterangan Saudara nanti keterangan saudara disangkal, katanya yang menetapkan biaya katanya kesepakatan jadi

katanya gak inisitif sendri, yang diperintahkan baju dinas diganti dan kursi rusak hanya di peruntukan tapi tidak ditentukan kisaranya tapi yang menentukan Saudara. Itu kata terdakwa terus mau berubah keterangan?”

SP : “Tidak Bu .” (Saksi terlihat sedih sekali matanya berkaca-kaca karena banyak tuduhan dari keterangan terdakwa yang ditujukan kepadanya) (107) (27:47)

HK : “Tetap dengan keterangan tadi?”

SP : “Tetap.” (108) (27:59)

HK : “Baik terimakasih ya, keterangan Saudara kita ambil sebagai terdakwa, apakah anda tambahkan? Tentu tidak berbedakan anda sebagai saksi dan terdakwa?”

SP : “Tidak Bu .” (109) (28:12)

HK : “Kalau ada berarti satu Saudara berbohong gitu, ada tambahan lagi baik pemeriksaan terhadap terdakwa kita ini dianggap selesai.”

Situasi [11] :Sidang ditunda 1 minggu dan selesai dilanjutkan dengan L terdakwa yang dimintai keterangan sebagai saksi selanjutnya. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 28:21-29:34)

HK : “Lalu sekarang, Saudara jadi terdakwa untuk R untuk kuasa hukum bertanya kapasitas sebagai terdakwa. Saudara dengarkan baik-baik ya keterangan Ibu R ya!”

SW : “Iya.” (110) (29:32)

Situasi [12] :Hakim mempersilahkan penuntut umum untuk terlebih dahulu bertanya kepada saksi. (Data ini berada dalam file 1 durasi 29.32-30.00)

PU : “Itu berapa kali?”

SW : “Itu saya gak ingat.” (111) (29:51)

HK : “Tolong diinikan Pak mixnya, biar didengarkan.” (memotong pembicaraan penuntut umum agar menggunakan mix agar jelas terdengar)

PU : “Gak ingat berapa kali, tapi ada ya?”

HK : “Saksi untuk E nanti khusus untuk terdakwa itu ada.”

PU : “Oh iya”

SW : “Iya ada.” (112) (30.00)

PU : “Kalau untuk penjahit itu?”

Situasi [13] :Hakim ketua meminta pertanyaanya merujuk pada kesaksian terdakwa sebagai saksi dari E. dan kemudian sidang diambil alih kembali kepada hakim ketua. (Data ini berada di file 1 durasi 30.05-38.42)

HK : “Baik tadi kan sudah Saudara dengar keterangan E ketika saudara mendengar seperti yang Saudara katakan tadi kalau ada siswa

- pindahan karena kursi sudah jelek diganti tapi tidak ditetapkan begitu?”
- SW : “Iya.” (113) (30:45)
- HK : “Lalu ketika terdakwa menyerahkan uang berapa kali?”
- SW : “Sekali.” (114) (30:53)
- HK : “Seperti kata terdakwa ini tadi ia menyerahkan kepada Saudara saat jadi saksi sekitar Rp 7000.000 lebih.”
- SW : “Kemungkinan itu benar, karena saya tidak pernah menghitungnya.” (115) (30:06)
- HK : “Iya, dari yang Rp 7000.000 lebih itu kemana Saudara Pakai?”
- SW : “Uang tersebut Bu karena beliau ini anaknya ditangkap narkoba di Bengkalis. dia mau pergi sidang dan butuh uang.” (116) (31:17)
- HK : “Uang yang diserahkan ke Saudara lo Rp 7000.000.”
- SW : “Iya Pakai uang sekolah Rp 4000.000. Saya kasih langsung saya kembalikan lagi ke dia, belilah apa saja yang belum dibayar. Maka dibayarlah untuk koran dan oprasional lain, tanah hitam dan dia memakai uang dari dalam sekolah Rp 4000.000” (117) (31:33)
- HK : “Tadi ketika Saudara jadi saksi dia sudah menerangkan loh. Uang yang sama Saudara Rp 7000.000, kemudian untuk perbaiki sekolah Rp 10.000.000, untuk tanah Rp 500.000, cat Rp 100.000 itu dikoran katanya itu gak ada Saudara bantah.”
- SW : “Bu .”
- HK : “Inilah yang diterangkanya tadi, ketika Saudara tidak membantah penerimaan duit. Yang Saudara Saudara tidak menentukan besaran.”
- SW : “Uang yang Rp 7000.000 saya terima itu, saya anggap itu uang yang dipinjam dia. Saya kembalikan ke dia lagi pada saat itu juga, kan dia bayar ni. Bu ada uang jadi misalnya ada Rp 7000.000 saya anggap hutang yang diPakainya.” (118) (32:26)
- HK : “Saudara minta?”
- SW : “Tetapi misalnya, iya silahkan membayar hutang pinjamanya. Dia membayar hutang dia yang dipakainya jadi uang oprasional dia.” (119) (22:43)
- HK : “Jadi menurut Saudara terdakwa yang menggunakan uang itu semua?”
- SW : “Iya” (120) (33:00)
- HK : “Baik terus Saudara, berapa lama jadi kepala sekolah?”
- SW : “Di sana 1 (satu) tahun Bu .” (121) (33:09)
- HK : “Sebelumnya dimana?”
- SW : “Di SMP Z Bu .” (122) (33:15)
- HK : “Jadi kepala sekolah juga?”
- SW : “Iya.” (123) (33:16)
- HK : “Sudah berapa kali jadi kepala sekolah sebelumnya?”
- SW : “3 (tiga) kali.” (124) (33:17)
- HK : “Dari 3 (tiga) kali jadi kepala sekolah itu, masa berlaku jadi kepala sekolah sudah berapa tahun?”
- SW : “10 (sepuluh) tahun.” (125) (33:26)

- HK : “Saudara sekolah negeri ya?”
SW : “Iya.” (126) (33:37)
HK : “Ada gak peraturan yang memperbolehkan kalau siswa pindah itu dikenai biaya?”
SW : “Tidak ada.” (127) (33:38)
HK : “Kenapa Saudara berani mengadakan pungutan?”
SW : “Sekolah kami yang lama tidak ada pungutan.” (128) (33:44)
HK : “Setelah di sekolah ini, Saudara kan tau tidak boleh ada pungutan. Terus kenapa berani mengadakan pungutan?”
SW : “Saya tidak mungut cuma saya bilang.” (129) (33:53)
HK : “Bu kan.”
SW : “Gak ada Bu, kami bahwa terdakwa ini hanya menyampaikan kepada orang tua agar menyiapkan pakaian seragamnya yang tidak cocok. Karena sekolah kita itu Bu banyak rusak tidak layak dipakai lagi, jika ingin sekolah disini carilah kursi meja sementara sudah tanggal-tanggal semua.” (130) (33:57)
HK : “Itu namanya apa?” (terlihat kesal)
SW : “Tapi saya gak ada uang.” (131) (34:30)
HK : “Itu namanya apa?”
SW : “Orang luar menyangka cuma gak.” (132) (34:36)
HK : “Ada gak di sekolah anggaran meja dan kursi?”
SW : “Ibu, ada tetapi tidak pada masa itu dan untuk itu fokusnya tidak ada.” (133) (34:42)
HK : “Iya ada, tapi sama kayak keterangan Saudara tadi bisa dicairkan baik, kalau emang tidak ada kursi dan meja kenapa diterima?”
SW : “Nah saya itu Bu kalau ada yang mau bayar silahkan.” (134) (35:04)
HK : “Nah ini kan sama dengan meminta, sementara peraturan gak ada. Kenapa gak bawa meja dan kursi dibawa dari rumah saja Saudara perintahkan terus. Tetapi itu terserah Saudara ya sebagai saksi dengan terdakwa nanti kita kaitakan lagi dengan tukang jahitnya. Jadi, Saudara cuma bilang gitu ya suruh mereka buat baju dinas baru yang tidak sesuai dan tidak ada, kursi meja tidak ada terus surat permohonan?”
SW : “Iya Bu .” (135) (35:47)
HK : “Iya kan tu Saudara ngerti, kan Saudara itu kan yang ini mengerjakan?”
SW : “Iya.” (136) (35:48)
HK : “Rekomendasi itu kewenangan Saudara, itu yang Saudara perintahkan ketika ada uang Saudara minta beberapa kali, untuk apa Saudara meminta?”
SW : “Uang oprasioanal gak ada lagi kan Bu jadi, uang yang dipakai oleh terdakwa Rp.4000.000 yang saya tau yang lain gak tau lah Bu. Soalnya yang saya tau Rp 4000.000 itu yang pasti yang lain ada apa ndak.” (137) (36:14)
HK : “Iya kan Rp 7000.000 dikasih sama Saudara”

- SW : “Nah Rp 7000.000 itu saya gak tau karena saya ngasih-ngasih.” (138) (36:43)
- HK : “Iya terus?”
- SW : “Gak ingat saya jumlahnya sampai Rp 7000.000.” (139) (36:48)
- HK : “Terus, pernah gak Saudara terima?”
- SW : “Pernah.” (140) (36:49)
- HK : “Diperkenankan gak, kan kewajiban sekolah?”
- SW : “Tidak diperkenankan.” (141) (37:05)
- HA1 : “Baik Saudara saksi, menurut keterangan terdakwa ada 17 (tujuhbelas) orang siswa pindahan. Apakah Saudara selama Saudara jadi kepala sekolah situ setiap orang itu dilaporkan terhadap anda?”
- SW : “Yang dilaporkan kepada saya Pak 10 (sepuluh) dan saya terkejut ko 17 (tujuh belas) karena yang lain.” (142) (37:44)
- HA1 : “Baik hanya 10 (sepuluh).”
- SW : “Setau saya.” (143) (37:34)
- HA1 : “Sekaligus atau setiap minggu 2 (dua) orang dilaporkan?”
- SW : “Pada saat siswa masuk kalau masih bisa silahkan, kalau tidak lebih dari 32 (tiga puluh dua) silahkan masuk.” (144) (38:04)
- HA1 : “Baik, nah kemudian ada dikutip uang apakah dilaporkan si A sekian rupiah?”
- SW : “Tidak ada karena itu urusannya suruh dia cari pakaian sendiri.” (145) (38:32)
- Situasi [14] : Sidang diambil alih oleh Hakim anggota (1) dan memperjelas kembali maksud pertanyaannya. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 38:42-50:41)
- HA1 : “Gak gini masalahnya adalah disampaikan gak uang itu masing-masing ke Saudara?”
- SW : “Sebagian ada sebagian lagi tidak tau.” (146) (38:47)
- HA1 : “Itu saudara catat?”
- SW : “Tidak.” (147) (38:53)
- HA1 : “Saudara sangat percaya dengan dia, ini uang?”
- SW : “Karena saya tidak ada minta uang hanya orang tua itu menyanggupi.” (148) (39:01)
- HA1 : “Apakah anda sebagai kepala sekolah bolehkah mengutip uang tanpa Saudara tau?”
- SW : “Selama ini tidak Pak, saya tidak minta uang Pak.” (149) (39:17)
- HA1 : “Ha (hakim terkejut) dia yang minta? Karena untuk pakaian, kursi, meja ya kan itu kan minta ke orang tua”
- SW : “Iya Pak terdakwa ini yang minta langsung kepada saya.” (150) (39:39)
- HA1 : “Iya, baik begini dengarkan dulu pertanyaannya baik-baik. Krangka pertanyaannya itu kan sekolah Saudara, otoritas semua Saudara yang bertanggungjawab, tanggungjawab. Saudara itu terbagi ke staf yang lain. Ini soal uang, tahun lalu saya pindahkan anak saya ke sini

- persis seperti ini saya. Saya sebagai orang tua marah saya tau tidak boleh tapi supaya anak saya sekolah, saya tunggu setelah dia tamat kursi meja di bawa pulang setelah tamat memang tidak, satu saya sedih meja kemarin kemana kepala sekolah terus sebulan penuh saya datangi meja barukah atau tidak. Ternyata tidak baru, ini nyata saya alami SMA B baru kursi meja Saudara tidak tau, ini menjengkelkan orang tua. Berapa uang yang dikutip dia. Tau kalau Saudara mestinya tau pertanyaanya adalah berapa uang yang dikutipnya Saudara tidak tau.”
- SW : “Kalau saya.” (151) (41:21)
HA1 : “Saudara bertanggung jawab gak?”
SW : “Kalau saya bertanggung jawab Pak memang harus.” (152) (41:26)
HA1 : “Itu, jangan ngelak-ngelak baik. Si terdakwa ini sewaktu jadi saksi sudah menerangkan ada Rp 10.000.000 meja dan kursi benar?”
SW : “Dia menggunakan Pak.” (153) (41:26)
HA1 : “Benar direhap?”
SW : “Iya.” (154) (41:49)
HA1 : “Dari mana Saudara tau uang dari mana, ada tata usaha memperbaiki kursi gak Saudara tanya uang dari mana. Ada staf memperbaiki kursi Saudara tanya kah?”
SW : “Pak itu uang dana sekolah Rp 1000.000 itu.” (155) (42:16)
HA1 : “Dari mana?”
SW : “Dana sekolah.” (156) (42:18)
HA1 : “Tadi dia bilang uang yang dari yang dikutip dari orang tua yang pindahan itu sedangkan gak ada anda bantah tadi.”
SW : “Sekarang orang tua, minta tolong Pak saya gak ada menyuruh dia dan dia kerjakan dia itu mungkin atas berurusan dari orang tua langsung yang berhubungan dengan dia.” (157) (42:31)
HA1 : “Dana sekolah apa?”
SW : “Dana oprasional sekolah.” (158) (42:51)
HA1 : “Sumber dari mana?”
SW : “Dari Gubernur.” (159) (42:53)
HA1 : “Ke pihak sekolah?”
SW : “Iya.” (160) (42:56)
HA1 : “Tadi sudah jelas, dia terangkan Rp 10.000.000 untuk rehap kursi meja dia terangkan.”
SW : “Iya Pak, kenyataan saya disana lebih dari 50 (lima puluh) yang tidak layak Pakai lagi.” (161) (43:11)
HA1 : “Bukan itu persoalannya sekarang, ada uang ada kursi meja diperbaik terdakwa itu. Uang dari mana, ada uang Rp 1000.000 bayar koran uang dari mana?”
SW : “Uang yang langsung dia berurusan dengan orang tua.” (162) (43:31)
HA1 : “Dengarkan saya baik-baik, lain yang ditanya lain yang dijawab.Tadi Rp 10.000.000 rehap meja kursi, Rp 500.000 tanah hitam lalu dia Pakai Rp 2000.000. Diambil dari 17 orang, Saudara tau?”

- SW : “Saya tau, uang yang dikasihnya saya kasihkan ke dia lagi Pak.” (163) (44:37)
- HA1 : “Uang itu dibelikan tanah hitam Saudara tau?”
- SW : “Tau.” (164) (44:39)
- HA1 : “Adakah Saudara tanya uang dari mana?”
- SW : “Saya tau Pak.” (165) (44:43)
- HA1 : “Jawab saja uang dari mana itu saja. Jangan lain-lain”
- SW : “Tau Pak.” (166) (44:51)
- HA1 : “Uang dari mana katanya?”
- SW : “Uang dari mengerjakan kursi meja.”(167) (44:54)
- HA1 : “Sumber uangnya kan gak mungkin uang yan diambil dari perbaikan”
- SW : “Karena orang tua siswa minta jadi dia.” (168) (44:15)
- HK : “Bukan ditanya, uang yang dipakai terdakwa memperbaiki meja kursi tau dari mana sumbernya?”
- SW : “Tidak.” (169) (45:39)
- HA1 : “Gak ditanya? rumah Saudara dibenahi tapi gak tau dari mana”
- SW : “Karena dia ambil Rp 4000.000 itu Pak.” (170) (44:52)
- HA1 : “Aneh, jadi pikiran Saudara jangan takut ditanya. Bayangin itu gara-gara Rp 2000.000 dia ditangkep karena jika masuk penjara nanti sulit bagi kami. Makanya saya tanya bilangkan karena kebijakan Ibu yang gak mau tau tadi. diperbaiki kursi meja gak mau tau katanya melaksanakan apa saja yang diperintahkan. Baik saya teruskan sekali lagi dipergunakan. Apakah itu semua pembagian uang tadi dilaporkan ke Saudara Rp 1000.000 untuk ini, Rp 10.000.000 untuk kursi dan Rp 1000.000 untuk koran pernah gak dibilang seperti itu?”
- SW : “Tidak.” (171) (47:18)
- HA1 : “Saudara menikmati baca koran, menikmati taman yang indah.”
- SW : “Uang itu Pak dia bayar tapi dia sudah dipakai dulu.” (172) (47:29)
- HA1 : “Uang yang diPakai?”
- SW : “Iya.” (173) (47:40)
- HK : “Dari?”
- SW : “Bendahara.” (174) (47:44)
- HA1 : “Diambil duluan dari?”
- SW : “Anggran.” (175) (47:46)
- HA1 : “Anggran tahun berapa?”
- SW : “Kerjanya baru tahun 2017.” (176) (48:47)
- HA1 : “Ibu pegawai disitu tahun?”
- SW : “28 September 2017.” (177) (48:12)
- HA1 : “Uangnya di Pakai?”
- SW : “2018 kejadian Juni.” (178) (48:37)
- HA1 : “Jadi ada uang yang diambil dia untuk perbaikan kursi?”
- SW : “Dia pribadi menggunakan.” (179) (48:47)
- HA1 : “Bisa dia.”
- SW : “Karena dia berjanji untuk mengerjakan, untuk perbaikan itupun tidak cukup karena pada saat itu banyak sekali kursi yang tidak bisa diPakai karena.” (180) (47:00)

- HA1 : “Benar karena tidak bisa sekaligus misalnya 10 (sepuluh) 5 (lima) diperbaiki.”
- SW : “Itu pun tidak cukup banyak sekali kursi yang tidak layak. Itulah yang terjadi di sekolah kami Pak.” (181) (49:25)
- HA1 : “Negara ini gak bisa sekaligus kalau uangnya aja kasian dia cari mati itu yang salah. Walaupun kursi rusak 100 (Seratus) anggaran ada 10 (sepuluh) ya 10 (sepuluh) saja diperbaiki. Baik kita teruskan ya, kemudian ada dari uang yang dikutip untuk bayar uang jahit? Rusak atau tidak bisa tadi sudah ditanya.”
- SW : “Dia lapor bahwa penjahit tidak bisa menjahit lagi, saya kasih nomor handphone bukan orang itu langsung dibayar disitu. Ini nomor *handphone* bicarakanlah saya tidak ada ikut campur tangan sedikitpun.” (182) (50:08)

Situasi [15] Hakim Ketua mengambil alih untuk bertanya pada saat persidangan. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 50:41-53:55)

- HK : “Bentar tadi kan terdakwa ini mengatakan 17 siswa pindahan Saudara yang tau 10 (sepuluh) apakah bisa siswa pindah tanpa ada surat rekomendasi pindah?”
- SW : “Tidak.” (183) (50:56)
- HK : “Tidak, yang tanda tangan rekomendasi siapa?”
- SW : “Saya, ada sebagian yang tidak saya tanda tangan.” (184) (51:01)
- HK : “Bisa gak siswa pindah sekolah tanpa dia rekomendasi dari Saudara?”
- SW : “Tidak.” (185) (51:14)
- HK : “Terus kenapa Saudara minta yang 7 (tujuh) kalau tidak ada rekomendasi?”
- SW : “Taunya anak sudah ada di awal Bu .” (186) (51:29)
- HK : “Loh makanya saya tanya Saudara jawab, bisa gak masuk tanpa rekomendasi kenapa Saudara terima terima yang 7 (tujuh)?”
- SW : “Saya tidak terima Bu, begitu datang kursi baru ada anak tapi belum rekomendasi ke saya.” (187) (51:46)
- HK : “Saudara tidak tau jumlah siswa?”
- SW : “Tau Bu .” (188) (51:55)
- HK : “Jadi kenapa anak duduk disitu tetapi tidak terdaftar?”
- SW : “Karena dia tata usaha Bu .” (189) (52:03)
- HK : “Iya, tata usaha naungan siapa?”
- SW : “Saya” (190) (52:00)
- HK : “Kan Saudara yang mengontrol tugasnya, kalau dimasukannya siswa sampai 100 (seratus) bagaimana, yang akan terdaftar. Ada kan daftar siswa? (terlihat sedikit emosi mendengar keterangan saksi yang tidak logis)
- SW : “Ya Bu .” (191) (52:17)

HK : “Yaudah, bagaimana mungkin dia guru honor macam-macam tanpa Saudara. Logikanya disitu, gak usah ngeles kemana-mana ini sudah terjadi. Logika hukum disitu, gak mungkin sekolah asal mengeluarkan tanpa rekomendasi itu peraturan dunia pendidikan. Karena kami sering pindahkan anak kami kalau tidak ada tidak bisa.”

SW : “Ternyata tidak ada Bu .” (192) (53:05)

HK : “Itu kan aneh bagi kami kok bisa pencuri masuk ke sekolah tanpa tau Saudara, aPakah semua itu terdaftar? Kan ada ini ya ketika mau mendaftar UN kok Saudara kasih jawaban konyol.”

SW : “Seperti itu sudah terjadi Bu saya kan 17 (tujuh belas) panggil semua ketahuan disitu setau saya dia lapor sama saya ada 10 tau-tau 17 (tujuh belas).” (193) (53:33)

HK : “Kalau dilaporkan uangnya dikasih ke Ibu langsung masuk tapi bisa 17 (tujuh belas) anda tau rekomendasi 10 itu aneh tapi terserah Saudara itu pemeriksaan Saudara sebagai saksi ya.”

Situasi [16] : Hakim menanyakan kepada terdakwa mengenai keterangan saksi yang telah diberikan.

HK : “Terdakwa katanya intinya diterima hanya 10 (sepuluh) dan 7 (tujuh) lagi gak tau. Uang yang diserahkan Rp. 7000.000 diserahkan ke anda lagi Rp 4000.000 dan yang memperbaiki kursi tidak tau katanya sudah Saudara ambil bagaimana?”

T : “Kalau Rp 4000.000 itu saya pinjam di sekolah bendahara”

HK : “Itu sudah Saudara bayar?”

T : “Itu menggunakan tugas”

HK : “Untuk apa?”

T : “Untuk bikin laporan”

HK : “Kok sampai Rp 4000.000”

T : “Laporan tahunan.”

HK : “Baik terus uang Rp 7000.000 dikembalikan RP 4000.000 ke Saudara untuk perbaiki kursi segala macam?”

T : “Begini Bu ”

HK : “Tapi benar anda berikan Rp 7000.000?”

T : “Benar Bu .”

HK : “Surat rekomendasi 10 (sepuluh) sementara masuk 17 (tujuh belas) benar?”

T : “Semua di tanda tangani Bu .”

HK : “Baik begitu keterangannya, Saudara tetap dengan keterangan tadi?”

T : “Masih.”

HK : “Nanti kami pertimbangkan.”

Situasi [17] : Hakim melanjutkan dengan meminta keterangan terdakwa kedua.

- HK : “Disamping tadi mengenai penerimaan siswa baru siapa yang menetapkan biaya pungutan untuk beli baju dinas?”
- T : “Saya menetapkan Bu , hanya Rp 1000.000 tidak lebih.”
- HK : “Yang memerintah ke tukang jahit siapa?”
- T : “Karena tahun ini berlaku donasi.”
- HK : “Ke tukang jahit tidak ada donasi, terus baju sekolah atau dinas untuk siswa yang merintah rekomendasi ke tukang jahit?”
- T : “Rekomendasi saya Bu .”
- HK : “Yang memrintah kepada penjahit N kemarin itu biaya Rp 460.000 memerintahkan siapa?”
- T : “Itu belum pernah terjadi.”
- HK : “Saudara mengelak?”
- T : “Dia datang ke saya Bu , saya tahu ini bisa gak jahit ke saya, jadi boleh.”
- HK : “Terdakwa sudah tau Saudara.”
- T : “Iya memang.”
- HK : “Seharusnya gak perlu bohong dong. Lah terus Saudara minta uang lagi logikanya dimana. Kemaren keterangan Saudara gak bantah lo, dia minta Rp 1500.000 tapi untuk dia Rp 690.000 sisanya untuk Saudara.”
- T : “Rp 1400.000 Bu .”
- HK : “Rp 1400.000 atau Rp 1500.000?”
- T : “Rp 1400.000 Bu .” (mengulang jawaban yang pertama)
- HK : “Data-data bahkan penuntut umum ada Rp 1000.000 malah lebih banyak Saudara?”
- T : “Saya gak tau Bu .”
- HK : “Loh aneh gak Saudara bantah kok.”
- T : “Saya gak bantah.”
- HK : “Baik, Saudara terima emang?”
- T : “Iya.”
- HK : “Berapa keseluruhan yang Saudara terima uangnya dari dia?”
- T : “Itu pun pas penyelidik datang baru saya tau. Uangnya gak ingat saya Bu ,”
- HK : “Karena terlalu banyak, bagi saya aneh kalau saya terima uang saya gak ingat berapa pasti ada bukunya.”
- T : “Gak ingat saya Bu , gak ada saya bukukan Bu .”
- HK : “Kalau dIbu kukan sekian-sekian kadang Rp 1000.000 kadan Rp 2000.000 karena aneh kalau dia ada berapa kemaren itu sekian-sekian kan aneh bagi kami sekarang Saudara minta kalau gak ada kesePakatan sebelumnya masak dia mau ngasih jawab jujur.”
- T : “Keadaan disekolah saya kan gak ada uang Bu, dia pas diganti.”
- HK : “Gak usah itu, uang-uang dijemput anak dan suami Saudara di mana Saudara gunakan?”
- T : “Sebagian untuk oprasional sekolah dan ada hutang pribadi.”
- HK : “Hutang pribadi ke siapa?”

- T : “Ke kawan.”
- HK : “Oh, hutang Saudara? oke.”
- T : “Saya dan Bu Dina.”
- HK : “Iyalah hanya, tadi selalu Saudara bilang Z memperbaiki sesuatu uang dari sekolah. Sekarang uang oprasional gak ada, mana benar?”
- T : “Karena Bu waktu itu pembayaran April, Mei, Juni karena ada sama Pak Z ini begitu Agustus, September belum ada Bu jadi bagaimana kami.”
- HK : “Uang baju diterima bulan berapa?”
- T : “Juli kita harus ada oprasional itu semua.”
- HK : “Kemana oprasional sekolah? Karena kan anggaran 1 tahun.”
- T : “Belum ada Bu .”
- HK : “Jadi dikemanakan Saudara Pakai dan aneh bagi saya Saudara sebagai kepala sekolah punya hutang dimana-mana dan mengharap membayar dari orang lain. Saudara punya gaji, tunjangan, punya ini. Kok punya hutang pribadi di bayar dari itu, kenapa?”
- T : “Karena uang pribadi Bu oprasional sekolah.”
- HK : “Saudara masih baru lo disitu.”
- T : “Iya.”
- HK : “Bagi kami seolah-olah Saudara. Saya anak guru, saya hormat banget sama guru tapi kalau seperti Saudara saya gak hormat. Seolah-olah Saudara memBu ang topi pribadi Saudara untuk sekolah itu. Mana katanya pahlawan tanpa tanda jasa tapi nyatanya megutip dari orang lain, saya salut dengan guru karena saya anak guru tapi dengan seperti itu dan saya merasakan SD seampai kuliah merasakan gak ada guru menyampaikan begitu. Menjadi aneh bagi kami uang dunia pendidikan 50% di Indonesia malah terjadi demikian. Mau saya contohkan karena banyaknya uang dunia pendidikan, anak saya ketika di Siantar itu di sekolah favorit tapi karena banyaknya biaya pendidikan, malah dapat dana bos saya sendiri aneh. Malah saya sumbangkan ke sekolah, untuk swasta yang kaya dikasih menjadi aneh kalau di negeri gak ada biaya. Jadi, Saudara gak perlu berkelip kami juga punya anak di dunia pendidikan, anak saya di sekolah Siantar itu tanya, itu sekolah apa sekolah cina dapat dana bos kok negeri gak dapat apa-apa katanya oprasional kataya sekolah gak ada kan bisa kita cairkan sekali sebulan tapi ini sudah 1 tahun anggranya renungkanlah Saudara ya.”

Situasi [18] : Sidang diambil oleh hakim anggota 2 (dua) untuk meminta keterangan terdakwa. (Data ini berada dalam file 2 durasi 05:35-25.24)

- HA2 : “Ibu ya paling terakhir ini, sudah banyak saksi sekolah tapi Ibu masih lari kemana-mana dimana aturanya coba anak Ibu , suami Ibu menjemput uang ke dia. Jangan jawab dulu lah dari tadi bosan saya dengan jawaban Ibu ya, kok guru begitu. Sekolah itu diadakan oleh negara sudah jelas ada dananya. Kita yang merusak manusia ini

yang merusak. Ada perbaikan di kemana-kemana akhirnya hancurlah. Begitu yang gak rusak sengaja dirusak takkan kemana-mana. Aturanya Ibu terus terang saja apa penyebabnya? kenapa itu bisa terjadi? Jangan dilarikan kemana-manalah. Manusia mau dikaitkan rata-rata memang begitu hukum belum dijalankan. Pencegahan pun tidak berjalan. Kalau semua kepala sekolah masuk penjara, guru-guru masuk penjara, tata usaha masuk penjara siapa lagi coba abis dipenjara. Seolah seakan-akan kok saya saja yang lain begitu juga semua. Sudah jelas kemarin gak ada aturan seperti itu gak boleh mungut, gak boleh mengarahkan sudah ada kaki tandanya jemput ke tukang jahit N upahnya Rp 750.000 eh Rp 150.000 per apa Rp 750.000 eh Rp 650.000 5 (lima) stel. Kenapa alasannya apa kami akan pertimbangkan dengan baik tetapi kalau berkilah seperti orang sok suci ya kami yang hidup meyakini semua kok apa yang disampaikan. Perkara ini seharusnya cepat jadi lama banyak yang lari kesanalah. Gak ada masalah sekolah menerima murid ada seragam dijahit sama murid orang ikut ambil bagian supaya menghindari ketidakcocokan seragam, tidak bagus, oke. Tetapi kalau ambil bagian dari kesempatan itu jelas Rp 650.000 banyak kecuali jelas-jelas boleh tak mungut tau Saudara kan tidak boleh mungut apapun ke wali murid. Saudara kan ada tugas pokoknya sekarang sudah dipersidangan biaya gak ada karena keterbatasan kita kumpulkan wali murid ikutkan les tanpa bayar kan masuk diakal. Ini Pakaian dikoodinir dari sekolahnya penjahit menerima Rp 650.000 nyatanya dibebankan Rp 1400.000 kan seputar itu saja. Sisanya anak Ibu dan suami Ibu yang jemput uangnya digunakan untuk apa-apa. Okelah jangan munafiklah ya sebagian ada digunakan. Orang bukan malaikat didunia ini gak ada yang sempurna di dunia ini apalagi masalah uang ya semua berdosa ya semua bersalah tapi ini menjengkelkan sekali, gak enak Bu . Yang diperiksa Ibu kami gak memaksa, Ibu sudah bersumpah juga ya. Nyatanya ada saksi mungkin lepas tangan semua tidak tau menau masalah itu tidak boleh dilibatkan itu masalah kepala sekolah itu kata para saksi saya bertanya kalau itu betul. Kami juga yang menentukan kami punya nurani, nurani kamu yang kami jalankan ya. Bukan berbelit-belit itu salah seharusnya dari awal Ibu jawab kalau jujur. Gak perlu kami tanyakan ini. Seperti apa sebenarnya jangan seperti orang sok suci masak kepala sekolah punya hutang ya sampai puluhan juta ya. Gak masuk diakal bikin orang emosi. Ibu merasa bersalah gak?

SW : “Iya yang mulia.” (194) (14.03)

HA2 : “Aturan apa yang Ibu langgar? Kami gak tau aturan apa disekolah itu aturan apalah.”

SW : “Maaf yang mulia saya merasa selama ini.” (195) (14.23)

HA2 : “Kan saya dah bilang bohongilah kami di dunia ini, camkan dengan baik juga jangan bikin orang jengkel. Gak ada yang masuk diakal

omongan Ibu ya dihubungkan dengan saksi-saksi yang jelas, makitam orang kepercayaan Ibu tangan kanan Ibu tanpa tata usaha gak jalan sekolah. Masuk diakal dia saya ini honorer di bawah perintah pimpinan apa yang dikatakan kepala sekolah itulah yang saya laksanakan. Masuk diakal ya tapi dia bermain dibelakang itu persoalan lain lagi. Tanggung jawab Ibu tetap Ibu yang terima memang rekomendasi Ibu 10 (sepuluh) yang diterima 17 (tujuh belas) itu secara gak akan diterima tanpa dikoordinir. Sebenarnya Ibu berada di akhir cerita, kejujuran Ibu di sanalah letaknya ya berat hukumnya kebohongan yang nampak itu. Kami gak maksa tapi dari tadi kan capek gondok dengan kesaksian anda seharusnya Ibu tata dengan baik ceritanya sebenarnya begini Pak, Bu memang tidak sesuai dengan aturan tapi apa mau di kata kondisi lapangan seperti ini masuk diakal juga. Kita ajukan anggaran untuk ini tidak mendapat juga tapi ini kan persoalan lain baju seragam anak-anak sekolah. Saya ingin tanya 1 (satu) betul gak diterima oleh dia hanya Rp 650.000?

- SW : “Kalau hitungan itu Pak kan.” (196) (17.41)
- HA2 : “Kan dengan Ibu , menetapkan uang itu N menerima juga Rp 160.000 kan begitu dengan siapa dia? dengan mak itam, atau dengan panitia menerima. Yang dicari alasan Ibu berbuat seperti itu saya ingin tanya, apa alasan Ibu Rp 690.000 tukang jahit haram tukang jahit ngambil itu kembalikan ke sekolah andaikan sekolah kembalikan ke orang tua siswa selesai kan iya ndak?. Kan bisa jadi ada yang bisa pakaian kalau musyawarah semua sebenarnya yang penting itu musyawarah mufakatat kalau orang gak komplek tidak akan jadi tersangka Ibu disitu karena apa ada yang lapor, ada yang ribut, ada yang tidak senang ya dengan cara-cara yang tidak bagus itu. Tapi Ibu dengan baik sampaikan *clear* ya semua sepakat aman walaupun itu salah aturanya cuma sekian tapi disepakati, jelaskan kenapa karena ada ini, ini selesai tidak ada yang nuntut gak ada komplek semua selesai catat, tulis di tanda tangan pasti karena aturan tertulis bisa ketinggalan zaman dengan pertemuan agama ya tertulis umpamanya Rp 300.000 setelah bergeser waktu pembuatanya bahan-bahan naik semua otomatis ini kan akan bergeser. Apa alasan Ibu berbuat seperti itu? Itu saja pertanyaan saya biar kami bisa liat sikap juga terhadap Ibu .
- T : “Saya meneruskan kebiasaan sekolah dan untuk seragam guru-guru.”
- HK : “Untuk seragam sekolah biar cantik,ada tanaman memperdayakan semua kan gitu. Suruh anak didik bawa bunga satu sekolah kita gersang, gak jadi perkara. Kalau ada kipas angin bawa dengan cara itu saja kalau gak pasang sendiri siapa yang nuntut Pakai cara baik, yang kenapa dengan semangat tinggi guru-guru compang-camping dibilang juga kan tidak jadi perkara. Seragam apa hubunganya dengan anak didik rasanya gak nyambung juga. Kan tidak ikut jadi perkara itu alasan Ibu untuk memperbaiki. Kalau itu tidak

disediakan SOP. Karena gak ikhlaslah jadi perkara ini. Jadi itu alasan Ibu untuk memperbaiki kondisi sekolah yang ada?”

- T : “Iya.”
 HK : “Gitu aja kita ambil kebijakan atau apa baik tapi saya butuh kejujuran ya.”

Situasi [19] : Sidang diambil alih oleh penuntut umum untuk melanjutkan pertanyaan.

- PU : “Saudara di sekolah mana dulu?”
 T : “SMP C.”
 PU : “SMP C sebelumnya yang jahit baju sendiri?”
 T : “Sebelum sekolah.”
 PU : “Ndak saya tanya sekolah SMP C dengan itu juga orangnya?”
 T : “Iya.”
 PU : “3 stel juga.”
 T : “2 stel.”
 PU : “2 stel Rp 1400.000?”
 T : “Ndak.”
 PU : “Sebelumnya lagi berapa dengan dia?”
 T : “Iya”
 PU : “Cukup”

2.2 Analisis Data

2.2.1 Bentuk Tuturan Deklaratif Saksi Bahasa Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru.

2.2.1.1 Tuturan Deklaratif Dengan Maksud Menyatakan Inforamasi Faktual.

Tuturan ini merupakan tuturan deklaratif saksi yang memberikan informasi yang bersifat faktual.

No	Situasi	Nomor Data	File	Menit Ke	Tuturan
1	Situasi (1)	1	1	00:07	“Sehat.”
2	Situasi (1)	2	1	00:07	“Sehat.”
3	Situasi (1)	3	1	00:16	“Sehat.”
4	Situasi (2)	5	1	01:24	“Sudah.”
5	Situasi (2)	6	1	01:34	“Tidak Bu .”
6	Situasi (2)	7	1	01:39	“Iya Bu .”
7	Situasi (2)	8	1	01:48	“Masih”
8	Situasi (3)	9	1	02:08	“Waktu ditangkap Rp. 2000.000.”

No	Situasi	Nomor Data	File	Menit Ke	Tuturan
9	Situasi (4)	10	1	01:48	“Kalau ada murid pindah saya terima Pak.”
10	Situasi (4)	12	1	03:40	“Diserahkan kepada kepala sekolah Pak, sebagian yang ada Rp. 500.000 ada juga Rp. 1000.000.”
11	Situasi (4)	15	1	04:46	“Di Jalan Soebrantas.”
12	Situasi (4)	16	1	04:48	“Rp. 750.000.”
13	Situasi (5)	17	1	05:07	“Tata Usaha.”
14	Situasi (5)	18	1	05:10	“Belum.”
15	Situasi (5)	19	1	05:22	“Iya Bu selama ini saya.”
16	Situasi (5)	20	1	05:40	“Gak Bu , ada yang Rp. 2300.000.”
17	Situasi (5)	23	1	06:05	“Iya.”
18	Situasi (5)	24	1	06:07	“Bukan.”
19	Situasi (5)	25	1	06:13	“Rp. 1500.000.”
20	Situasi (5)	26	1	06:17	“Rp.2300.000”
21	Situasi (5)	28	1	07:13	“Ada.”
22	Situasi (5)	30	1	07:22	“Iya.”
23	Situasi (6)	31	1	07:27	“3 (tiga) stel Bu .”
24	Situasi (6)	32	1	07:41	“Tidak Bu di tukang jahit.”
25	Situasi (6)	35	1	08:15	“Rp. 750.000.”
26	Situasi (6)	36	1	08:30	“Kadang Rp 1500.000 saya ambil.”
27	Situasi (6)	37	1	08:49	“SMP A.”
28	Situasi (6)	38	1	09:06	“Jumlah 17 orang.”
29	Situasi (6)	41	1	09:43	“Iya Bu saya.”
30	Situasi (6)	42	1	09:54	“Tidak ada Bu .”
31	Situasi (6)	43	1	10:01	“Yang saya suruh sudah dijahit Bu .”
32	Situasi (6)	44	1	10:07	“Dari uang masuk pembayaran Bu , Rp 150.000 sampai Rp 2300.000.”
33	Situasi (6)	45	1	10:17	“Dari sekolah.”
34	Situasi (6)	46	1	10:20	“Sama saya juga.”
35	Situasi (6)	47	1	10:24	“Belum.”
36	Situasi (7)	48	1	10:34	“Rp 7600.000.”

No	Situasi	Nomor Data	File	Menit Ke	Tuturan
37	Situasi (7)	50	1	10:44	“Rp 10.000.000 lebih lah Bu .”
38	Situasi (7)	51	1	11:03	“Membeli cat untuk lokal Rp 1000.000, rokok Rp 1000.000, bayar koran Rp 1000.000.”
39	Situasi (7)	52	1	11:20	“Tanah hitam.”
40	Situasi (7)	53	1	11:23	“Untuk Bu nga.”
41	Situasi (7)	54	1	11:35	“Sisanya Rp 2000.000 saya ambi Bu .”
42	Situasi (7)	55	1	11:44	“Beli rokok kawan-kawan kerja.”
43	Situasi (7)	56	1	11:50	“Rp 2000.000.”
44	Situasi (7)	57	1	11:58	“Iya Bu .”
45	Situasi (7)	58	1	12:09	“Sudah Bu .”
46	Situasi (7)	60	1	12:25	“Itu pun ada yang belum bayar.”
47	Situasi (7)	61	1	12:31	“8 (delapan) orang.”
48	Situasi (7)	64	1	12:54	“Ada Bu .”
49	Situasi (7)	68	1	13:30	“Iya Bu .”
50	Situasi (7)	69	1	13:35	“Dari APBD Bu .”
51	Situasi (7)	70	1	13:40	“Dinas Pendidikan.”
52	Situasi (7)	71	1	13:43	“Bu kan Bu .”
53	Situasi (7)	72	1	13:50	“Tidak semua Bu , ada yang honor komite juga Bu .”
54	Situasi (7)	73	1	13:57	“Iya.”
55	Situasi (7)	74	1	14:03	“Iya Bu .”
56	Situasi (8)	75	1	14:33	“Iya Pak, ada yang bayar separo.”
57	Situasi (8)	76	1	14:39	“Di sekolah Pak.”
58	Situasi (8)	77	1	14:44	“Di ruang TU.”
59	Situasi (8)	78	1	14:48	“Iya.”
60	Situasi (8)	80	1	13:04	“1 (satu) orang Pak.”
61	Situasi (8)	82	1	15:16	“Iya.”
62	Situasi (8)	86	1	16:20	“Gak ada.”
63	Situasi (8)	88	1	16:41	“Iya.”
64	Situasi (8)	89	1	16:56	“Tidak ada.”

No	Situasi	Nomor Data	File	Menit Ke	Tuturan
65	Situasi (8)	90	1	17:12	“Ya kalau saya menyesal Pak, lepas kejadian kemaren pas saya ke tangkep tangan, penyelidik langsung cek semua ruang tata usaha BB diambil sesudah itu Ibu kepala sekolah telfon saya ‘jadi siswa itu masuk Pak’ jadi bisa antar uangnya gak bisa saya ada tamu jadi anaknya yang jemput pembicaraan saya dan kepala sekolah direkam.”
66	Situasi (8)	91	1	18:22	“Tidak Pak hanya menefon saja.”
67	Situasi (8)	92	1	18:29	“Ibu kepala sekolah telfon saya “jadi anak itu masuk Pak?” “Jadi Bu ” “Berapa uangnya?” “Rp 2000.000” “bisa diantar ke rumah gak?” “gak bisa saya ada tamu”. Saya suruh anak saya jemput selepas itu direkam sama penyelidik, Ibu sekarang dilaporkan.”
68	Situasi (8)	93	1	19:54	“Lebih 13 (tiga belas) tahun.”
69	Situasi (8)	94	1	20:07	“Lebih kurang 1 (satu) tahun.”
70	Situasi (9)	95	1	20:37	“Iya Pak.”
71	Situasi (9)	96	1	21:47	“Bertemu.”
72	Situasi (9)	97	1	21:57	“Diperintah.”
73	Situasi (9)	98	1	22:08	“Diperintah dan iya itu.”
74	Situasi (9)	99	1	22:25	“3 (tiga) stel.”
75	Situasi (9)	100	1	22:31	“Ada 3 (tiga) stel ada 4 (empat) stel.”
76	Situasi (9)	102	1	22:58	“5 (lima) macam.”
77	Situasi (9)	103	1	23:17	“5 (lima) juga.”
78	Situasi (9)	104	1	23:44	“Iya Bu .”

No	Situasi	Nomor Data	File	Menit Ke	Tuturan
79	Situasi (9)	105	1	24:01	“Sebelum- sebelumnya Rp 1400.000.”
80	Situasi (9)	106	1	24:33	“Ikut.”
81	Situasi(11	112	1	30:00	“Iya ada.”
82	Situasi (13)	113	1	30:45	“Iya.”
83	Situasi (13)	114	1	30:53	“Sekali.”
84	Situasi (13)	116	1	31:17	“Uang tersebut Bu karena beliau ini anaknya ditangkap narkoba di Bengkalis. Dan dia mau sidang Bu tuh uang.
85	Situasi (13)	117	1	31:33	“Iya Pakai uang sekolah Rp 4000.000. Saya kasih langsung saya kembalikan lagi ke dia, belilah apa saja yang belum dibayar. Maka dibayarlh untuk koran dan oprasional lain, tanah hitam dan dia memakai uang dari dalam sekolah Rp 4000.000”
86	Situasi (13)	121	1	33:09	“Di sana 1 (satu) tahun Bu .”
87	Situasi (13)	122	1	33:15	“Di SMP B Bu .”
88	Situasi (13)	123	1	33:16	“Iya.”
89	Situasi (13)	124	1	33:17	“3 (tiga) kali.”
90	Situasi (13)	125	1	33:26	“10 (sepuluh) tahun.”
91	Situasi (13)	126	1	33:37	“Iya.”
92	Situasi (13)	127	1	33:38	“Tidak ada.”
93	Situasi (13)	133	1	34:42	“Ibu , ada tetapi tidak pada masa itu dan untuk itu fokusnya tidak ada.”
94	Situasi (13)	139	1	36:48	“Gak ingat saya jumlahnya sampai Rp 7000.000.”

No	Situasi	Nomor Data	File	Menit Ke	Tuturan
95	Situasi (13)	140	1	36:49	“Pernah.”
96	Situasi (13)	141	1	37:05	“Tidak diperkenankan.”
97	Situasi (14)	147	1	38:53	“Tidak.”
98	Situasi (14)	149	1	39:17	“Selama ini tidak Pak.”
99	Situasi (14)	150	1	39:39	“Selama ini tidak Pak, saya tidak minta uang Pak.”
100	Situasi (14)	153	1	41:47	“Dia menggunakan Pak.”
101	Situasi (14)	156	1	42:18	“Dana sekolah.”
102	Situasi (14)	158	1	42:51	“Dana oprasioanal sekolah.”
103	Situasi (14)	159	1	42:53	“Dari gubernur.”
104	Situasi (14)	160	1	42:56	“Iya.”
105	Situasi (14)	164	1	44:39	“Tau.”
106	Situasi (14)	165	1	44:43	“Saya tau Pak.”
107	Situasi (14)	166	1	44:51	“Tau Pak”
108	Situasi (14)	176	1	48:47	“Kerjanya baru tahun 2017.”
109	Situasi (14)	177	1	48:12	“28 September 2017.”
110	Situasi (14)	178	1	48:27	“2018 kejadian Juni.”
111	Situasi (15)	183	1	50:56	“Tidak.”
112	Situasi (15)	185	1	51:14	“Tidak.”
113	Situasi (15)	188	1	51:65	“Tau Bu .”

No	Situasi	Nomor Data	File	Menit Ke	Tuturan
114	Situasi (15)	190	1	52:08	“Saya.”
115	Situasi (15)	191	1	52:17	“Ya Bu .”
116	Situasi (18)	194	2	14:03	“Iya yang mulia.”

Situasi [1] : Hakim membuka sidang pukul 09.00 Wib dan menanyakan kesehatan kedua terdakwa yang diperiksa sebagai saksi pada kasus tindak pidana korupsi. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 00.00 - 00.23)

SP : “Sehat.” (1) (00:07)
 SW : “Sehat.” (2) (00:07)
 SP : “Sehat.” (3) (00:16)

Tuturan pada yang terdapat pada nomor (1), (2) dan (3) tersebut disampaikan SP dan SW termasuk tuturan memberitahukan informasi faktual. Tuturan nomor (1), (2) dan (3) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberitahukan informasi faktual saksi kepada hakim “Sehat.” Yaitu memberitahukan tentang kondisinya saat menjadi saksi dalam persidangan sehingga dapat memberikan keterangan baik.

Situasi [2] : Hakim mempersilahkan kedua terdakwa yang diperiksa sebagai saksi untuk melakukan sumpah atas keterangan yang akan diberikan serta memberi intruksi untuk saksi pria yang terlebih dahulu diperiksa sementara saksi wanita dipersilahkan untuk duduk disebelah penasehat hukum. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 00:23-01:50)

SP : “Sudah.” (5) (01:24)

Pada tuturan (5) dalam situasi 2 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (5) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberitahukan informasi faktual kepada lawan tuturnya “Sudah.” Artinya saksi

mengatakan yang sebenarnya bahwa sudah pernah memberikan keterangan kepada penyelidik sebelumnya.

SP : “Tidak Bu .” (6) (01:34)

Tuturan (6) dalam situasi 2 tersebut termasuk dalam tuturan deklaratif. Tuturan nomor (6) tersebut merupakan tuturan deklaratif. Maksudnya menyatakan informasi faktual terhadap lawan bicara “*Tidak Bu .*” Artinya saksi pria (SP) mengatakan yang sebenarnya bahwa tidak ada acaman pada saat pemeriksaan.

SP : “Iya Bu .” (7) (01:39)

Pada data tuturan nomor (7) pada situasi 2 mengandung tuturan deklaratif. Karena saksi memberikan informasi faktual terhadap hakim. “*Iya Bu .*” Artinya saksi mengatakan bahwa telah menandatangani berita acara sebelum memberikan keterangan di dalam persidangan.

SP : “Masih Bu .” (8) (01:48)

Tuturan terjadi ketika saksi pria menjawab pertanyaan saksi, dalam tuturan nomor (8) mengandung tuturan deklaratif memberikan informasi yang faktual. Hal ini dibuktikan dengan sebuah pernyataan “*Masih Bu .*” Artinya memberikan informasi yang sebenarnya bahwa saksi masih ingat dengan inti sari yang telah ia jelaskan kepada penyelidik.

Situasi [3] : Hakim memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk bertanya kepada saksi. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 01:50-02:41)

SP : “Waktu ditangkap Bu Rp 2000.000.” (9) (02:08)

Pada data nomor (9) termasuk dalam tuturan deklaratif memberikan informasi faktual. Hal ini ditujukan saksi memberikan jawabanya sebenarnya kepada hakim “*Waktu ditangkap Bu Rp 2000.000.*” Artinya saksi pria (SP)

memberikan informasi yang sebenarnya bahwa uang ditangkap di dalam map berjumlah Rp 2000.0000.

Situasi [4] : Hakim meminta saksi untuk menggunakan *mikrofon* karena suara saksi kecil sehingga kurang jelas terdengar. (02:41-05:01)

SP : “Kalau ada murid pindah, saya terima Pak.” (10) (02:48)

Pada tuturan nomor (10) yang terdapat pada situasi 4 termasuk dalam tuturan deklaratif. Yang berfungsi sebagai menyampaikan informasi faktual. Hal ini dibuktikan “*Kalau ada murid pindah, saya terima Pak.*” Artinya, saksi pria mengatakan bahwa jika ada murid masuk penerimaanya melalui dirinya sendiri sebagai staf tata usaha di sekolah tersebut.

SP : “Diserahkan kepada kepala sekolah Pak sebagian yang ada Rp 500.000 ada juga Rp 1000.000.” (12) (03:40)

Berdasarkan tuturan (12) pada situasi 4 termasuk ke dalam tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi yang sebenarnya. Hal ini dibuktikan pada pernyataan saksi pria (SP) “*Diserahkan kepada kepala sekolah Pak sebagian yang ada Rp 500.000 ada juga Rp 1000.000.*” Artinya saksi menyatakan informasi yang sebenarnya bahwa ada sejumlah uang yang benar-benar diberikan kepada kepala sekolah dari hasil mengutip dari orang tua siswa.

SP : “Di Jalan Soebrantas” (15) (04:46)

Pada data di atas nomor (15) pada situasi 4 merupakan tuturan deklaratif yang berfungsi menyampaikan informasi faktual. Hal ini ditunjukkan “*Di Jalan Soebrantas.*” Artinya saksi mengatakan memberikan uangnya di kantor yang berada di Jalan Soebrantas.

SP : “Rp 7500.000. (16) (04:49)

Tuturan terjadi ketika saksi pria menjawab pertanyaan hakim. Hal ini dibuktikan dengan kalimat pernyataan saksi “Rp 7500.000.” Artinya mengatakan besaran jumlah uang yang diberikan kepada kepala sekolah.

Situasi [5] : Penutup Umum mengakhiri pertanyaannya karena sudah merasa cukup dan sidang diambil alih oleh hakim ketua untuk melanjutkan pertanyaan. (Data ini berada di file 1 durasi 05:01-07:19)

SP : “Tata usaha.” (17) (05:07)

Pada data (17) pada situasi 5 merupakan tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini tergambar pada pernyataan saksi pria (SP) “Tata usaha.” Artinya mengatakan pekerjaannya pada sekolah tersebut sebagai tata usaha.

SP : “Belum.” (18) (05:10)

Pada tuturan nomor (18) pada situasi 5 terdapat tuturan deklaratif yang memberikan informasi faktual. Hal ini ditunjukkan dalam pernyataan “Belum.” yan disampaikan saksi pria (SP) kepada hakim maksudnya saksi mengatakan bahwa statusnya yang belum menjadi pegawai tetap di sekolah tersebut.

SP : “Iya Bu , selama ini Saya.” (19) (05:22)

Data tuturan (19) pada situasi 5 mengandung tuturan deklaratif yang memberikan informasi yang faktual. Hal ini dapat ditunjukkan dalam sebuah pernyataan “Iya Bu , selama ini Saya.” Artinya saksi pria mengatakan hal yang sebenarnya bahwa penerimaan siswa melalui dia.

SP : “Gak Bu ada yang Rp 2300.000” (20) (05:40)

Tuturan yang terdapat nomor (20) pada situasi 5 termasuk dalam tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini dibuktikan dalam sebuah pernyataan “*Gak Bu ada yang Rp 2300.000.*” Saksi mengatakan bahwa yang sebenarnya besaran uang yang diminta tidak menentu.

SP : “Iya.” (23) (06:05)

Tuturan pada nomor (23) pada situasi 5 termasuk dalam tuturan deklaratif yang meberikan informasi yang bersifat faktual. Yang tergambar dalam sebuah pernyataan saksi yang mengatakan “*Iya.*” Maksudnya saksi pria mengatakan apabila ada siswa baru ia langsung berkoordinasi dengan kepala sekolah.

SP : “Bukan. (24) (06:07)

Pada data yang terdapat dalam situasi 5 termasuk dalam tuturan deklaratif yang bersifat memberikan informasi faktual. Yang ditunjukkan pernyataan “*Bukan.*” Artinya saksi pria mengatakan hal sebenarnya bahwa tidak langsung menetapkan tetapi melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah.

SP : “Rp 1500.000.” (25) (06:13)

Tuturan nomor (25) pada situasi 5 yang diutarakan merupakan tuturan deklaratif yang memberikan informasi faktual terhadap hakim. Hal ini ditunjukkan dalam sebuah pernyataan “*Rp 1500.000.*” Maksudnya saksi memberitahukan jumlah uang paling rendah yang diminta kepada orang tua siswa.

SP : “ Rp 2300.000.” (26) (06:17)

Tuturan nomor (26) pada situasi 5 merupakan tuturan deklaratif yang memberikan informasi faktual. Hal ini ditunjukkan dalam sebuah pernyataan “*Rp*

2300.000.” Artinya saksi pria memberitahukan informasi yang sebenarnya bahwa jumlah yang paling tinggi jumlah uang yang diminta.

Situasi [6] : Saksi merasa sedih dan sangat menyesali perBu atanya karena menjalankan tugas yang salah karena permintaan kepala sekolah. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 07:19-10:25)

SP : “Iya.” (30) (07:22)

Tuturan yang diutarakan saksi pria di atas pada situasi 6 merupakan tuturan deklaratif. Hal ini dibuktikan dalam sebuah pernyataan “Iya.” Artinya saksi pria mengatakan yang sebenarnya bahwa semua itu adalah intruksi kepala sekolah ia hanya menjalankan tugas saja.

SP : “3 (tiga) stel Bu .” (31) (07:27)

Data nomor (31) pada situasi 6 yang terdapat tuturan deklaratif yang memberikan informasi faktual kepada hakim yang terdapat dalam sebuah pernyataan “3 (tiga) stel Bu .” Artinya saksi memberitahukan bahwa jumlah baju seragam pada sekolah tersebut jumlahnya memang 3 stel.

SP : “Tidak Bu , di tukang jahit.” (32) (07:41)

Tuturan nomor (32) termasuk ke dalam tuturan deklaratif yang mempunyai fungsi menyampaikan informasi yang sebenarnya. Hal ini tergambar dalam sebuah pernyataan “Tidak Bu, di tukang jahit.” Artinya saksi pria memberikan informasi yang sebenarnya bahwa tukang jahitlah yang mengerjakan seragam siswa pindahan tersebut.

SP : “Rp 760.000.” (35) (08:15)

Data tuturan nomor 35 pada situasi 6 mengandung tuturan deklaratif yang bersifat memberikan informasi faktual kepada hakim . Hal ini dibuktikan pada

sebuah pernyataan “Rp 760.000.” Maksudnya saksi memberitahukan informasi yang sebenarnya mengenai harga upah jahit baju seragam.

SP : “Kadang Rp 1500.000 saya ambil.” (36) (08:30)

Tuturan yang diutarakan saksi pria (SP) tuturan nomor 36 pada situasi 6 termasuk dalam tuturan deklaratif yang memberikan informasi faktual. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah “*Kadang Rp 1500.000 saya ambil.*” Artinya saksi pria mengatakan sebuah hal yang fakta bahwa dirinya mengambil uang sejumlah Rp 1500.000 .

SP : “SMP A.” (37) (08:49)

Data nomor (37) merupakan tuturan deklaratif yang memberikan informasi faktual. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan saksi “*SMP A.*” Artinya saksi pria (SP) memberitahukan Informasi yang sebenarnya mengenai nama sekolah tempat saksi bekerja.

SP : “Jumlah 17 orang.” (38) (09:06)

Untuk tuturan nomor (38) merupakan tuturan deklaratif yang memberikan informasi faktual. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan saksi “*Jumlah 17 orang.*” Maksudnya memberitahukan jumlah siswa dan hal ini merupakan suatu kebenaran yang terjadi.

SP : “Iya Bu saya” (41) (09:43)

Tuturan nomor (41) pada situasi 6 merupakan tuturan deklaratif yang memberikan informasi faktual. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan saksi “*Iya Bu saya.*” Artinya ia memberitahukan yang membayar itu memang dirinya sendiri dan hal ini bersifat fakta.

SP : “Tidak ada Bu .” (42) (09:54)

Pada tuturan nomor (42) pada situasi 6 merupakan tuturan deklaratif yang memberikan informasi faktual. Hal ini ditunjukkan pada sebuah pernyataan saksi “*Tidak ada Bu .*” Maksudnya saksi mengatakan bahwa dirinya tidak ada memberikan uang kepada tukang jahit.

SP : “Yang saya suruh sudah dijahit Bu .” (43) (10:01)

Berdasarkan tuturan nomor (43) pada situasi 6 merupakan tuturan deklaratif yang memeberikan informasi faktual hal ini ditandai dengan pernyataan “*Yang saya suruh sudah dijahit Bu .*” Maksudnya saksi mengatakan bahwa ada sebagian yang disuruh sudah dijahit.

SP : “Dari uang masuk pembayaran Bu , Rp 1500.000 sampai Rp 2300.000.” (44) (10:07)

Tuturan nomor (44) pada situasi 6 merupakan tuturan deklaratif yang memberikan informasi faktual. Adapun hal ini ditunjukkan pada pernyataan saksi pria (SP) “*Dari uang masuk pembayaran Bu , Rp 1500.000 sampai Rp 2300.000.*” Saksi mengatakan bahwa besaran uang masuk yang diminta sekolah kepada orang tua siswa Rp 1500.000 sampai Rp 2300.000.

SP : “Dari sekolah.” (45) (10:17)

Data (45) pada situasi 6 merupakan tuturan deklaratif yang bersifat memberitahukan. Hal ini ditandai dengan sebuah pernyataan “*Dari sekolah.*” Artinya saksi meberitahukan bahwa tukang jahit menagih uangnya melalui sekolah.

SP : “Sama saya juga.” (46) (10:20)

Data tuturan (46) pada situasi 6 mengandung tuturan deklaratif yang berfungsi memberi informasi faktual. Hal ini dapat dibuktikan pada sebuah pernyataan saksi pria “*Sama saya juga.*” Maksudnya tukang jahit menagih uang melalui dirinya.

SP : “Belum.” (47) (10:24)

Jawaban tuturan saksi pria yang terdapat pada situasi 6 merupakan tuturan deklaratif yang berfungsi memberi informasi faktual. Hal ini dapat diketahui dari sebuah pernyataan “*Belum.*” Artinya saksi mengatakan hal sebenarnya bahwa dirinya belum ada memberikan uang kepada tukang jahit.

Situasi [7] : Hakim mempertanyakan dan menghitung uang yang diperoleh dari orang tua siswa pindahan secara detail. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 10.25-14.06)

SP : “Rp 7600.000 Bu .” (48) (10:34)

Tuturan (48) pada situasi 7 merupakan tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini ditunjukkan pada pernyataan saksi pria kepada hakim “*Rp 7600.000 Bu .*” Artinya saksi memberikan informasi bahwa jumlah uang yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp7600.000.

SP : “Merehap kursi, meja.” (49) (10:40)

Berdasarkan tuturan (49) pada situasi 7 merupakan tuturan deklaratif berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan saksi kepada hakim “*Merehap kursi, meja.*” Artinya hakim memberikan informasi yang sebenarnya bahwa uang yang diminta sekolah untuk memperbaiki kursi meja.

SP : “Rp 10.000.000 lebih lah Bu .” (50) (10:44)

Pada data tuturan nomor (49) yang diutarakan saksi pria (SP) pada situasi 7 merupakan tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi faktual. Hal dibuktikan dalam sebuah pernyataan saksi kepada hakim “*Rp 10.000.000 lebih lah Bu .*” Artinya hakim memberikan informasi mengenai jumlah uang yang digunakan untuk merehap kursi.

SP : “Membeli cat untuk lokal Rp 1000.000, rokok Rp 1000.000, bayar koran Rp 1000.000.” (51) (11:03)

Pada data tuturan nomor (51) pada situasi 7 merupakan tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini ditunjukkan dalam pernyataan saksi “*Membeli cat untuk lokal Rp 1000.000, rokok Rp 1000.000, bayar koran Rp 1000.000.*” Maksudnya saksi memberi informasi faktual mengenai rincian pemakaian dana sekolah kepada hakim.

SP : “Tanah hitam.” (52) (11.20)

Tuturan (52) pada situasi 7 termasuk ke dalam tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi yang faktual. Hal ini dapat ditunjukkan pada pernyataan “*Tanah hitam.*” Maksudnya saksi memberikan informasi yang faktual bahwa ada dana sekolah yang dipakai untuk membeli tanah hitam.

SP : “Untuk Bunga.” (53) (11:23)

Berdasarkan tuturan nomor (53) pada situasi 7 merupakan tuturan deklaratif yang memberikan informasi faktual. Dapat ditunjukkan pada sebuah pernyataan “*Untuk Bunga.*” Saksi memberitahukan bahwa tanah hitam gunanya untuk bunga yang ada dilingkungan sekolah.

SP : “Sisanya Rp 2000.000 saya ambil Bu .” (54) (11:35)

Tuturan nomor (54) merupakan tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini dapat dibuktikan pada pernyataan saksi kepada hakim “*Sisanya Rp 2000.000 saya ambil Bu .*” Artinya saksi mengatakan yang sebenarnya bahwa sisa uang Rp 2000.000 ia ambil.

SP : “Beli rokok kawan-kawan kerja.” (55) (11:44)

Berdasarkan tuturan nomor (55) pada situasi 7 merupakan tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini dapat dibuktikan pada pernyataan saksi kepada hakim “*Beli rokok kawan-kawan kerja.*” Artinya saksi memberikan informasi faktual bahwa uang sebagian dibelikan rokok untuk para pekerja.

SP : “Rp 2000.000.” (56) (11:50)

Data di atas nomor (56) pada situasi 7 merupakan tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan saksi “*Rp 2000.000.*” Artinya saksi mengatakan jumlah yang tertangkap Rp 2000.000.

SP : “Iya Bu .” (57) (11:58)

Berdasarkan tuturan nomor (57) pada situasi 7 merupakan tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini ditunjukkan dalam pernyataan “*Iya Bu .*” Saksi mengatakan bahwa memang benar jumlah uang yang tertangkap sebesar Rp 4500.000.

S : “Sudah Bu .” (58) (12:09)

Tuturan nomor (58) pada situasi 7 merupakan tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan

“*Sudah Bu .*” Artinya saksi memberitahu kepada hakim bahwa memang sudah lama menjadi tata usaha di sekolah itu.

SP : “Itu pun ada yang belum bayar.” (60) (12:25)

Berdasarkan tuturan nomor (60) pada situasi 7 merupakan tuturan deklaratif yang berfungsi meberikan informasi faktual kepada lawan bicara. Hal ini dapat ditunjukkan pada pernyataan saksi “*Itu pun ada yang belum bayar.*” Saksi pria memberikan infomasi bahwa masih ada siswa yang belum membayar uang sekolahnya.

SP : “8 (delapan) orang.” (61) (12:31)

Berdasarkan tuturan nomor (61) pada situasi 7 merupakan tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan “8 (*delapan*) orang.” Artinya, saksi menyampaikan kepada hakim bahwa jumlah siswa yang belum bayar ada 8 (delapan) orang.

SP : “Ada Bu .” (64) (12:54)

Data tuturan nomor (64) situasi 7 tutuan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini dapat dibuktikan pada pernyataan “*Ada Bu .*” Artinya saksi mengatakan kepada lawan tutur bahwa memang ada anggaran dari pemerintah untuk sekolah.

SP : “Iya Bu .” (68) (13:30)

Tuturan yang diutarakan saksi pria (SP) kepada lawan tuturnya nomor (68) situasi 7 mengandung tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini ditunjukkan dari jawaban saksi saat ditanya hakim “*Iya Bu .*”

Artinya saksi mengatakan bahwa dirinya memang takut dipecat apabila tidak menjalankan perintah kepala sekolah.

SP : “Dari APBD Bu .” (69) (13:35)

Berdasarkan tuturan nomor (69) pada situasi 7 merupakan tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi yang bersifat faktual. Hal ini ditandai dengan pernyataan saksi kepada hakim “*Dari APBD Bu .*” Saksi memberikan informasi bahwa gajinya dari APBD.

SP : “Dinas Pendidikan.” (70) (13:40)

Berdasarkan tuturan (70) pada situasi 7 merupakan tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi yang bersifat faktual, hal ini ditunjukkan dengan sebuah pernyataan saksi kepada hakim “Dinas Pendidikan.” Artinya saksi memberitahukan bahwa yang mengeluarkan SK adalah Dinas Pendidikan.

SP : “Bu kan Bu .” (71) (13:43)

Tuturan nomor (71) pada situasi 7 merupakan tuturan deklaratif yang memberikan informasi faktual. Hal ini ditandai dengan sebuah pernyataan saksi “*Bu kan Bu .*” Artinya saksi mengatakan dengan sebenarnya bahwa bukan terdakwa yang mengeluarkan SKnya.

SP : “Tidak semua Bu , ada honor komite juga Bu .” (72) (13:50)

Tuturan nomor (72) pada situasi 7 merupakan tuturan deklaratif yang memberikan informasi faktual. Karena memberikan penjelasan yang sebenarnya hal ini dibuktikan pada sebuah pernyataan “*Tidak semua Bu , ada honor komite juga Bu .*” Saksi memberikan informasi kepada lawan tutur bahwa masih ada honor komite yang gajinya tidak melalui Dinas Pendidikan.

SP : “Iya.” (73) (13:57)

Berdasarkan tuturan nomor 73 termasuk kedalam tuturan deklaratif yang memberikan informasi faktual. Ini dibuktikan dengan sebuah pernyataan dari saksi kepada hakim “Iya.” Artinya saksi mengatakan bahwa dirinya honor dari dinas.

SP : “Iya Bu .” (74) (14:03)

Tuturan nomor (74) yang diutarakan saksi pria (SP) merupakan tuturan deklaratif karena memberikan informasi faktual hal ini dapat ditunjukkan dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh saksi kepada hakim “Iya Bu .” Artinya memberikan keterangan bahwa dirinya melakukan semua itu atas surhan kepala sekolah.

Situasi [8] : Pertanyaan diambil alih oleh hakim anggota untuk dilanjutkan sehingga kasus ini dapat dipertimbangkan dengan baik. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 14:06-20:37)

SP : “Iya Pak, ada yang bayar separo.” (75) (14:33)

Data tuturan nomor (75) pada situasi 8 merupakan tuturan deklaratif karena berfungsi memberikan informasi faktual kepada lawan tuturnya “Iya Pak, ada yang bayar separo.” Artinya saksi mengatakan bahwa siswa yang membayar melalui dirinya dan ada pula yang membayar hanya setengah dari uang pembayaran.

SP : “Di sekolah Pak.” (76) (14:39)

Tuturan nomor (76) dalam situasi 8 mengandung tuturan deklaratif karena bersifat memberikan informasi faktual kepada lawan tuturnya “Di sekolah Pak.” Artinya saksi pria (SP) mengatakan informasi yang sebenarnya kepada hakim bahwa dia menerima uang siswa di sekolah.

SP : “Di ruang TU.” (77) (14:44)

Data tuturan nomor (77) dalam situasi 8 merupakan tuturan dekalratif karena memberikan informasi yang sebenarnya kepada lawan tutur “*Di ruang TU.*” Maksudnya saksi mengatakan bahwa dia menerima uang di sekolah lebih tepatnya di ruang tata usaha.

SP : “Iya.” (78) (14:48)

Pada data tuturan nomor (78) dalam situasi 8 merupakan tuturan deklaratif karena memberikan informasi faktual kepada lawan tutur “*Iya.*” Artinya saksi mengatakan bahwa semua uang itu benar diserahkan di tata usaha melalui saksi.

SP : “Di kantin itu yang lama Pak.” (79) (14:56)

Tuturan nomor (79) merupakan tuturan deklaratif karena memberikan informasi faktual kepada lawan tutur. Hal ini ditandai dari pernyataan saksi “*Di kantin itu yang lama Pak.*” Artinya saksi membenarkan bahwa pernah menerima uang di kantin tapi waktunya sudah lama.

SP : “1 (satu) orang Pak.” (80) (13:04)

Tuturan nomor (80) merupakan tuturan deklaratif karena berfungsi memberikan informasi faktual hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan saksi kepada hakim “*1 (satu) orang Pak.*” Artinya saksi mengatakan bahwa ada 1 (satu) orang siswa yang memberikan uang di kantin.

SP : “Iya.” (82) (15:16)

Data tuturan nomor (82) pada situasi 8 merupakan tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini dapat ditunjukkan dari pernyataan

saksi kepada hakim “*Iya.*” Artinya saksi mengatakan bahwa hanya 1 (orang) yang memberikan uang di kantin selebihnya di kantor.

SP : “Gak ada.” (86) (16:20)

Berdasarkan tuturan nomor (86) pada situasi 8 merupakan tuturan deklaratif karena berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini ditandai dengan sebuah pernyataan saksi kepada hakim “*Gak ada.*” Artinya saksi mengatakan tidak pernah menegur terdakwa bahwa mengutip uang adalah tindakan yang melanggar aturan.

SP : “*Iya.*” (88) (16:41)

Data tuturan nomor (88) pada situasi 8 mengandung tuturan deklaratif yang memberikan informasi faktual. Hal ini dapat ditunjukkan dalam pernyataan saksi kepada hakim “*Iya.*” Artinya saksi mengatakan bahwa saksi takut terdakwa tersinggung jika menegur bahwa mengutip adalah tindakan yang salah.

SP : “Tidak ada.” (89) (16:56)

Tuturan nomor (89) pada situasi 8 merupakan tuturan deklaratif karena memberikan informasi faktual. Hal ini ditunjukkan dari pernyataan saksi “*Tidak ada.*” Artinya saksi tidak pernah menetapkan jumlah uang yang diminta kepada orang tua siswa sendiri.

SP : “Ya kalau saya menyesal Pak, lepas kejadian kemaren pas saya ke tangkep tangan, penyelidik langsung cek semua ruang tata usaha BB diambil sesudah itu Ibu kepala sekolah telfon saya ‘Jadi siswa itu masuk Pak’ Jadi bisa antar uangnya gak bisa saya ada tamu jadi anaknyayang jemput pembicaraan saya dan kepala sekolah direkam.” (90) (17:12)

Pada data tuturan nomor (90) pada situasi 8 merupakan tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini dapat ditunjukkan dari

pernyataan saksi kepada lawan tutur “*Ya kalau saya menyesal Pak, lepas kejadian kemaren pas saya ke tangkep tangan, penyelidik langsung cek semua ruang tata usaha BB diambil sesudah itu Ibu kepala sekolah telfon saya ‘jadi siswa itu masuk Pak’ jadi bisa antar uangnya gak bisa saya ada tamu jadi anaknya yang jemput pembicaraan saya dan kepala sekolah direkam.*” Artinya saksi memberikan informasi mengenai proses penangkapan terdakwa.

SP : “Tidak Pak hanya menelfon saja.” (91) (18:22)

Tuturan nomor (91) pada situasi 8 merupakan tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini dapat dibuktikan dalam sebuah pernyataan “*Tidak Pak hanya menelfon saja.*” Artinya saksi mengatakan kepada hakim bahwa tidak ada bertemu dengan terdakwa hanya melalui telepon saja.

SP : “Ibu kepala sekolah telfon saya “*jadi anak itu masuk Pak? ‘Jadi Bu ‘Berapa uangnya? ‘Rp 2000.000 ‘Bisa diantar ke rumah gak? ‘gak bisa saya ada tamu. Saya suruh anak saya jemput selepas itu direkam sama penyelidik, Ibu sekarang dilaporkan.*” (92) (18:29)

Tuturan nomor (92) pada situasi 8 merupakan tuturan deklaratif karena berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini ditandai dalam pernyataan saksi “*Ibu kepala sekolah telfon saya “Jadi anak itu masuk Pak? “Jadi Bu “Berapa uangnya? “Rp 2000.000 “Bisa diantar ke rumah gak? “Gak bisa saya ada tamu”. Saya suruh anak saya jemput selepas itu direkam sama penyelidik, Ibu sekarang dilaporkan.*” artinya saksi menceritakan dari awal kronologi penangkapan terdakwa.

SP : “Lebih 13 tahun.” (93) (19:54)

Data tuturan nomor (93) yang diutarakan saksi dalam situasi 8 merupakan tuturan deklaratif yang memberikan informasi faktual. Hal ini terbukti dalam

sebuah pernyataan saksi kepada hakim “*Lebih 13 tahun.*” Artinya saksi mengatakan bahwa dirinya sudah lebih dari 13 (tiga belas) tahun bekerja sebagai tata usaha di sekolah itu.

SP : “Lebih kurang 1 (satu) tahun.” (94) (20:07)

Tuturan nomor (94) pada situasi 8 merupakan tuturan deklaratif mengandung informasi faktual. Hal ini ditandai dengan pernyataan saksi “*Lebih kurang 1 (satu) tahun.*” Saksi memberikan informasi kepada saksi bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun lebih menjabat sebagai kepala sekolah di SMP tersebut.

Situasi [9] : Hakim ketua mengambil alih sidang dan mulai mengajukan pertanyaan kepada saksi. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 20:37-24:39)

SP : “Iya Pak.” (95) (20:49)

Pada tuturan nomor (95) dalam situasi 9 terdapat tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini ditunjukkan dalam sebuah pernyataan saksi kepada hakim “*Iya Pak.*” Saksi mengatakan bahwa kepala sekolah yang menjabat sebelumnya juga meminta uang sama seperti yang dilakukan terdakwa.

SP : “Bertemu.” (96) (21:47)

Pada data tuturan nomor (96) pada situasi 9 mengandung tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini ditandai dengan pernyataan saksi kepada hakim “*Bertemu.*” Artinya saksi mengatakan bahwa perintah itu dilakukan dengan mengadakan pertemuan terlebih dahulu.

SP : “Diperintah.” (97) (21:57)

Tuturan nomor (97) pada situasi 9 merupakan tuturan deklaratif yang bersifat memberikan informasi faktual. Hal ini dapat ditunjukkan dalam pernyataan saksi kepada lawan tuturnya “*Diperintah.*” Artinya saksi diprintah untuk melakukan tindakan yang salah tersebut.

SP : “Diperintah dan iya itu.” (98) (22:08)

Berdasarkan tuturan nomor (98) pada situasi 9 merupakan tuturan deklaratif yang memberikan informasi faktual. Hal ini dapat dibuktikan pada pernyataan saksi “*Diperintah dan iya itu.*” Saksi mengakui bahwa diperintah dan mengikuti kebiasaan sekolah.

SP : “3 stel.” (99) (22:25)

Pasa data nomor (99) pada situasi 9 mengandung tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini ditandai dengan sebuah pernyataan saksi kepada hakim “*3 stel.*” Artinya saksi mengatakan yang sebenarnya jumlah seragam yang dipakai di sekolah tersebut.

SP : “Ada 3 stel ada 4 stel.” (100) (22:31)

Tuturan nomor (100) yang diutarakan saksi pria mengandung tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi faktual. Pada pernyataan saksi kepada hakim “*Ada 3 stel ada 4 stel.*” maksudnya jumlah seragam ada yang 3 stel dan ada 4 stel.

SP : “5 macam.” (102) (22:58)

Pada tuturan nomor (102) pada situasi 9 merupakan tuturan deklaratif karena memberikan informasi faktual. Hal ini ditandai dengan sebuah pernyataan

saksi kepada hakim “5 macam.” Artinya saksi mengatakan jumlah baju seragam yang sebenarnya ada 5 macam disekolah tersebut.

SP : “5 juga.” (103) (23:44)

Tuturan nomor (103) yang diutarakan saksi pria (SP) mengandung tuturan deklaratif memberikan informasi yang sebenarnya. Hal ini ditandai dengan pernyataan saksi “5 juga.” Artinya saksi mengatakan bahwa tahun sebelumnya juga 5 (lima) stel.

Situasi [12] : Hakim mempersilahkan penuntut umum untuk terlebih dahulu bertanya kepada saksi. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 29.32-30.00)

SW : “Iya ada.” (112) (30:00)

Tuturan nomor (112) yang terdapat pada situasi 12 merupakan tuturan deklaratif yang memberikan informasi faktual. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan saksi “Iya ada.” Artinya saksi mengakui bahwa pernah menerima uang dari terdakwa.

Situasi [13] : Hakim ketua meminta pertanyaannya merujuk pada kesaksian terdakwa sebagai saksi dari E. dan kemudian sidang diambil alih kembali kepada hakim ketua. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 30.05-38.42)

SW : “Iya.” (113) (30:45)

Data tuturan nomor (113) yang diutarakan saksi wanita pada situasi 13 merupakan tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini ditunjukkan pada pernyataan saksi “Iya.” Saksi mengatakan bahwa dirinya tidak ada menetapkan uang kepada orang tua siswa.

SW : “Sekali.” (114) (30:53)

Data tuturan nomor (114) pada situasi 13 merupakan tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini dibuktikan pada pernyataan “*Sekali.*” Artinya saksi mengatakan hanya sekali menerima uang dari terdakwa.

SW : “Uang tersebut Bu karena beliau ini anaknya ditangkap narkoba di Bengkalis. dia mau pergi sidang dan Bu tuh uang.” (116) (31:17)

Pada tuturan nomor (116) merupakan tuturan deklaratif karena memberikan informasi faktual. Hal ini ditunjukkan dalam pernyataan saksi kepada hakim “*Uang tersebut Bu karena beliau ini anaknya ditangkap narkoba di Bengkalis. dia mau pergi sidang dan Bu tuh uang.*” Artinya saksi mengatakan bahwa diberikan kembali kepada terdakwa untuk kepentingan anak terdakwa yang terjerat kasus narkoba di Bengkalis.

SW : “Iya Pakai uang sekolah Rp 4000.000. Saya kasih langsung saya kembalikan lagi ke dia, belilah apa saja yang belum dibayar. Maka dibayarlh untuk koran dan oprasional lain, tanah hitam dan dia memakai uang dari dalam sekolah Rp 4000.000” (117) (31:33)

Tuturan nomor (117) pada situasi 13 merupakan tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi yang sebenarnya. Hal ini tergambar dari pernyataan saksi kepada hakim “*Iya Pakai uang sekolah Rp 4000.000. Saya kasih langsung saya kembalikan lagi ke dia, belilah apa saja yang belum dibayar. Maka dibayarlh untuk koran dan oprasional lain, tanah hitam dan dia memakai uang dari dalam sekolah Rp 4000.000*” artinya saksi mengatakan bahwa terdakwa memakai uang sekolah sejumlah Rp 4000.000.

SW : “Di sana 1 (satu) tahun Bu .” (121) (33:09)

Data tuturan nomor (121) pada situasi merupakan tuturan deklaratif yang memberikan informasi faktual. Hal ini ditunjukkan dalam pernyataan saksi kepada

hakim “*Di sana 1 (satu) tahun Bu .*” Artinya saksi mengatakan sudah 1 (satu tahun) menjadi kepala sekolah di SMP tersebut.

SW : “Di SMP Z Bu .” (122) (33:15)

Data tuturan nomor (122) yang diutarakan saksi wanita (SW) pada situasi 13 merupakan tuturan deklaratif karena memberikan informasi faktual. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan saksi kepada hakim “*Di SMP Z Bu .*” Artinya saksi memberikan keterangan mengenai identitas sekolahnya.

SW : “Iya.” (123) (33:16)

Data tuturan nomor (123) pada situasi 13 mengandung tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini ditandai dengan sebuah pernyataan saksi “*Iya.*” Artinya saksi mengatakan bahwa dirinya pun menjadi kepala sekolah sebelum dipindahkan ke sekolah yang sekarang.

SW : “3 (tiga) kali.” (124) (33:17)

Pada data nomor (124) situasi 13 merupakan tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini terbukti dari sebuah pernyataan saksi kepada hakim “*3 (tiga) kali.*” Artinya saksi memberikan informasi yang sebenarnya bahwa telah 3 (tiga) kali menjabat sebagai kepala sekolah.

SW : “10 (sepuluh) tahun.” (125) (33:26)

Pada data (125) situasi 13 mengandung tuturan deklaratif karena memberikan informasi faktual. Hal ini ditunjukkan dari pernyataan saksi “*10 (sepuluh) tahun.*” Saksi memberikan informasi bahwa sudah masa berlaku menjadi kepala sekolah 10 (Sepuluh) tahun.

SW : “Iya.” (126) (33:37)

Berdasarkan tuturan nomor (126) pada situasi 13 merupakan tuturan deklaraif karena memberikan inforamsi faktual. Hal ini ditunjukkan dari pernyataan saksi kepada hakim “*Iya.*” saksi megatakan bahwa sekolah tersebut adalah sekolah negeri.

SW : “Tidak ada.” (127) (33:38)

Berdasarkan tuturan nomor (127) pada situasi 13 merupakan tuturan deklaratif karena memberikan informasi faktual. Hal ini dibuktikan pada pernyataan saksi ke hakim “*Tidak ada.*” Saksi membenarkan bahwa tidak ada peraturan yang memperbolehkan untuk mengutip uang.

SW : “Pernah.” (140) (36:49)

Pada data tuturan nomor (140) pada situasi 13 merupakan tuturan deklaratif karena memberikan informasi yang bersifat fakta. Adapun tuturan tersebut “*Pernah.*” Artinya saksi wanita mengakui pernah menerima uang dari terdakwa.

SW : “Tidak diperkenankan.” (141) (37:05)

Pada tuturan nomor (41) pada situasi 13 diutarakan oleh saksi wanita (SW) merupakan tuturan deklaratif karena merupakan tuturan yang berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan saksi kepada hakim “*Tidak diperkenankan.*” Saksi mengatakan tidak diperkanankan untuk mengutip.

Situasi [14] : Sidang diambil alih oleh Hakim anggota (1) dan memperjelas kembali maksud pertanyaanya. (Data ini berada di file 1 durasi 38.42-50.41)

SW : “Tidak.” (147) (38:53)

Pada tuturan nomor (147) dalam situasi 14 merupakan tuturan deklaratif karena memberikan informasi faktual. Adapun pernyataan yang menggambarkan

situasi faktual adalah “*Tidak.*” Artinya saksi mengatakan bahwa dirinya tidak ada catatan atas uang siswa yang diberikan terdakwa kepadanya.

SW : “Iya Pak terdakwa ini yang minta langsung kepada saya.” (150) (39:39)

Tuturan nomor (150) pada situasi 14 merupakan tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini ditunjukkan dari pernyataan saksi kepada hakim “*Iya Pak terdakwa ini yang minta langsung kepada saya.*” Artinya saksi mengatakan bahwa terdakwa pernah meminta uang kepada saksi.

SW : “Dia menggunakan Pak.” (153) (41:26)

Berdasarkan tuturan nomor (153) pada situasi 14 merupakan tuturan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini ditandai dari pernyataan saksi kepada hakim “*Dia menggunakan Pak.*” Artinya ada uang yang pernah diminta terdakwa kepada saksi.

SW : “Iya.” (154) (41:49)

Data tuturan nomor (154) pada situasi 14 merupakan tuturan deklaratif karena memberikan informasi yang faktual. Hal ini ditandai dengan pernyataan saksi kepada hakim “*Iya.*” Maksudnya uang diPakai untuk merehap kursi yang rusak.

SW : “Dana sekolah.” (156) (42:18)

Tuturan nomor (156) pada situasi 14 merupakan tuturan deklaratif yang memberikan informasi faktual. Adapun tuturan saksi tersebut adalah “*Dana sekolah.*” Maksudnya saksi mengatakan bahwa uang yang digunakan untuk merehap kursi berasal dari dana sekolah.

SW : “Dana oprasional sekolah.” (158) (42:51)

Tuturan nomor (158) situasi 14 merupakan tutuan deklaratif yang berfungsi memberikan informasi faktual. Hal ini dibuktikan dari sebuah pernyataan saksi kepada hakim “*Dana oprasional sekolah.*” Saksi mengatakan bahwa uang berasal dari dana operasional sekolah.

SW : “Dari Gubernur.” (159) (42:53)

Pada data tuturan yang diutarakan saksi wanita nomor (159) pada situasi 14 merupakan deklaratif karena memberikan informasi faktual. Hal ini ditunjukkan dari pernyataan saksi kepada hakim “*Dari Gubernur.*” Saksi mengatakan bahwa uang operasional sekolah bersumber dari gubernur.

SW : “Iya.” (160) (42:56)

Pada tuturan nomor (160) pada situasi 14 merupakan tuturan deklaratif karena memberikan infomasi faktual. Hal ini dapat dibuktikan dalam pernyataan saksi kepada hakim “*Iya.*” artinya uang tersebut diberikan kepada pihak sekolah untuk memenuhi kebutuhan di sekolah tersebut.

SW : “Tau.” (164) (44:39)

Data tuturan deklaratif nomor (164) pada situasi 14 merupakan tuturan deklaratif kerena memberikan informasi faktual. Hal ini ditandai dengan pernyataan saksi kepada hakim “*Tau.*” Artinya saksi mengakui bahwa dirinya mengetahui uang itu digunakan untuk membeli tanah hitam.

SW : “Saya tau Pak.” (165) (44:43)

Tuturan nomor (165) pada situasi 14 merupakan tuturan deklaratif karena memberikan informasi faktual. Hal ini dibuktikan dalam pernyataan saksi ke

hakim “*Saya tau Pak.*” Maksudnya saksi menegaskan kembali bahwa dirinya mengetahui bahwa uang itu digunakan untuk membeli tanah hitam.

SW : “Tau Pak.” (166) (44:51)

Pada tuturan nomor (166) pada situasi 14 merupakan tuturan deklaratif karena memberikan informasi faktual. Hal ini dibuktikan dari pernyataan saksi “*Tau Pak.*” Saksi untuk kedua kalinya menegaskan bahwa dirinya mengetahui uang yang digunakan untuk membeli tanah hitam.

SW : “28 September 2017.” (177) (48:12)

Tuturan nomor (177) merupakan tuturan deklaratif karena memberikan informasi faktual. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan saksi “*28 September 2017.*” Maksudnya saksi memberikan informasi bahwa dirinya menjadi pegawai pada tahun 2017.

SW : “2018 kejadian Juni.” (178) (48:37)

Pada tuturan nomor (178) pada situasi 14 merupakan tuturan deklaratif karena memberikan informasi yang sebenarnya. Hal ini dibuktikan dari pernyataan saksi kepada hakim “*2018 kejadian Juni.*” Artinya saksi memberikan informasi bahwa kejadian di bulan juni.

Situasi [15] Hakim Ketua mengambil alih untuk bertanya pada saat persidangan.

(Data ini berada file 1 durasi 50:41-53:55)

SW : “Tidak.” (183) (50:56)

Ketika saksi wanita menjawab pertanyaan hakim tuturan nomor (183) pada situasi 15 merupakan tuturan deklaratif karena memberikan informasi faktual. Hal ini ditandai dengan sebuah pernyataan dari saksi kepada hakim “*Tidak.*”

Maksudnya saksi mengatakan siswa tidak bisa masuk di sekolah itu apabila tidak ada surat rekomendasi pindah.

SW : “Saya, ada sebagian yang tidak saya tanda tangan.” (184) (51:01)

Pada tuturan nomor (184) yang terdapat pada situasi 15 merupakan tuturan deklaratif yang memberikan informasi yang sebenarnya kepada lawan bicara. “*Saya, ada sebagian yang tidak saya tanda tangan.*” Saksi mengatakan tidak ada mendantangani surat rekomendasi sebgaiian siswa.

SW : “Tidak.” (185) (51:14)

Data tuturan nomor (185) pada situasi 15 merupakan tuturan deklaratif karena memberikan informasi faktual terhadap lawan bicara. Hal ini ditandai dengan pernyataan saksi “*Tidak.*” artinya saksi menegaskan bahwa siswa tidak bisa terdaftar di sekolah itu apabila tidak ada surat rekomendasi.

SW : “Ya Bu .” (191) (52:17)

Pada tuturan nomor (191) pada situasi 15 merupakan tuturan deklaratif karena memberikan informasi faktual. Hal ini ditunjukkan dari pernyataan saksi kepada hakim “*Ya Bu .*” Artinya saksi mengatakan bahwa dirinya mempunyai daftar siswa.

2.2.1.2 Tuturan Deklaratif Dengan Maksud Menyatakan Keputusan Dan Penilaian.

Keputusan adalah proses memilih suatu jalur tindakan dari beberapa alternatif sedangkan penilaian adalah pendapat terhadap sesuatu bisa baik dan buruk.

No	Situasi	Nomor Data	File	Menit Ke	Tuturan
1	Situasi (2)	4	1	01:19	“Iya.”
2	Situasi (8)	87	1	16:26	“Takutnya tersinggung.”
3	Situasi (10)	107	1	27:47	“Tidak Bu .”
4	Situasi (10)	108	1	27:59	“Tetap.”
5	Situasi (10)	109	1	28:12	“Tidak Bu .”
6	Situasi (11)	110	1	29:32	“Iya.”

Situasi [2] : Hakim mempersilahkan kedua terdakwa yang diperiksa sebagai saksi untuk melakukan sumpah atas keterangan yang akan diberikan serta memberi intruksi untuk saksi pria yang terlebih dahulu diperiksa sementara saksi wanita dipersilahkan untuk duduk disebelah penasehat hukum. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 00:23-01:50)

SW : “Iya.” (4) (00:16)

Pada data tuturan nomor (4) dalam situasi 2 yang diutarakan saksi wanita (SW) mengandung tuturan deklaratif. Tuturan nomor (4) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat keputusan kepada lawan tuturnya “Iya.” Tuturan deklaratif yang benar ditandai dengan adanya keputusan saksi wanita (SW) kepada hakim untuk mau mendengarkan keterangan saksi pria (SP). Artinya saksi mengatakan sebuah keputusan untuk mendengarkan ketika tuturan tersebut tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan keputusan dan penilaian, maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

Situasi [8] : Pertanyaan diambil alih oleh hakim anggota untuk dilanjutkan sehingga kasus ini dapat dipertimbangkan dengan baik. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 14:06-20:37)

SP : “Takutnya tersinggung.” (87) (16:26)

Pada data tuturan nomor (87) pada situasi 8 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Karena bersifat penilaian kepada lawan tuturnya “*Takutnya tersinggung.*” Artinya saksi pria memberikan pandangan bahwa kepala sekolah tersinggung apabila diberitahukan mengutip adalah tidakan yang salah. Jika tuturan tersebut tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan keputusan dan penilaian, maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

Situasi [10] : Saat hakim memberi kesempatan kepada terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi terdakwa hanya menanggapi dan hakim terlihat kesal. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 24:39- 28:21)

SP : “Tidak Bu .” (Saksi terlihat sedih sekali matanya berkaca-kaca karena banyak tuduhan dari keterangan terdakwa yang ditujukan kepadanya) (107) (27:47)

Tuturan nomor (107) pada situasi 10 mengandung tuturan deklaratif. Karena bersifat keputusan kepada lawan tuturnya “*Tidak Bu .*” Artinya saksi pria menyatakan keputusan untuk tetap mempertahankan keterangannya. Jika tuturan tersebut tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan keputusan dan penilaian, maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SP : “Tetap.” (108) (27:59)

Berdasarkan tuturan nomor (108) pada situasi 10 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Karena bersifat keputusan kepada lawan tuturnya “*Tetap.*” Artinya saksi pria (SP) menegaskan lagi untuk tetap mempertahankan keterangan yang telah ia berikan. Jika tuturan tersebut tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan keputusan dan penilaian, maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SP : “Tidak Bu .” (109) (28:12)

Berdasarkan tuturan nomor (109) pada situasi 10 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Karena berfungsi mengatakan keputusan kepada lawan tuturnya “*Tidak Bu .*” Maksudnya saksi pria memilih tidak menambahkan keterangan karena dirinya merasa tidak ada berbeda keterangan beliau saat menjadi saksi dan menjadi terdakwa. Jika tuturan tersebut tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan keputusan dan penilaian, maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

Situasi [11] : Sidang ditunda 1 minggu dan selesai dilanjutkan dengan L terdakwa yang dimintai keterangan sebagai saksi selanjutnya. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 28:21-29:34)

SW : “Iya.” (110) (29.32)

Pada data tuturan nomor (110) pada situasi 11 yang diutarakan saksi wanita (SW) mengandung tuturan deklaratif. Karena bersifat keputusan kepada lawan tuturnya “*Iya.*” Artinya saksi pria (SP) memutuskan untuk menyimak keterangan saksi wanita (SW). Jika tuturan tersebut tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan keputusan dan penilaian, maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

2.2.1.3 Tuturan Deklaratif Dengan Maksud Menyatakan Perjanjian, Peringatan dan Nasehat.

Menyatakan perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat dua orang atau lebih terhadap suatu hal, peringatan adalah teguran, sedangkan nasehat adalah pesan yang sampaikan seseorang untuk mengubah suatu hal yang tidak baik menjadi lebih baik.

No	Situasi	Nomor Data	File	Menit Ke	Tuturan
1	Situasi (5)	22	1	5.56	“Saya dan kepala sekolah Bu .”

Situasi [5] :Penutup Umum mengakhiri pertanyaanya karena sudah merasa cukup dan sidang diambil alih oleh hakim ketua untuk meanjutkan pertanyaan. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 05:01-07:19)

SP : “Saya dan kepala sekolah Bu .” (22) (5.56)

Data tuturan nomor (22) pada situasi 5 terdapat tuturan deklaratif. Tuturan nomor (22) termasuk tuturan deklaratif karena bersifat menyatakan perjanjian kepada lawan tuturnya “*Saya dan kepala sekolah Bu.*” Maksudnya ada kesepakatan dari dua belah pihak dalam menentukan jumlah uang yang dikutip dari orang tua siswa. Jika tuturan tersebut tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan perjanjian, peringatan dan nasehat maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

2.2.1.4 Tuturan Deklaratif Dengan Maksud Menyatakan Ucapan Selamat Atas Suatu Keberhasilan Atau Ucapan Kemalangan.

Menyatakan ucapan terimakasih adalah ucapan rasa syukur terhadap keberhasilan orang lain. Sedangkan, ucapan kemalangan adalah menyampaikan turut prihatin terhadap hal buruk yang menimpa orang lain.

No	Situasi	Nomor Data	File	Menit Ke	Tuturan
1	Situasi (18)	195	2	14:23	“Maaf yang mulia saya merasa selama ini.”

Situasi [18] : Sidang diambil oleh oleh hakim anggota 2 (dua) untuk meminta keterangan terdakwa.

SW : “Maaf yang mulia saya merasa selama ini.” (195) (14:23)

Pada tuturan nomor (195) pada situasi 18 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (195) tersebut termasuk tuturan deklaratif karena bersifat menyatakan kemalangan lawan tuturnya *Maaf yang mulia saya merasa selama ini*. Tuturan deklaratif yang benar ditandai dengan adanya permintaan maaf kepada lawan tuturnya. Jika tuturan tersebut tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan perjanjian, peringatan dan nasehat maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

2.2.1.5 Tuturan Deklaratif Dengan Maksud Menyatakan Penjelasan dan Keterangan.

No	Situasi	Nomor Data	File	Menit Ke	Tuturan
1	Situasi (4)	11	1	03:17	“Uang tadi ditangan saya, inisiatif kepala sekolah Pak.”
2	Situasi (4)	13	1	04:13	“Tolong anak masuk membayar meja, kursi.”
3	Situasi (4)	14	1	04:30	“Di kantor.”
4	Situasi (5)	21	1	05:48	“Tak tentu, ada yang RP 1500.000.”
5	Situasi (5)	27	1	06:58	“Untuk seragam, meja dan kursi.”
6	Situasi (6)	29	1	07:20	“Kurang tau Bu saya cuma menjalankan apa kata kepala sekolah.”

No	Situasi	Nomor Data	File	Menit Ke	Tuturan
7	Situasi (6)	33	1	07:55	“Gak jauh dari sekolah itu.”
8	Situasi (6)	34	1	08:01	“Sekitar 2 kilo sampai 3 kilo.”
9	Situasi (6)	39	1	09:14	“Kalau saya perkiraan Rp 23600.000.”
10	Situasi (6)	40	1	09:28	“Rencana kepala sekolah saya serahkan dari uang koran.”
11	Situasi (7)	49	1	10:40	“Merehap kursi, meja.”
12	Situasi (7)	59	1	12:17	“Saya tidak tau Bu .”
13	Situasi (7)	62	1	12:37	“Mau diserahkan Bu .”
14	Situasi (7)	63	1	12:41	“Uang itu gunanya merehap meja dan kursi Bu jadi uang itu kepake.”
15	Situasi (7)	65	1	13:00	“Saya cuma belum keluar Bu makanya didahulukan.”
16	Situasi (7)	66	1	13:14	“Karena itu suruhan kepala sekolah Bu .”
17	Situasi (7)	67	1	13:22	“Ya kalau salah saya gak mau Bu .”
18	Situasi (8)	79	1	14:56	“Di kantin itu yang lama Pak.”
19	Situasi (8)	81	1	15:12	“Itu waktu Ibu r Pak.”

No	Situasi	Nomor Data	File	Menit Ke	Tuturan
20	Situasi (8)	83	1	15:41	“Saya tidak tau.”
21	Situasi (8)	84	1	15:47	“Tidak tau.”
22	Situasi (8)	85	1	15:53	“Biasa Pak, cuma kalau permintaan kepala sekolah baru saya apa.”
23	Situasi (9)	101	1	22:49	“Kalau biasanya harganya, biasa satu harganya.”
24	Situasi (1)	111	1	29:51	“Itu saya gak ingat.”
25	Situasi (13)	115	1	30:06	“Kemungkinan itu benarm karena saya tidak pernah menghitungnya.”
26	Situasi (13)	118	1	32:26	“Uang yang Rp 7000.000 saya terima itu, saya anggap itu uang yang dipinjam dia. Saya kembalikan ke dia lagi pada saat itu juga, kan dia bayar ni. Bu ada uang jadi misalnya ada Rp 7000.000 saya anggap hutang yang dipakainya.”
27	Situasi (13)	120	1	33:00	“Iya”
28	Situasi (13)	119	1	22:43	“Tetapi misalnya, iya silahkan membayar hutang pinjamanya. Dia membayar hutang dia diPakainya jadi uang oprasional dia.”

No	Situasi	Nomor Data	File	Menit Ke	Tuturan
29	Situasi (13)	128	1	33:44	“Sekolah kami yang lama tidak ada pungutan.”
30	Situasi (13)	129	1	33:53	“Saya tidak mungut cuma saya bilang.”
31	Situasi (13)	130	1	33:57	“Gak ada Bu , kami bahwa terdakwa ini hanya menyampaikan kepada orang tua agar menyiapkan Pakaian seragamnya yang tidak cocok. Karena sekolah kita itu Bu banyak rusak tidak layak dipakai lagi, jika ingin sekolah disini carilah kursi meja sementara sudah tanggal-tanggal semua.”
32	Situasi (13)	131	1	34:30	“Tapi saya gak ada uang.”
33	Situasi (13)	132	1	34:36	“Orang luar menyangka cuma gak.”
34	Situasi (13)	134	1	35:04	“Nah, saya itu Bu kalau ada yang mau bayar silahkan.”
35	Situasi (13)	135	1	34:47	“Iya Bu .”
36	Situasi (13)	136	1	35:48	“Iya.”

No	Situasi	Nomor Data	File	Menit Ke	Tuturan
37	Situasi (13)	137	1	36:14	Uang oprasioanl gak ada lagi kan Bu jadi, uang yang diPakai oleh terdakwa Rp.4000.000 yang saya tau yang lain gak tau lah Bu . Soalnya yang saya tau Rp 4000.000 itu yang pasti yang lain ada apa ndak.”
38	Situasi (13)	138	1	36:43	“Nah Rp 7000.000 itu saya gak tau karena saya nagasih-ngasih.”
39	Situasi (13)	139	1	36:48	“Gak ingat saya jumlahnya sampai Rp 7000.000.”
40	Situasi (13)	142	1	37:44	“Yang dilaporkan kepada saya Pak 10 (sepuluh) dan saya terkejut ko 17 (tujuh belas) karena yang lain.”
41	Situasi (13)	143	1	37:54	“Setau saya.”
42	Situasi (13)	144	1	38:04	“Pada saat siswa masuk kalau masih bisa silahkan, kalau tidak lebih dari 32 (tiga puluh dua) silahkan masuk.”
43	Situasi (13)	145	1	38:32	“Tidak ada karena itu urusannya suruh dia cari Pakaian sendiri.”
44	Situasi (14)	146	1	38:47	“Sebagian ada sebagian lagi tidak tau.”

No	Situasi	Nomor Data	File	Menit Ke	Tuturan
45	Situasi (14)	148	1	39:01	“Karena saya tidak ada minta uang hanya orang tua itu menyanggupi.”
46	Situasi (14)	149	1	39:17	“Selama ini tidak Pak, saya tidak minta uang Pak.”
47	Situasi (14)	151	1	41:21	“Kalau saya.”
48	Situasi (14)	152	1	41:26	“Kalau saya bertanggung jawab Pak memang harus.”
49	Situasi (14)	155	1	42:16	“Pak itu uang dana sekolah Rp 1000.000 itu.” (155) (42.16)
50	Situasi (14)	157	1	42:31	“Sekarang orang tua, minta tolong Pak saya gak ada menyuruh dia dan dia kerjakan dia itu mungkin atas berurusan dari orang tua langsung yang berhuBungan dengan dia.”
51	Situasi (14)	161	1	43:11	“Iya Pak, kenyataan saya disana lebih dari 50 (lima puluh) yang tidak layak Pakai lagi.”

No	Situasi	Nomor Data	File	Menit Ke	Tuturan
52	Situasi (14)	162	1	43:31	“Uang yang langsung dia berurusan dengan orang tua.”
53	Situasi (14)	163	1	44:37	“Saya tidak tau.”
54	Situasi (14)	167	1	44:54	“Uang mengerjakan kursi meja.”
55	Situasi (14)	168	1	44:15	“Karena orang tua siswa minta jadi dia.”
56	Situasi (14)	169	1	45:39	“Tidak.”
57	Situasi (14)	170	1	44:52	“Karena dia ambil Rp 4000.000 itu Pak.”
58	Situasi (14)	171	1	47:18	“Tidak.”
59	Situasi (14)	172	1	47:29	“Uang itu Pak dia bayar tapi dia sudah diPakai dulu.”
60	Situasi (14)	174	1	47:44	“Bendahara.”

No	Situasi	Nomor Data	File	Menit Ke	Tuturan
61	Situasi (14)	175	1	47:46	“Anggran.”
62	Situasi (14)	179	1	48:47	“Dia pribadi menggunakan.”
63	Situasi (14)	180	1	49:00	“Karena dia berjanji untuk mengerjakan, untuk perbaikan itu tidak cukup karena pada saat itu banyak sekali kursi yang tidak bisa dipakai karena.”
64	Situasi (14)	181	1	49:25	“Itu pun tidak cukup banyak sekali kursi yang tidak layak. Itulah yang terjadi di sekolah kami Pak.”
65	Situasi (14)	182	1	50:08	“Dia lapor bahwa penjahit tidak bisa menjahit lagi, saya kasih nomor handphone Bu kan orang itu langsung dibayar disitu. Ini nomor <i>handphonenya</i> bicarakanlah saya tidak ada ikut campur tangan sedikitpun.”

No	Situasi	Nomor Data	File	Menit Ke	Tuturan
66	Situasi (15)	186	1	51:29	“Taunya anak sudah ada diawal Bu .”
67	Situasi (15)	187	1	51:46	“Saya tidak terima Bu, begitu datang kursi baru ada anak tapi belum rekomendasi ke saya.”
68	Situasi (15)	189	1	52:03	“Karena dia tata usaha Bu .”
70	Situasi (15)	192	1	53:05	“Ternyata tidak ada Bu .”
71	Situasi (15)	193	1	53:9	“Seperti itu sudah terjadi Bu saya kan 17 (tujuh belas) panggil semua ketahuan disitu setau saya dia lapor sama saya ada 10 tau-tau 17 (tujuh belas).”
72	Situasi (18)	196	2	17:41	“Kalau hitungan itu Pak kan.”

Situasi [4] : Hakim meminta saksi untuk menggunakan *mikrofon* karena suara saksi kecil sehingga kurang jelas terdengar. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 02:41-05:01)

SP : “Uang tadi ditangan saya, inisiatif kepala sekolah Pak.” (11) (03:17)

Pada tuturan nomor (11) pada situasi 4 tersebut mengandung tuturan deklaratif. Tuturan nomor (11) bersifat memberikan penjelasan kepada lawan

tuturnya “*Uang tadi ditangan saya, inisiatif kepala sekolah Pak.*” Tuturan deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SP : “Tolong anak masuk membayar meja, kursi.” (13) (04:13)

Pada data tuturan nomor (13) pada situasi 4 tersebut terdapat tuturan deklaratif. Tuturan nomor (13) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan keterangan kepada lawan tuturnya “*Tolong anak masuk membayar meja, kursi.*” Tuturan deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan mengenai intruksi yang diberikan kepala sekolah dalam mengutip uang dari orang tua siswa. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SP : “Di kantor.” (14) (04:30)

Pada tuturan nomor (14) pada situasi 4 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (14) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan keterangan tempat kepada lawan tuturnya “*Di kantor.*” Tuturan deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan keterangan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

Situasi [5] : Penutup Umum mengakhiri pertanyaanya karena sudah merasa cukup dan sidang diambil alih oleh hakim ketua untuk meanjutkan pertanyaan. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 05:01-07:19)

SP : “Tak tentu, ada yang Rp 1500.000.” (21) (05:48)

Data tuturan nomor (21) pada situasi 5 mengandung tuturan deklaratif. Tuturan nomor (21) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Tak tentu, ada yang Rp 1500.000*” Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SP : “Untuk seragam, meja sama kursi Bu .” (27) (06:58)

Tuturan nomor (27) pada situasi 5 terjadi ketika saksi pria menjawab pertanyaan hakim yang mengandung tuturan deklaratif. Tuturan nomor (27) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan keterangan tujuan kepada lawan tuturnya “*Untuk seragam, meja sama kursi Bu .*” Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan menyatakan keterangan tempat kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

Situasi [6] : Saksi merasa sedih dan sangat menyesali perBu atanya karena menjalankan tugas yang salah atas permintaan kepala Sekolah. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 07:19-10:25)

SP : “Kurang tau Bu saya cuma menjalankan apa kata kepala sekolah.” (29) (07:20)

Pada data nomor (29) pada situasi 6 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (29) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Kurang tau Bu saya cuma menjalankan apa kata kepala sekolah.*” Tuturan deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SP : “Gak jauh dari sekolah itu” (33) (07:55)

Tuturan nomor (33) pada situasi 6 terdapat tuturan deklaratif. Tuturan nomor (33) tersebut merupakan tuturan deklaratif bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Gak jauh dari sekolah itu.*” Tuturan deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan mengenai lokasi tukang jahit kepada hakim. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SP : “Kalau saya perkiraan Rp 23600.000.” (39) (09:14)

Pada data tuturan nomor (39) pada situasi 6 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (39) tersebut merupakan tuturan deklaratif bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya mengenai jumlah uang yang telah dikutip dari wali murid “*Kalau saya perkiraan Rp 23600.000.*” Tuturan deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan

penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SP : “Rencana kepada sekolah saya serahkan dari uang koran.” (40) (09:28)

Tuturan nomor (40) pada situasi 6 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (40) tersebut merupakan tuturan deklaratif bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Rencana kepada sekolah saya serahkan dari uang koran*”. Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

Situasi [7] : Hakim mempertanyakan dan menghitung uang yang diperoleh dari orang tua siswa pindahan secara detail. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 10:25-14:06)

SP : “Merehap kursi, meja.” (49) (10.40)

Data tuturan nomor (49) pada situasi 7 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (49) tersebut merupakan tuturan deklaratif bersifat memberikan keterangan tujuan kepada lawan tuturnya “*Merehap kursi, meja*”. Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan keterangan tujuan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SP : “Saya tidak tahu Bu .” (59) (12:17)

Pada data tuturan nomor (59) pada situasi 7 terdapat tuturan deklaratif. Tuturan nomor (59) tersebut merupakan tuturan deklaratif bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Saya tidak tahu Bu*”. Tuturan deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada hakim bahwa dirinya tidak mengetahui peraturan mengenai tidak boleh meminta uang kepada siswa pindahan. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SP : “Mau diserahkan Bu .” (62) (12:37)

Tuturan nomor (62) pada situasi 7 mengandung tuturan deklaratif. Tuturan nomor (62) tersebut merupakan tuturan deklaratif bermaksud memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Mau diserahkan Bu .*” Tuturan deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada hakim bahwa akan menyerahkan uang kepada tukang jahit. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SP : “Uang itu gunanya untuk merehap meja dan kursi Bu jadi uang itu ke Pakai.” (63) (12:41)

Data nomor (63) pada situasi 7 mengandung tuturan deklaratif. Tuturan nomor (63) tersebut merupakan tuturan deklaratif bersifat memberikan keterangan tujuan kepada lawan tuturnya “*Uang itu gunanya untuk merehap meja dan kursi Bu jadi uang itu ke Pakai.*” Tuturan deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan keterangan tujuan kepada lawan tuturnya mengenai kegunaan uang yang dikutip dari orang tua siswa. Jika tidak terdiri dari tuturan

deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SP : “Saya cuma belum keluar Bu , makanya didahulukan.” (65) (13:00)

Tuturan nomor (65) pada situasi 7 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (65) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Saya cuma belum keluar Bu , makanya didahulukan.*” Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya bahwa uang anggaran sekolah pada saat itu belum keluar sehingga didahulukan dengan meminta uang kepada orang tua siswa. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SP : “Karena itu suruhan kepala sekolah Bu .” (66) (13:14)

Pada tuturan nomor (66) pada situasi 7 mengandung tuturan deklaratif. Tuturan nomor (66) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan keterangan sebab kepada lawan tuturnya “*Karena itu suruhan kepala sekolah Bu .*” Tuturan deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan keterangan kepada lawan tuturnya artinya saksi pria (SP) melakukan tindakan tersebut karena merupakan intruksi dari kepala sekolah. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SP : “Ya, kalau salah saya gak mau Bu .” (67) (13:22)

Tuturan nomor (67) pada situasi 7 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (67) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Ya, kalau salah saya gak mau Bu.*” Tuturan deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SP : “Di kantin itu yang lama Pak.” (79) (14:56)

Pada tuturan nomor (79) pada situasi 8 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (79) tersebut merupakan tuturan deklaratif bersifat memberikan keterangan tempat kepada lawan tuturnya “*Di kantin itu yang lama Pak*”. Tuturan deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan keterangan tempat kepada hakim. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SP : “Itu waktu libur Pak.” (81) (15.12)

Pada tuturan nomor (81) pada situasi 8 mengandung tuturan deklaratif. Tuturan nomor (81) tersebut merupakan tuturan deklaratif bermaksud memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Di kantin itu yang lama Pak*”. Tuturan deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SP : “Saya tidak tau.” (83) (15:41)

Data tuturan nomor (83) pada situasi 8 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (83) tersebut merupakan tuturan deklaratif bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Saya tidak tau*”. Tuturan deklaratif yang benar ditandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SP : “Tidak tau.” (84) (15:47)

Pada tuturan nomor (84) pada situasi 8 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (84) tersebut merupakan tuturan deklaratif bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Tidak tau*”. Tuturan deklaratif yang benar ditandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya bahwa saksi pria (SP) tidak mengetahui bahwa tindakan itu merugikan negara. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SP : “Biasa Pak, cuma kalau permintaan kepala sekolah baru saya apa.” (85) (15:53)

Data tuturan nomor (85) pada situasi 8 mengandung tuturan deklaratif. Tuturan nomor (85) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Biasa Pak, cuma kalau permintaan kepala sekolah baru saya apa*”. Tuturan deklaratif yang benar ditandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturannya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

Situasi [9] : Hakim ketua mengambil alih sidang dan mulai mengajukan pertanyaan kepada saksi. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 20:37-24:39)

SP : “Kalau biasanya harganya, biasa satu itu harganya” (pembicaraan langsung si potong hakim karena Bu kan itu yang hakim harapkan jawabanya) (101) (22:49)

Pada data nomor (101) pada situasi 9 tersebut mengandung tuturan deklaratif. Tuturan nomor (101) tersebut merupakan tuturan deklaratif bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Kalau biasanya harganya, biasa satu itu harganya*”. Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

Situasi [12] :Hakim mempersilahkan penuntut umum untuk terlebih dahulu bertanya kepada saksi. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 29:32-30:00)

SW : “Itu saya gak ingat.” (111) (29.51)

Tuturan nomor (111) pada situasi 12 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (111) tersebut merupakan tuturan deklaratif bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Itu saya gak ingat*”. Tuturan deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya bahwa saksi wanita tidak ingat berapa kali terdakwa memberikan uang kepadanya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

Situasi [13] : Hakim ketua meminta pertanyaanya merujuk pada kesaksian terdakwa sebagai saksi dari E. dan kemudian sidang diambil alih kembali kepada hakim ketua. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 30:05-38:42)

SW : “Kemungkinan itu benar, karena saya tidak pernah menghitungnya.” (115) (30:06)

Pada data tuturan nomor (115) pada situasi 13 terdapat tuturan deklaratif. Tuturan nomor (115) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Kemungkinan itu benar, karena saya tidak pernah menghitungnya.*” Tuturan deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Uang yang Rp 7000.000 saya terima itu, saya anggap itu uang yang dipinjam dia. Saya kembalikan ke dia lagi pada saat itu juga, kan dia bayar ni. Bu ada uang jadi misalnya ada Rp 7000.000 saya anggap hutang yang diPakainya.” (118) (32:26)

Data tuturan nomor (118) pada situasi 13 mengandung tuturan deklaratif. Tuturan nomor (118) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Uang yang Rp 7000.000 saya terima itu, saya anggap itu uang yang dipinjam dia. Saya kembalikan ke dia lagi pada saat itu juga, kan dia bayar ni. Bu ada uang jadi misalnya ada Rp 7000.000 saya anggap hutang yang diPakainya.*” Tuturan deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Tetapi misalnya, iya silahkan membayar hutang pinjamanya. Dia membayar hutang dia yang diPakainya jadi uang oprasional dia.” (119) (22:43)

Tuturan nomor (119) pada situasi 13 yang diutarakan saksi wanita (SW) mengandung tuturan deklaratif. Tuturan nomor (119) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Tetapi misalnya, iya silahkan membayar hutang pinjamanya. Dia membayar hutang dia yang diPakainya jadi uang oprasional dia*”. Tuturan deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Iya” (120) (33:00)

Pada tuturan nomor (120) pada situasi 13 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (120) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Iya*”. Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Sekolah kami yang lama tidak ada pungutan.” (128) (33:44)

Data tuturan nomor (128) pada situasi 13 mengandung tuturan deklaratif. Tuturan nomor (128) tersebut merupakan tuturan deklaratif bermaksud memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Sekolah kami yang lama tidak ada pungutan.*” Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya bahwa disekolah yang lama tidak pernah ada pungutan. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan

penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Saya tidak mungut cuma saya bilang.” (129) (33:53)

Tuturan nomor (129) pada situasi 13 terdapat tuturan deklaratif. Tuturan nomor (129) tersebut merupakan tuturan deklaratif bermaksud memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Saya tidak mungut cuma saya bilang.*” Tuturan deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan bahwa dirinya tidak melakukan hal yang salah kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Gak ada Bu , kami bahwa terdakwa ini hanya menyampaikan kepada orang tua agar menyiapkan Pakaian seragamnya yang tidak cocok. Karena sekolah kita itu Bu banyak rusak tidak layak diPakai lagi, jika ingin sekolah disini carilah kursi meja sementara sudah tanggal-tanggal semua.” (130) (33:57)

Pada tuturan nomor (130) pada situasi 13 yang diutarakan saksi wanita (SW) mengandung tuturan deklaratif. Tuturan nomor (130) tersebut merupakan tuturan deklaratif bermaksud memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Gak ada Bu , kami bahwa terdakwa ini hanya menyampaikan kepada orang tua agar menyiapkan Pakaian seragamnya yang tidak cocok. Karena sekolah kita itu Bu banyak rusak tidak layak diPakai lagi, jika ingin sekolah disini carilah kursi meja sementara sudah tanggal-tanggal semua.*” Tuturan deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Tapi saya gak ada uang.” (131) (34:30)

Tuturan nomor (131) pada situasi 13 terdapat tuturan deklaratif. Tuturan nomor (131) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Tapi saya gak ada uang*”. Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Orang luar menyangka cuma gak.” (132) (34:36)

Data tuturan nomor (132) pada situasi 13 mengandung tuturan deklaratif. Tuturan nomor (132) tersebut merupakan tuturan deklaratif bermaksud memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Orang luar menyangka cuma gak*”. Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Nah saya itu Bu kalau ada yang mau bayar silahkan.” (134) (35:04)

Pada tuturan nomor (134) pada situasi 13 yang diutarakan saksi wanita (SW) mengandung tuturan deklaratif. Tuturan nomor (134) tersebut merupakan tuturan deklaratif bermaksud memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Nah saya itu Bu kalau ada yang mau bayar silahkan.*” Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya mengenai tidak ada Paksaan jika hendak memberikan uang ke sekolah. Jika tidak

terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Iya Bu .” (135) (35:47)

Data tuturan nomor (135) pada situasi 13 terdapat tuturan deklaratif. Tuturan nomor (135) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Iya Bu .*” Tuturan deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Iya.” (136) (35:48)

Pada tuturan nomor (136) pada situasi 13 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (136) tersebut merupakan tuturan deklaratif bermaksud memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Iya*”. Tuturan deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Uang oprasioanl gak ada lagi kan Bu jadi, uang yang diPakai oleh terdakwa Rp.4000.000 yang saya tau yang lain gak tau lah Bu . Soalnya yang saya tau Rp 4000.000 itu yang pasti yang lain ada apa ndak.” (137) (36.14)

Berdasarkan tuturan nomor (137) pada situasi 13 mengandung tuturan deklaratif. Tuturan nomor (137) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Uang oprasioanl gak ada lagi kan Bu jadi, uang yang diPakai oleh terdakwa Rp.4000.000 yang saya tau yang lain gak tau lah Bu . Soalnya yang saya tau Rp 4000.000 itu yang pasti*

yang lain ada apa ndak.” Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Nah Rp 7000.000 itu saya gak tau karena saya nagasih-ngasih.” (138) (36:43)

Data tuturan nomor (138) pada situasi 13 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (138) tersebut merupakan tuturan deklaratif yang bermaksud memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Nah Rp 7000.000 itu saya gak tau karena saya nagasih-ngasih*”. Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Yang dilaporkan kepada saya Pak 10 (sepuluh) dan saya terkejut ko 17 (tujuh belas) karena yang lain.” (142) (37.44)

Tuturan nomor (142) pada situasi 13 terdapat tuturan deklaratif. Tuturan nomor (142) tersebut merupakan tuturan deklaratif yang bermaksud memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Yang dilaporkan kepada saya Pak 10 (sepuluh) dan saya terkejut ko 17 (tujuh belas) karena yang lain.*” Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya mengenai ada tambahan siswa yang tidak terdaftar di sekolah tersebut. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Setau saya.” (143) (37:34)

Pada tuturan nomor (143) pada situasi 13 mengandung tuturan deklaratif. Tuturan nomor (143) tersebut merupakan tuturan deklaratif yang bermaksud memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Setau saya.*” Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Pada saat siswa masuk kalau masih bisa silahkan, kalau tidak lebih dari 32 (tiga puluh dua) silahkan masuk.” (144) (38:04)

Berdasarkan tuturan nomor (144) pada situasi 13 mengandung tuturan deklaratif. Tuturan nomor (144) tersebut merupakan tuturan deklaratif yang bermaksud memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Pada saat siswa masuk kalau masih bisa silahkan, kalau tidak lebih dari 32 (tiga puluh dua) silahkan masuk.*” Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Tidak ada karena itu urusannya suruh dia cari Pakaian sendiri.” (145) (38:32)

Data tuturan nomor (145) pada situasi 13 yang diutarakan saksi wanita (SW) mengandung tuturan deklaratif. Tuturan nomor (145) tersebut merupakan tuturan deklaratif yang bermaksud memberikan keterangan sebab kepada lawan tuturnya “*Tidak ada karena itu urusannya suruh dia cari Pakaian sendiri*”. Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan

keterangan sebab kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

Situasi [14] : Sidang diambil alih oleh Hakim anggota (1) dan memperjelas kembali maksud pertanyaanya. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 38:42-50:41)

SW : “Sebagian ada sebagian lagi tidak tau.” (146) (38.47)

Tuturan nomor (146) pada situasi 14 terdapat tuturan deklaratif. Tuturan nomor (146) tersebut merupakan tuturan deklaratif yang bermaksud memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Sebagian ada sebagian lagi tidak tau.*” Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Karena saya tidak ada minta uang hanya orang tua itu menyanggupi.” (148) (39:01)

Pada tuturan nomor (148) pada situasi 14 yang diutarakan oleh saksi wanita (SW) termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (148) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan keterangan sebab kepada lawan tuturnya “*Karena saya tidak ada minta uang hanya orang tua itu menyanggupi*”. Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan keterangan sebab kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Selama ini tidak Pak, saya tidak minta uang Pak.” (149) (39:17)

Pada data tuturan nomor (149) pada situasi 14 terdapat tuturan deklaratif. Tuturan nomor (149) tersebut merupakan tuturan deklaratif yang bermaksud memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Selama ini tidak Pak, saya tidak minta uang Pak.*” Tuturan deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Kalau saya.” (151) (41:21)

Berdasarkan tuturan nomor (151) pada situasi 14 mengandung tuturan deklaratif. Tuturan nomor (151) tersebut merupakan tuturan deklaratif yang bermaksud memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Kalau saya.*” Tuturan deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Dia menggunakan Pak.” (153) (41:26)

Pada tuturan nomor (153) pada situasi 14 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (153) tersebut merupakan tuturan deklaratif yang bermaksud memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Dia menggunakan Pak.*”. Tuturan deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya artinya saksi wanita (SP) yang menggunakan uang tersebut adalah terdakwa. Jika tidak terdiri dari tuturan

deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Pak itu uang dana sekolah Rp 1000.000 itu.” (155) (42:16)

Data tuturan nomor (155) pada situasi 14 mengandung tuturan deklaratif. Tuturan nomor (155) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Pak itu uang dana sekolah Rp 1000.000 itu.*” Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Iya Pak, kenyataan saya disana lebih dari 50 (lima puluh) yang tidak layak Pakai lagi.” (161) (43:11)

Pada tuturan nomor (161) pada situasi 14 mengandung tuturan deklaratif. Tuturan nomor (161) tersebut merupakan tuturan deklaratif yang bermaksud memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Iya Pak, kenyataan saya disana lebih dari 50 (lima puluh) yang tidak layak Pakai lagi.*” Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Uang yang langsung dia berurusan dengan orang tua.” (162) (43:31)

Tuturan nomor (162) pada situasi 14 mengandung tuturan deklaratif. Tuturan nomor (162) tersebut merupakan tuturan deklaratif yang bermaksud memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Uang yang langsung dia berurusan dengan orang tua*”. Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan

adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Saya tau, uang yang dikasihnya saya kasihkan ke dia lagi Pak.” (163) (44:37)

Pada data tuturan nomor (163) pada situasi 14 mengandung tuturan deklaratif. Tuturan nomor (163) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Saya tau, uang yang dikasihnya saya kasihkan ke dia lagi Pak.*” Tuturan deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Uang dari mengerjakan kursi meja.”(167) (44:54)

Berdasarkan tuturan nomor (167) pada situasi 14 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (167) tersebut merupakan tuturan deklaratif yang bermaksud memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Uang dari mengerjakan kursi meja*”. Tuturan deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan mengenai sumber uang kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Karena orang tua siswa minta jadi dia.” (168) (44:15)

Berdasarkan tuturan nomor (168) pada situasi 14 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (168) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan keterangan sebab kepada lawan tuturnya “*Karena orang tua*

siswa minta jadi dia.” Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan keterangan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Tidak.” (169) (45:39)

Pada data tuturan nomor (169) pada situasi 14 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (169) tersebut merupakan tuturan deklaratif yang bermaksud memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Tidak.*” Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Karena dia ambil Rp 4000.000 itu Pak.” (170) (44:52)

Pada tuturan nomor (170) pada situasi 14 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (170) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan keterangan sebab kepada lawan tuturnya “*Karena dia ambil Rp 4000.000 itu Pak*”. Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan keterangan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Tidak.” (171) (47:18)

Data tuturan nomor (171) pada situasi 14 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (171) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena

bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Tidak.*” Tuturan deklaratif yang benar ditandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Uang itu Pak dia bayar tapi dia sudah dipakai dulu.” (172) (47.29)

Tuturan nomor (172) pada situasi 14 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (172) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Uang itu Pak dia bayar tapi dia sudah dipakai dulu*”. Tuturan deklaratif yang benar ditandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Bendahara.” (174) (47.44)

Pada tuturan nomor (174) pada situasi 14 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (174) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan keterangan pelaku kepada lawan tuturnya “*Bendahara*”. Tuturan deklaratif yang benar ditandai dengan adanya tindakan memberikan keterangan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Anggran.” (175) (47:46)

Tuturan nomor (175) pada situasi 14 yang diutarakan saksi wanita (SW) termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (175) tersebut merupakan tuturan deklaratif yang bermaksud memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “Anggran”. Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan pejelasan mengenai sumber uang kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Karena dia berjanji untuk mengerjakan, untuk perbaikan itupu tidak cukup karena pada saat itu banyak sekali kursi yang tidak bisa diPakai karena.” (180) (47:00)

Tuturan nomor (180) pada situasi 14 terdapat tuturan deklaratif. Tuturan nomor (180) tersebut merupakan tuturan deklaratif yang bermaksud memberikan keterangan sebab kepada lawan tuturnya “*Karena dia berjanji untuk mengerjakan, untuk perbaikan itupu tidak cukup karena pada saat itu banyak sekali kursi yang tidak bisa diPakai karena.*” Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan keterangan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Itu pun tidak cukup banyak sekali kursi yang tidak layak. Itulah yang terjadi di sekolah kami Pak.” (181) (49:25)

Berdasarkan tuturan nomor (181) pada situasi 14 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (181) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Itu pun tidak cukup banyak sekali kursi yang tidak layak. Itulah yang terjadi di sekolah kami Pak*”. Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan

penjelasan kepada lawan tuturnya mengenai kondisi sekolahnya yang banyak kursi yang rusak. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Dia lapor bahwa penjahit tidak bisa menjahit lagi, saya kasih nomor handphone bukan orang itu langsung dibayar disitu. Ini nomor handphonenya bicarakanlah saya tidak ada ikut campur tangan sedikitpun.” (182) (50:08)

Tuturan nomor (182) pada situasi 14 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (182) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Dia lapor bahwa penjahit tidak bisa menjahit lagi, saya kasih nomor handphone Bu kan orang itu langsung dibayar disitu. Ini nomor handphonenya bicarakanlah saya tidak ada ikut campur tangan sedikitpun.*” Tuturan deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

Situasi [15] Hakim Ketua mengambil alih untuk bertanya pada saat persidangan. (data ini berada di dalam file 1 durasi 50:41-53:55)

SW : “Taunya anak sudah ada diawal Bu .” (186) (51.29)

Berdasarkan tuturan nomor (186) pada situasi 15 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (186) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Taunya anak sudah ada diawal Bu .*” Tuturan deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan

memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya mengenai adanya siswa tambahan berjumlah 7 orang yang tidak diketahuinya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Saya tidak terima Bu , begitu datang kursi baru ada anak tapi belum rekomendasi ke saya.” (187) (51:46)

Data tuturan nomor (187) pada situasi 15 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (187) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Saya tidak terima Bu , begitu datang kursi baru ada anak tapi belum rekomendasi ke saya.*” Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya mengenai tidak menerikma siswa yang tidak terdaftar melalui dirinya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Karena dia tata usaha Bu .” (189) (52.03)

Berdasarkan tuturan nomor (189) pada situasi 15 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (189) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan keterangan sebab kepada lawan tuturnya “*Karena dia tata usaha Bu* ”. Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan keterangan sebab kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Ternyata tidak ada Bu .” (192) (53:05)

Data tuturan nomor (192) pada situasi 15 tersebut termasuk tuturan deklaratif. Tuturan nomor (192) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Ternyata tidak ada Bu .*” Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya mengenai tidak ada surat rekomendasi pindah yang diterima di sekolah tersebut terhadap beberapa siswa pindahan. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Seperti itu sudah terjadi Bu saya kan 17 (tujuh belas) panggil semua ketahuan disitu setau saya dia lapor sama saya ada 10 tau-tau 17 (tujuh belas).” (193) (53:33)

Pada data tuturan nomor (193) pada situasi 15 mengandung tuturan deklaratif. Tuturan nomor (193) tersebut merupakan tuturan deklaratif yang bermaksud memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Seperti itu sudah terjadi Bu saya kan 17 (tujuh belas) panggil semua ketahuan disitu setau saya dia lapor sama saya ada 10 tau-tau 17 (tujuh belas).*” Tuturan deklaratif yan benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

SW : “Kalau hitungan itu Pak kan.” (196) (17.41)

Tuturan nomor (196) pada situasi 18 terdapat tuturan deklaratif. Tuturan nomor (196) tersebut merupakan tuturan deklaratif karena bersifat memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya “*Kalau hitungan itu Pak kan*”. Tuturan

deklaratif yang benar di tandai dengan adanya tindakan memberikan penjelasan kepada lawan tuturnya. Jika tidak terdiri dari tuturan deklaratif yang menyatakan penjelasan dan keterangan maka tuturan tersebut dapat dikatakan salah karena tidak sesuai teori.

Tabel 01. Rekapitulasi Tuturan Deklaratif Saksi Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru

No	Bentuk Tuturan Deklaratif	Nomor Tuturan	Jumlah Tuturan
1	Menyampaikan informasi faktual.	1, 2, 3, 5, 6, 7,8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 112, 113, 114, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 139, 140,141, 147, 150, 153, 154, 156,158, 159, 160, 164, 165, 166, 176, 177, 178, 183, 185, 188,190,191,194.	116
2	Menyatakan keputusan dan penilaian.	4, 87, 107, 108, 109, 110.	6
3	Menyatakan perjanjian, peringatan, dan nasihat.	22.	1
4	Menyatakan ucapan selamat atas suatu keberhasilan atau ucapan kemalangan	194.	1

5	Memberikan penjelasan, keterangan.	11, 13, 14, 21, 27, 29, 33, 34, 39, 40, 49, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 79, 81, 83, 84, 85, 101, 111, 115, 118, 119, 120, 128,129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 151, 152, 155, 157, 161, 162, 163, 167, 168, 169, 170,171, 172, 173, 174, 175, 179 180, 181, 182, 186, 187, 189, 192, 193, 196.	72
	Jumlah	196	196

2.2.2 Prinsip Kerja Sama Yang Memenuhi Maksim Tuturan Deklaratif Saksi

Dalam Bahasa Persidangan Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru.

Berdasarkan data yan telah penulis peroleh tentang tuturan deklaratif saksi memberikan informasi faktual, maka dari data tersebut penulis menganalisis sesuai dengan prinsip kerja sama yang dikemukakan oleh Grice dalam I Dewa Putu Wijana yang mencakup empat maksim yaitu maksim kauntitas, maksim kualitas, maksim relevansi, makasim pelaksanaan/cara.

2.2.2.1 Maksim Kuantitas

Maksim kuantias adalah maksim yang menghendaki lawan bicara memberikan informasi yang secukupnya dan tidak berlebihan.

Situasi [1] : Hakim membuka sidang pukul 09.00 Wib dan menanyakan kesehatan kedua terdakwa yang diperiksa sebagai saksi pada kasus tindak pidana korupsi. (Data ini berada di file 1 durasi 00:00 - 00:23)

HK : “Sehat para terdakwa?”

SP : “Sehat.” (1) (00:07)

Percakapan di atas menurut teori prinsip kerja sama dapat dikatakan telah memenuhi maksim kuantitas karena dalam tuturan tersebut, saksi pria telah memberikan kontribusi secukupnya tidak berlebihan “*Sehat.*” Tuturan saksi pria adalah jawaban yang diharapkan oleh hakim yang langsung dapat disimpulkan bahwa saksi pria dalam kondisi kesehatan yang baik dan siap memberikan keterangan di persidangan. Tanpa melalui proses pemahaman, karena jawaban tersebut tidak panjang lebar, selanjutnya di bawah ini yang masih termasuk ke dalam maksim kuantitas.

HK : “Sehat para terdakwa?”
SP : “Sehat.” (2) (00:07)

Dituturkan oleh seorang saksi wanita (SP) dalam tuturan nomor (2) pada situasi 1 dianggap tuturan yang memenuhi maksim kuantitas, karena saksi wanita dalam (2) memberikan jawaban yang secukupnya, tidak berlebihan “*Sehat.*” Artinya, saksi pria memberikan informasi bahwa dirinya siap memberikan keterangan di persidangan karena tidak dalam keadaan sakit. Dengan inilah SW dalam (2) dianggap kooperatif, yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HK : “Sesuai berita acara hari ini mendengarkan kesaksian Saudara
Saudara R. Silahkan duduk sebagai saksi ya sehat?”
SW : “Sehat.” (3) (00:16)

Dalam percakapan di atas tampak SW (saksi wanita) karena memberikan kontribusi secukupnya “*Sehat.*” Tidak berlebihan, dengan inilah tuturan SP dalam (3) dianggap kooperatif artinya hakim dapat menyimpulkan bahwa saksi pria

dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan hal ini sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

Situasi [2] : Hakim mempersilahkan kedua terdakwa yang diperiksa sebagai saksi untuk melakukan sumpah atas keterangan yang akan diberikan serta memberi intruksi untuk saksi pria yang terlebih dahulu diperiksa sementara saksi wanita dipersilahkan untuk duduk disebelah penasehat hukum. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 00:23-01:50)

HK : “Baik Saudara silahkan duduk disamping pengacara, kita mendengarkan Z sebagai saksi ya baik!”

SP : “Iya.” (4) (00:16)

Dialog di atas adalah percakapan antara saksi pria (SP) dan hakim ketua (HK) dalam tuturan SP nomor (4) pada situasi 2 terlihat jawaban saksi pria telah memenuhi maksim kuantitas karena memberikan kontribusi secukupnya, tidak berlebihan hal ini ditunjukkan dari respon saksi pria terhadap hakim “*Iya.*” dapat disimpulkan dengan mudah oleh hakim ketua. Oleh kerena itu, tuturan SP dalam (4) dianggap kooperatif, yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HK : “Saudara sebelumnya sudah punya keterangan penyelidikan sebelum mengikuti berita acara?”

SP : “Sudah.” (5) (01:24)

Dituturkan oleh seorang saksi pria dalam tuturan SP kepada hakim ketua pada situasi 2 terlihat jawaban saksi pria telah memenuhi maksim kuantitas karena memberikan kontribusi secukupnya, tidak berlebihan hal ini ditunjukkan dari respon saksi pria (SP) terhadap hakim ketua “*Sudah.*” Dengan inilah tuturan SP dalam (5) dianggap kooperatif, yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

- HK : “Dalam Pemeriksaan Saudara ada ditekan atau diancam diancam?”
SP : “Tidak Bu .” (6) (01:34)

Dituturkan oleh seorang saksi pria (SP) pada situasi 2 terlihat jawaban saksi pria telah memenuhi maksim kuantitas karena memberikan kontribusi secukupnya, tidak berlebihan “*Tidak Bu.*” Sehingga dapat disimpulkan dengan mudah oleh hakim ketua bahwa saksi pria tidak di bawah tekanan saat memberikan kesaksian, dengan inilah tuturan SP dalam (6) dianggap kooperatif, yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

- HK : “Maksudnya intisari yang Saudara terangkan pada penyidik masih Saudara ingat?”
SP : “Masih Bu .” (8) (01:48)

Data tuturan pada situasi 2 terlihat jawaban saksi pria telah memenuhi maksim kuantitas karena memberikan kontribusi secukupnya “*Masih Bu.*” Tidak berlebihan, dan dapat disimpulkan dengan mudah oleh hakim ketua bahwa saksi masih ingat apa yang dijelaskan ketika memberikan keterangan kepada penyidik. Dengan inilah tuturan SP dalam (8) dianggap kooperatif. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

Situasi [15] Hakim Ketua mengambil alih untuk bertanya pada saat persidangan. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 50:41-53:55)

- HK : “Sudah jadi pegawai tetap?”
SP : “Belum.” (18) (05:10)

Tuturan saksi pria (selanjutnya akan disingkat sebagai SP dalam tuturan SP (18) pada situasi 5 terlihat jawaban saksi pria telah memenuhi maksim kuantitas karena memberikan kontribusi secukupnya, tidak berlebihan hal ini dibuktikan pada pernyataan “*Belum.*” Tuturan tersebut langsung dapat dipahami oleh hakim

ketua bahwa saksi pria (SP) belum menjadi pegawai tetap di sekolah tersebut. Dengan inilah tuturan SP dalam (18) dianggap kooperatif, yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HK : “Makanya jadi, ketika ada pindah Saudara langsung berkoordinasi dengan kepala sekolah?”

SP : “Iya.” (23) (06:05)

Tuturan saksi pria (SP) dalam tuturan nomor 23 pada situasi 5 terlihat jawaban saksi pria (SP) telah memenuhi maksim kuantitas karena memberikan kontribusi secukupnya, tidak berlebihan. Hal tersebut ditunjukkan dalam pernyataan “*Iya.*” Artinya saksi pria mengakui bahwa dirinya melakukan koordinasi kepada kepala sekolah ketika ada siswa pindahan. Dengan inilah tuturan SP dalam (20) dianggap kooperatif, yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HK : “Bu kan, menetapkan langsung sekian ya?”

SP : “Bu kan.” (24) (06:07)

Percakapan di atas telah memenuhi maksim kuantitas karena memberikan kontribusi secukupnya, tidak berlebihan. Hal ini dapat dibuktikan pada pernyataan saksi pria “*Bu kan.*” Tuturan ini dapat disimpulkan oleh hakim ketua artinya saksi (SP) tidak menetapkan jumlah uang kepada orang tua siswa. Dengan inilah tuturan SP dalam (24) dianggap kooperatif, yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

Situasi [6] : Saksi merasa sedih dan sangat menyesali perbuatannya karena menjalankan tugas yang salah karena permintaan Kepala Sekolah. (Data ini berada di file 1 durasi 07:19-10:25)

HK : “Baik, itu seragamnya berapa pasang?”

SP : “3 (tiga) stel Bu .” (31) (07:27)

Tuturan saksi pria (selanjutnya akan disingkat sebagai SP dalam tuturan SP) (31) pada situasi 6 terlihat jawaban saksi pria telah memenuhi maksim kuantitas karena memberikan kontribusi secukupnya, tidak berlebihan. Hal ini terbukti pada pernyataan saksi pria di dalam persidangan “3 (tiga) stel Bu.” Jawaban yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan oleh hakim ketua. Artinya, saksi pria (SP) memberitahukan bahwa jumlah seragam ada 3 stel. Dengan inilah tuturan SP dalam (31) dianggap kooperatif, yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HK : “Terus untuk seragam itu kan, apakah Saudara yang menerapkan baju seragam atau bagaimana?”

SP : “Tidak Bu , di tukang jahit.” (32) (07:41)

Tuturan saksi pria (SP) dalam tuturan SP (32) pada situasi 6 terlihat jawaban saksi pria telah memenuhi maksim kuantitas karena memberikan kontribusi secukupnya, tidak berlebihan. Hal ini terbukti pada pernyataan saksi pria di dalam persidangan “Tidak Bu, ditukang jahit.” Jawaban yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan oleh hakim ketua. Artinya, saksi pria (SP) memberitahukan bahwa tukang jahitlah yang mengerjakan seragam siswa pindahan. Dengan inilah tuturan SP dalam (32) dianggap kooperatif, yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HK : “Dari 17 orang, dari 17 itu berapa jumlah keseluruhan uang yang Saudara minta jumlahnya?”

SP : “Kalau saya perkirakan Rp 23600.000.” (39) (09:14)

Tuturan saksi pria (Selanjutnya akan disingkat sebagai SP) dalam tuturan SP nomor (39) pada situasi 6 terlihat jawaban saksi pria telah memenuhi maksim

kuantitas karena memberikan kontribusi secukupnya, tidak berlebihan. “*Kalau saya perkiraan Rp 23600.000.*” Jawaban yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan hakim ketua. Artinya saksi pria (SP) memberitahukan bahwa jumlah uang yang dikutip dari orang tua siswa sejumlah Rp 23600.000. Dengan inilah tuturan SP dalam (39) dianggap kooperatif, yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HK : “Siapa yang bayar, Saudara?”
SP : “Iya Bu saya” (41) (09:43)

Tuturan saksi pria (Selanjutnya akan disingkat sebagai SP) dalam tuturan SP nomor (41) pada situasi 6 terlihat jawaban saksi pria telah memenuhi maksim kuantitas karena memberikan kontribusi secukupnya, tidak berlebihan. “*Iya Bu saya*” Jawaban yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan hakim ketua. Artinya saksi pria (SP) memberitahukan bahwa saksi sendirilah yang membayar uang ke tukang jahit. Dengan inilah tuturan SP dalam (41) dianggap kooperatif, yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HK : “Yang saya tanyakan kan ada 17 (tujuh belas) siswa yang uang dikumpul 10 (sepuluh) berapa jumlah uang yang anda serahkan ke tukang jahit?” (Mengulangi pertanyaanya)
SP : “Tidak ada Bu ” (42) (09:54)

Pada data di atas menurut teori prinsip kerja sama tuturan saksi pria (SP) telah memenuhi maksim kuantitas karena, jawaban saksi pria telah memenuhi maksim kuantitas yaitu memberikan kontribusi secukupnya “*Tidak ada Bu .*” Hal ini tidak berlebihan dengan inilah tuturan SP dalam (42) dianggap kooperatif, yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HK : “Sama siapa?”

SP : “Sama saya juga.” (46) (10:20)

Tuturan saksi pria (selanjutnya akan disingkat sebagai SP) dalam tuturan SP nomor (46) pada situasi 6 terlihat jawaban saksi pria telah memenuhi maksim kuantitas karena memberikan kontribusi secukupnya, tidak berlebihan. Dengan inilah tuturan SP dalam (46) “*Sama saya juga.*” Dianggap kooperatif, yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HK : “Tapi belum ada anda setor ya?”

SP : “Belum.” (47) (10.24)

Tuturan saksi pria (Selanjutnya akan disingkat sebagai SP) dalam tuturan SP nomor 47 pada situasi 6 terlihat jawaban saksi pria telah memenuhi maksim kuantitas pada pernyataan “*Belum.*” karena memberikan kontribusi secukupnya, tidak berlebihan. Artinya jawaban yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan hakim ketua serta mudah dipahami. Dari tuturan tersebut jelas saksi pria memberitahukan bahwa belum menyetor uang kepada tukang jahit. Dengan inilah tuturan SP dalam (47) dianggap kooperatif. yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

Situasi [7] : Hakim mempertanyakan dan menghitung uang yang diperoleh dari orang tua siswa pindahan secara detail. (Data ini berada di file 1 durasi 10:25-14:06)

HK : “Baik, itu Rp 23600.000 dari uang itu berapa banyak Saudara serahkan ke terdakwa ini?”

SP : “Rp 7600.000 Bu .” (48) (10.34)

Tuturan saksi pria (Selanjutnya akan disingkat sebagai SP dalam tuturan SP (48) pada situasi 7 terlihat jawaban saksi pria “*Rp 7600.000 Bu .*” telah memenuhi maksim kuantitas karena memberikan kontribusi secukupnya, tidak berlebihan. Artinya saksi pria memberikan informasi mengenai jumlah uang yang

serahkan kepada terdakwa. Dengan inilah tuturan SP dalam (48) dianggap kooperatif, yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HK : “Merehapi kursi ada berapa?”
SP : “Rp 10.000.000 lebih lah Bu .” (50) (10:44)

Tuturan saksi pria (SP) dalam tuturan SP (50) pada situasi 7 terlihat jawaban saksi pria telah memenuhi maksim kuantitas karena memberikan kontribusi secukupnya, dan tidak berlebihan. Hal ini dibuktikan dalam pernyataan saksi “*Rp 10.000.000 lebih lah Bu .*” Jawaban yang diberikan saksi sesuai dengan yang diharapkan oleh hakim ketua karena mudah dipahami. Dengan inilah tuturan SP dalam (50) dianggap kooperatif, yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HK : “Untuk apa itu?” (Hakim kaget saat mendengar saksi mengatakan tanah hitam)
SP : “Untuk Bu nga.” (53) (11:23)

Tuturan saksi pria (Selanjutnya akan disingkat sebagai SP) dalam tuturan SP (53) pada situasi 7 terlihat jawaban saksi pria telah memenuhi maksim kuantitas karena memberikan kontribusi secukupnya “*Untuk bunga.*” Jawaban ini tidak berlebihan, dan mudah dipahami oleh hakim ketua. Artinya, saksi memberitahukan bahwa membeli tanah hitam untuk bunga sekolah. Dengan inilah tuturan SP dalam (53) dianggap kooperatif, yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HK : “Oh, kompos Rp 500.000, Rp 19500.000 sisanya?”
SP : “Sisanya Rp 2000.000 saya ambil Bu .” (54) (11:35)

Tuturan saksi pria (SP) dalam tuturan SP (54) pada situasi 7 terlihat jawaban saksi pria telah memenuhi maksim kuantitas karena memberikan kontribusi secukupnya, dan tidak berlebihan. Dalam sebuah pernyataan “*Sisanya Rp 2000.000 saya ambil Bu .*” Artinya jawaban yang diberikan saksi sesuai dengan yang diharapkan hakim ketua, karena mudah dipahami. Dengan inilah tuturan SP dalam (54) dianggap kooperatif, yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HK : “Baru Rp 21500.000. Rp 1500.000 lagi?”
SP : “Beli rokok kawan-kawan kerja.” (55) (11:44)

Percakapan di atas terlihat jawaban saksi pria telah memenuhi maksim kuantitas karena memberikan kontribusi secukupnya, tidak berlebihan. Hal ini dapat dibuktikan dalam pernyataan saksi terhadap hakim “*Beli rokok kawan-kawan kerja.*” Dengan inilah tuturan SP dalam (55) dianggap kooperatif, yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HK : “Saudara sudah lama jadi tata usaha di situ?”
S : “Sudah Bu .” (58) (12:09)

Tuturan saksi pria (Selanjutnya akan disingkat sebagai SP) dalam tuturan SP nomor (58) pada situasi 7 terlihat jawaban saksi pria telah memenuhi maksim kuantitas karena memberikan kontribusi secukupnya, tidak berlebihan “*Sudah Bu .*” Artinya saksi pria mengatakan bahwa dirinya sudah lama menjadi tata usaha di sekolah tersebut. Tuturan saksi pria (SP) adalah jawaban yang diharapkan hakim ketua yang langung dapat disimpulkan oleh hakim tanpa proses pemahaman. Sehingga dianggap kooperatif, yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

- HK : “Salah, gak ada peraturanya kan, terus kenapa anda lakukan takut Saudara dipecat?”
SP : “Iya Bu .” (68) (13:30)

Percakapan menurut teori prinsip kerja sama saksi pria (Selanjutnya akan disingkat sebagai SP) dalam tuturan SP nomor (68) pada situasi 7 terlihat jawaban saksi pria telah memenuhi maksim kuantitas karena memberikan kontribusi secukupnya, tidak berlebihan hal ini terlihat dari pernyataan saksi “*Iya Bu .*” Dengan inilah tuturan SP dalam (68) dianggap kooperatif, yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

- HK : “Bu kan terdakwa ini kan?”
SP : “Bu kan Bu .” (71) (13:43)

Tuturan saksi pria (Selanjutnya akan disingkat sebagai SP dalam tuturan SP (71) pada situasi 7 terlihat jawaban saksi pria telah memenuhi maksim kuantitas karena memberikan kontribusi secukupnya, tidak berlebihan pada pernyataan saksi pria kepada hakim “*Bu kan Bu .*” Sehingga tuturan SP nomor (71) dianggap kooperatif, yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

- HK : “Oh begitu, Saudara honor dari ini kan, dari dinas?”
SP : “Iya.” (73) (13:57)

Tuturan saksi pria (SP) dalam tuturan SP nomor (73) pada situasi 7 terlihat jawaban saksi pria telah memenuhi maksim kuantitas dalam prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksim kuantitas karena memberikan kontribusi secukupnya, tidak berlebihan “*Iya.*” Sehingga tuturan SP nomor (73) dianggap kooperatif, yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HK : “Jadi atas perintah terdakwa inilah Saudara lakukan semuanya ya?”
SP : “Iya Bu .” (74) (14:03)

Tuturan saksi pria SP dalam tuturan SP nomor (74) pada situasi 7 terlihat jawaban saksi pria telah memenuhi maksim kuantitas karena memberikan kontribusi secukupnya, tidak berlebihan “*Iya Bu .*” Dengan inilah tuturan SP dalam (74) dianggap kooperatif, yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

Situasi [8] : Pertanyaan diambil alih oleh hakim anggota untuk dilanjutkan sehingga kasus ini dapat dipertimbangkan dengan baik, (Data ini berada di dalam file 1 durasi 14:06-20:37)

HA1 : “Di sekolah posisinya di mana?”
SP : “Di ruang TU.” (77) (14:44)

Tuturan saksi pria (SP) dalam tuturan SP (77) pada situasi 8 terlihat jawaban saksi pria telah memenuhi maksim kuantitas karena memberikan kontribusi secukupnya, tidak berlebihan “Di ruang TU.” Hakim langsung dapat memahami apa yang disampaikan saksi sehingga tuturan SP dalam (77) dianggap kooperatif, yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HA1 : “Semuanya?”
SP : “Iya.” (78) (14:48)

Berdasarkan pada situasi 8 terlihat jawaban saksi pria telah memenuhi maksim kuantitas karena memberikan kontribusi secukupnya, tidak berlebihan “*Iya.*” Tuturan tidak membuat hakim bingung sehingga tuturan SP nomor (78) dianggap kooperatif dan sesuai yang diharapkan hakim oleh karena itu, termasuk dalam prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HA1 : “Cuma saksi kemaren bilang dikantin?”

SP : “Di kantin itu yang lama Pak.” (79) (14:56)

Tuturan saksi pria (SP) dalam tuturan SP nomor (79) pada situasi 8 terlihat jawaban saksi pria telah memenuhi maksim kuantitas karena memberikan kontribusi secukupnya, tidak berlebihan “*Di kantin itu yang lama Pak.*” Artinya siswa membayar di kantin merupakan kejadian yang sudah lama. Tuturan langsung dapat disimpulkan oleh hakim anggota 1. Sehingga tuturan SP nomor (79) dianggap kooperatif dan sesuai yang diharapkan hakim oleh karena itu, termasuk dalam prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HA1 : “Baik, kenapa di kantin?”
SP : “Itu waktu libur Pak.” (81) (15:12)

Konteks situasi 8 terlihat jawaban saksi pria (SP) menunjukkan telah memenuhi maksim kuantitas karena memberikan kontribusi secukupnya, tidak berlebihan, dengan inilah tuturan SP dalam (81) hal ini ditunjukkan dalam pernyataan saksi terhadap hakim “*Itu waktu libur Pak.*” dianggap kooperatif, yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HA1 : “Yang lainnya semuanya di kantor ya?”
SP : “Iya.” (82) (15:16)

Tuturan saksi pria yang disingkat (SP) pada tuturan nomor 82 pada situasi 8 merupakan prinsip kerja sama maksim kuantitas karena, memberikan informasi yang diharapkan lawan bicara jelas dan dapat langsung disimpulkan hal ini tergambar dalam pernyataan saksi kepada hakim “*Iya.*” Sehingga dianggap kooperatif yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HA1 : “Tidak tau atau pura-pura tidak tau?”

SP : “Tidak tau.” (84) (15:47)

Tuturan saksi pria yang disingkat (SP) pada tuturan nomor 84 pada situasi 8 merupakan prinsip kerja sama maksim kuantitas karena, memberikan informasi yang diharapkan lawan bicara jelas dan dapat langsung disimpulkan hal ini tergambar dalam pernyataan saksi kepada hakim “*Tidak tau.*” Jawaban yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan oleh hakim anggota 1. Sehingga dianggap kooperatif yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HA1 : “Pernah gak di tegur kepala sekolah itu gak boleh lo terdakwa minta uang. Gak boleh mengutip biaya ke orang tua siswa. Pernah gak disampaikan itu ke kepala sekolah?”

SP : “Gak ada.” (86) (16:20)

Tuturan saksi pria yang disingkat (SP) pada tuturan nomor 86 pada situasi 8 merupakan prinsip kerja sama maksim kuantitas karena, memberikan informasi yang diharapkan hakim jelas, tidak berlebihan dan dapat langsung disimpulkan dengan cepat hal ini dapat dibuktikan dalam pernyataan saksi kepada hakim “*Gak ada.*” Artinya saksi mengatakan tidak pernah mengatakan kepada kepala sekolah jika mengutip adalah perbuatan yang salah. Sehingga dianggap kooperatif yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HA1 : “Bu kan anda tidak tau tetapi takut tersinggunkan?”

SP : “Iya.” (88) (16:41)

Tuturan saksi pria (Selanjutnya akan disingkat sebagai SP) dalam tuturan nomor (88) pada situasi 8 terlihat jawaban saksi pria telah memenuhi maksim kuantitas karena memberikan kontribusi secukupnya “*Iya.*” jawaban ini tidak berlebihan, dan mudah dipahami oleh hakim anggota 1. Artinya saksi pria (SP)

takut kepala sekolah tersinggung jika memberitahu bahwa mengutip adalah tindakan yang salah. Dengan inilah tuturan SP dalam (88) dianggap kooperatif, yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HA1 : “Semua tau, tetapi takut tersinggung atau pernah menetapkan yang resmi sekian yang tidak resmi sekian tambahkan?”

SP : “Tidak ada.” (89) (16:56)

Pada data di atas dalam situasi 8 merupakan prinsip kerja sama maksim kuantitas karena, memberikan informasi yang diharapkan hakim anggota 1. Tuturan yang diberikan jelas, tidak berlebihan dan dapat langsung disimpulkan dengan cepat hal ini dapat dibuktikan dalam pernyataan saksi kepada hakim “*Tidak ada.*” Sehingga dianggap kooperatif yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HA1 : “Ada bertemu dengan terdakwa ini?”

SP : “Tidak Pak hanya menelfon saja.” (91) (18:22)

Tuturan saksi pria yang disingkat (SP) pada tuturan nomor 91 pada situasi 8 merupakan prinsip kerja sama maksim kuantitas karena, memberikan informasi yang diharapkan hakim anggota 1. Tuturan yang diberikan jelas, tidak berlebihan dan dapat langsung disimpulkan dengan cepat hal ini dapat dibuktikan dalam pernyataan saksi kepada hakim “*Tidak Pak hanya menelfon saja.*” Artinya saksi pria (SP) mengatakan hanya berkomunikasi via telephone saja. Sehingga dianggap kooperatif yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

Situasi [9] : Hakim ketua mengambil alih sidang dan mulai mengajukan pertanyaan kepada saksi. (Data ini berada dalam file 1 durasi 20:37-24:39)

HA1 : “Sebelum kepala sekolah ini menjadi kepala sekolah di situ apakah anak dimintai uang seperti yang dilaporkan?”

SP : “Iya Pak.” (95) (20:49)

Tuturan Saksi pria (SP) dalam tuturan nomor (95) pada situasi 9 merupakan prinsip kerja sama maksim kuantitas. Karena, pernyataan saksi pria (SP) memberikan informasi yang secukupnya dan tidak berlebihan. Hal ini ditunjukkan pada pernyataan “*Iya Pak.*” Artinya saksi mengatakan bahwa mengutip sudah menjadi kebiasaan di sekolah tersebut. Sehingga dianggap kooperatif yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HA1 : “Perintah kepala sekolah yang lama seperti dijelaskan aPakah anda mendapatkan bagian? Saudara saksi menyatakan perintah itu melalui telfon bertemu atau memang dimusyawarahkan?”

SP : “Bertemu.” (96) (21:47)

Percakapan antara saksi pria (SP) dan hakim anggota 1 (HA1) pada situasi 9 merupakan prinsip kerja sama maksim kuantitas. Karena, pernyataan saksi memberikan informasi yang secukupnya dan tidak berlebihan. Hal ini ditunjukkan pada pernyataan “Bertemu.” Artinya saksi mengatakan dirinya bertemu sebelum mengutip uang kepada orang tua siswa. Sehingga dianggap kooperatif yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HA1 : “Diperintah?”

SP : “Diperintah.” (97) (21:57)

Tuturan hakim saksi pria (SP) tuturan nomor (97) pada situasi 9 merupakan prinsip kerja sama maksim kuantitas. Karena, pernyataan saksi memberikan informasi yang secukupnya tidak berlebihan, dan jawaban sesuai yang diharapkan hakim. Hal ini ditunjukkan pada pernyataan “*Diperintah dan iya itu.*” Artinya semua yang dilakukanya atas perintah terdakwa sebagai kepala sekolah. Sehingga

dianggap kooperatif yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HA1 : “Di sekolah, di luar atau perintahnya ikuti kebiasaan sebelumnya?
SP : “Diperintah dan iya itu.” (98) (22:08)

Tuturan hakim anggota 1 (HA1) tuturan nomor (95) pada situasi 9 merupakan prinsip kerja sama maksim kuantitas. Karena, pernyataan saksi memberikan informasi yang secukupnya tidak berlebihan, dan jawaban sesuai yang diharapkan hakim. Hal ini ditunjukkan pada pernyataan “*Diperintah dan iya itu.*” Sehingga dianggap kooperatif yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HA1 : “Saudara saksi tadi menyatakan baju seragam sekolah 2 stel ya?”
SP : “3 stel.” (99) (22:25)

Dialog hakim anggota 1 (HA1) tuturan nomor (99) pada situasi 9 mengandung maksim kuantitas. Karena, pernyataan saksi memberikan informasi yang secukupnya tidak berlebihan, dan jawaban sesuai yang diharapkan hakim. Hal ini ditunjukkan pada pernyataan “*3 stel.*” Sehingga dianggap kooperatif yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HA1 : “Bu kan berapa macam bajunya seragam sekolah?”
SP : “5 macam.” (102) (22:58)

Tuturan yang diutarakan saksi pria (SP) dalam tuturan (102) pada situasi 9 merupakan tuturan memenuhi maksim kuantitas, hal ini terbukti “*3 stel.*” bahwa jawaban yang seperlunya, tidak berlebihan artinya kontribusi yang diberikan secukupnya, dengan ini tuturan SP dalam tuturan nomor (102) dianggap kooperatif yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

- HK : “Saudara ini khusus penerimaan siswa pindahan atau siswa baru juga?”
SP : “Iya Bu .” (104) (24.01)

Pada data tuturan saksi pria (SP) dalam tuturan (104) pada situasi 9 merupakan tuturan memenuhi maksim kuantitas, hal ini terbukti “*Iya Bu .*” bahwa jawaban yang seperlunya, tidak berlebihan kontribusi yang diberikan secukupnya. Artinya penerimaan siswa baru dan siswa pindahan melalui dirinya terlebih dahulu. Dengan ini tuturan SP dalam tuturan nomor (102) dianggap kooperatif yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

- HA1 : “Saudara tau gak, atau mendengar berapa sih biaya baju tahun sebelumnya untuk 5 (lima) stel?”
SP : “Sebelum-sebelumnya Rp 1400.000.” (105) (24:01)

Berdasarkan tuturan saksi pria (SP) dalam tuturan nomor (105) pada situasi 9 mengandung prinsip kerja sama maksim kuantitas. Hal ini dibuktikan pada pernyataan “*Sebelum-sebelumnya Rp 1400.000.*” Tuturan jawaban saksi dapat mudah disimpulkan hakim anggota 1 (HA1), artinya jelas dan tidak berlebihan sehingga dianggap kooperatif yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

Situasi [10] : Saat hakim memberi kesempatan kepada terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi terdakwa malah menanggapi dan hakim terlihat kesal. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 24:39- 28:21)

- HK : “Tetap dengan keterangan tadi?”
SP : “Tetap.” (108) (27:59)

Tuturan saksi pria (SP) dalam tuturan nomor (108) pada situasi 10 mengandung prinsip kerja sama maksim kuantitas. Hal ini dibuktikan pada pernyataan “*Tetap.*” Tuturan jawaban saksi tidak berlebihan dan mudah

disimpulkan hakim ketua. Artinya, Saksi pria (SP) mengatakan tetap pada keterangan yang telah diberikan. Sehingga dianggap kooperatif yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HK : “Baik terimakasih ya, keterangan Saudara kita ambil sebagai terdakwa, apakah anda tambahkan? Tentu tidak berbedakan anda sebagai saksi dan terdakwa?”

SP : “Tidak Bu .” (109) (28:12)

Percakapan saksi pria (SP) dalam tuturan nomor (109) pada situasi 10 mengandung prinsip kerja sama maksim kuantitas. Hal ini dibuktikan pada pernyataan “*Tidak Bu .*” Tuturan jawaban saksi tidak berlebihan dan mudah disimpulkan hakim ketua. Artinya, Saksi pria (SP) mengatakan tidak ada perbedaan keterangan dirinya diperiksa sebagai saksi maupun sebagai terdakwa. Sehingga dianggap kooperatif yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

Situasi [11] : Sidang ditunda 1 minggu dan selesai dilanjutkan dengan L terdakwa yang dimintai keterangan sebagai saksi selanjutnya. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 28:21-29:34)

HK : “Lalu sekarang, Saudara jadi terdakwa untuk R untuk kuasa hukum bertanya kapasitas sebagai terdakwa. Saudara dengarkan baik-baik ya keterangan Ibu R ya!”

SP : “Iya.” (110) (29:32)

Tuturan saksi wanita (SW) pada tuturan nomor (110) pada situasi 11 merupakan tuturan yang mengandung prinsip kerja sama. Karena, saksi memberikan jawaban yang secukupnya hal ini terbukti dari pernyataan saksi “*Iya.*” Artinya saksi memberikan informasi kepada hakim ketua bersedia mendengarkan keterangan saksi wanita. Pernyataan ini mudah dipahami oleh

hakim ketua dan dapat dengan mudah disimpulkan oleh hakim ketua (HK). sehingga dianggap kooperatif yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

ituasi [12] : Hakim mempersilahkan penuntut umum untuk terlebih dahulu bertanya kepada saksi. (Data ini berada dalam file 1 durasi 29.32-30.00)

PU : “Gak ingat berapa kali, tapi ada ya?”
HK : “Saksi untuk E nanti khusus untuk terdakwa itu ada.”
PU : “Oh iya”
SW : “Iya ada.” (112) (30.00)

Pada tuturan yang diutarakan saksi wanita (SW) nomor (112) pada situasi 12 mengandung prinsip kerja sama maksim kuantitas. Karena saksi memberikan informasi yang secukupnya kepada penuntut umum “*Iya ada.*” Artinya saksi wanita (SW) mengatakan bahwa pernah menerima uang dari terdakwa. Hal ini dapat dengan mudah dipahami oleh penuntut umum, bahasa yang digunakan jelas sehingga dianggap kooperatif yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

Situasi [13] : Hakim ketua meminta pertanyaanya merujuk pada kesaksian terdakwa sebagai saksi dari E. dan kemudian sidang diambil alih kembali kepada hakim ketua. (Data ini berada di file 1 durasi 30.05-38.42)

HK : “Lalu ketika terdakwa menyerahkan uang berapa kali?”
SW : “Sekali.” (114) (30.53)

Tuturan saksi wanita (SW) pada tuturan nomor (114) dalam situasi 13 juga memenuhi maksim kuantitas. Karena memberikan informasi yang secukupnya tidak berlebihan “*Sekali.*” Jawaban yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan oleh hakim ketua. Artinya bahwa dirinya hanya sekali menerima uang dari terdakwa Sehingga hakim ketua (HK) dapat menyimpulkan apa yang

disampaikan. Oleh karena itu, dianggap kooperatif dan termasuk maksim kuantitas.

HK : “Jadi menurut Saudara terdakwa yang menggunakan uang itu semua?”

SW : “Iya.” (120) (33:00)

Tuturan saksi wanita (SW) pada tuturan nomor (120) dalam situasi 13 Juga memenuhi maksim kuantitas. Karena memberikan informasi yang secukupnya hal ini terbukti dari pernyataan saksi “Iya.” tidak berlebihan sehingga hakim ketua (HK) dapat menyimpulkan apa yang disampaikan. Artinya saksi wanita mengatakan bahwa terdakwalah yang memakai uangnya semua. Oleh karena itu, dianggap kooperatif dan termasuk maksim kuantitas.

HK : “Jadi kepala sekolah juga?”

SW : “Iya.” (123) (33:16)

Tuturan saksi wanita (SW) pada tuturan nomor (123) dalam situasi 13. Juga memenuhi maksim kuantitas. Karena memberikan informasi yang secukupnya kepada lawan tuturnya hal ini terbukti dari pernyataan saksi “Iya.” Artinya, saksi wanita jabatannya disekolah yang lama sebagai kepala sekolah. Hal ini tidak berlebihan, jelas, dan lugas sehingga hakim ketua (HK) dapat menyimpulkan apa yang disampaikan. Oleh karena itu, dianggap kooperatif dan termasuk maksim kuantitas.

HK : “Ada gak peraturan yang memperbolehkan kalau siswa pindah itu dikenai biaya?”

SW : “Tidak ada.” (127) (33:38)

Tuturan saksi wanita (SW) pada nomor tuturan (127) dalam situasi 13 mengandung prinsip kerja sama maksim kuantitas. Karena terbukti dalam pernyataan saksi wanita (SP) terhadap hakim ketua “Tidak ada.” Artinya saksi

wanita mengatakan bahwa tidak ada peraturan pendidikan mengutip uang terhadap siswa pindahan. Jawaban yang diberikan tidak berlebihan dan sesuai dengan diharapkan oleh lawan tutur. Oleh karena itu, tuturan nomor 127 termasuk maksim kuantitas.

- HK : “Kenapa Saudara berani mengadakan pungutan?”
SW : “Sekolah kami yang lama tidak ada pungutan.” (128) (33:44)

Tuturan saksi wanita (SW) pada nomor tuturan (128) dalam situasi 13 mengandung prinsip kerja sama maksim kuantitas. Karena, memberikan jawaban yang diharapkan oleh hakim ketua tidak berlebihan dan tidak kurang. Artinya hakim ketua dapat menyimpulkan tanpa proses pemahaman terlalu lama. Hal ini ditunjukkan dalam pernyataan “*Sekolah kami yang lama tidak ada pungutan.*” Oleh karena itu, dianggap kooperatif dan termasuk maksim kuantitas.

- HK : “Nah ini kan sama dengan meminta, sementara peraturan gak ada. Kenapa gak bawa meja dan kursi dibawa dari rumah saja Saudara perintahkan terus. Tetapi itu terserah Saudara ya sebagai saksi dengan terdakwa nanti kita kaitakan lagi dengan tukang jahitnya. Jadi, Saudara cuma bilang gitu ya suruh mereka Bu at baju dinas baru yang tidak sesuai dan tidak ada, kursi meja tidak ada terus surat permohonan?”
SW : “Iya Bu .” (135) (35:47)

Tuturan saksi wanita (SW) pada nomor tuturan (135) dalam situasi 13 merupakan prinsip kerja sama maksim kuantitas. Karena, memberikan jawaban yang diharapkan oleh hakim ketua tidak berlebihan dan tidak kurang. Hal ini ditunjukkan dalam pernyataan saksi wanita (SW) terhadap lawan tuturnya “*Iya Bu .*” jawaban yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan hakim ketua dan dapat dipahami. Sehingga tuturan nomor (135) termasuk maksim kuantitas.

- HK : “Iya kan tu Saudara ngerti, kan Saudara itu kan yang ini mengerjakan?”

SW : “Iya.” (136) (35:48)

Pada tuturan tersebut dalam situasi 13 mengandung prinsip kerja sama maksim kuantitas. Karena, memberikan jawaban yang diharapkan oleh hakim ketua tidak berlebihan dan tidak kurang. Artinya hakim ketua dapat menyimpulkan tanpa proses pemahaman terlalu lama. Hal ini ditunjukkan dalam pernyataan “*Iya.*” Oleh karena itu, dianggap kooperatif dan termasuk maksim kuantitas.

HK : “Diperkenankan gak, kan kewajiban sekolah?”

SW : “Tidak diperkenankan.” (141) (37:05)

Tuturan dialog tersebut antara hakim ketua dan saksi wanita nomor (141) dalam situasi 13 termasuk dalam prinsip kerja maksim kuantitas. Karena, komunikasi yang terjadi dapat berjalan dengan baik. Jawaban saksi wanita (SW) terhadap hakim ketua memberikan kontribusi yang secukupnya, hal ini dapat dibuktikan dalam pernyataan saksi “*Tidak diperkenankan.*” Sehingga dapat langsung disimpulkan oleh hakim ketua dianggap kooperatif dan termasuk maksim kuantitas.

Situasi [14] : Sidang diambil alih oleh Hakim anggota (1) dan memperjelas kembali maksud pertanyaannya. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 38:42-50:41)

HA1 : “Itu saudara catat?”

SW : “Tidak.” (147) (38:53)

Berdasarkan data diatas termasuk dalam prinsip kerja sama maksim kuantitas. Karena, saksi wanita (SW) memberikan jawaban yang secukupnya tidak berlebihan hal ini ditunjukkan dalam pernyataan saksi “*Tidak.*” Artinya saksi wanita (SW) mengatakan tidak ada mencatat masalah pembayaran yang di berikan

orang tua siswa. Sehingga dapat langsung disimpulkan oleh hakim ketua dianggap kooperatif dan termasuk maksim kuantitas.

HA1 : “Benar direhap?”
SW : “Iya.” (154) (41:49)

Tuturan yang diutarakan oleh saksi wanita (SW) nomor (154) pada situasi 14 mengandung prinsip kerja sama maksim kauntitas. Karena saksi memberikan informasi yang secukupnya kepada hakim ketua hal ini dibuktikan “*Iya.*” Artinya saksi wanita mebenarkan bahwa ada dilakukan perbaikan pada kursi disekolah tersebut. Hal ini dapat dengan mudah dipahami oleh hakim ketua, bahasa yang digunakan tidak berlebihan sehingga dianggap kooperatif yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HA1 : “Dari mana?”
SW : “Dana sekolah.” (156) (42.18)

Dalam tuturan saksi wanita (SW) nomor (156) pada situasi 14 mengandung prisipkerja sama maksim kauntitas. Karena saksi memberikan informasi yang secukupnya kepada hakim ketua hal ini dibuktikan “*Dana sekolah.*” Artinya saksi wanita memberitahukan bahwa sumber dana dari dana sekolah. Hal ini dapat dengan mudah dipahami oleh hakim ketua, bahasa yang digunakan tidak berlebihan sehingga dianggap kooperatif yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HA1 : “Dana sekolah apa?”
SW : “Dana oprasional sekolah.” (158) (42:51)

Berdasarkan data di atas pada situasi 14 mengandung prinsip kerja sama maksim kauntitas. Karena saksi memberikan informasi yang secukupnya kepada

hakim anggota 1 hal ini dibuktikan “*Dana oprasional sekolah.*” Artinya saksi wanita memberitahukan bahwa sumber dana dari dana oprasional sekolah. Hal ini dapat dengan mudah dipahami oleh hakim ketua, bahasa yang digunakan tidak berlebihan sehingga dianggap kooperatif yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HA1 : “Sumber dari mana?”
SW : “Dari Gubernur.” (159) (42:53)

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa mengandung prinsip kerja sama maksim kuantitas. Karena saksi wanita (SW) memberikan jawaban kepada hakim anggota 1 jawaban yang tidak berlebihan dan tidak kurang hal ini terbukti dari pernyataan saksi wanita (SW) “*Dari Gubernur.*” Pernyataan tersebut sesuai dengan yang diharapkan hakim anggota dan dapat disimpulkan dengan mudah bahwa sumber uang dari gubernur. Sehingga dianggap kooperatif dan termasuk maksim kuantitas.

HA1 : “Ke pihak sekolah?”
SW : “Iya.” (160) (42:56)

Tuturan saksi wanita nomor (160) pada situasi 14 termasuk dalam prinsip kerja sama maksim kuantitas. Karena, saksi wanita (SW) memberikan jawaban yang secukupnya tidak berlebihan terhadap hakim anggota 1 hal ini ditunjukkan dalam pernyataan saksi “*Iya.*” Artinya uang dari pemerintah langsung diterima oleh pihak sekolah. Sehingga dapat langsung disimpulkan oleh hakim ketua dianggap kooperatif dan termasuk maksim kuantitas.

HA1 : “Uang itu dibelikan tanah hitam Saudara tau?”
SW : “Tau.” (164) (44:39)

Pada tuturan saksi wanita (SW) pada nomor (164) pada situasi 14 merupakan prinsip kerja sama maksim kuantitas. Karena saksi wanita (SW) memberikan jawaban yang secukupnya artinya tidak berlebihan pada pernyataan saksi “*Tau.*” Hal ini dapat langsung disimpulkan oleh hakim anggota 1, Sehingga dianggap kooperatif dan termasuk maksim kuantitas.

HA1 : “Jawab saja uang dari mana itu saja. Jangan lain-lain”

SW : “Tau Pak.” (166) (44:51)

Tuturan saksi wanita (SW) pada nomor (164) pada situasi 14 merupakan prinsip kerja sama maksim kuantitas. Karena saksi wanita (SW) memberikan jawaban yang secukupnya artinya tidak berlebihan pada pernyataan saksi “*Tau Pak.*” Hal ini dapat langsung disimpulkan oleh hakim anggota 1 bahwa saksi wanita mengetahui asal dana tersebut. Sehingga dianggap kooperatif dan termasuk maksim kuantitas.

HK : “Bu kan itu ditanya, uang yang diPakai terdakwa memperbaiki meja kursi tau dari mana sumbernya?”

SW : “Tidak.” (169) (45:39)

Pada data tuturan saksi wanita (SW) pada nomor (169) pada situasi 14 merupakan prinsip kerja sama maksim kuantitas. Karena, saksi wanita (SW) memberikan jawaban yang secukupnya terhadap hakim ketua hal ini ditunjukkan dalam pernyataan saksi wanita (SW) “*Tidak.*” Artinya saksi wanita tidak mengetahui sumber dana untuk memperbaiki kursi dan meja. Jawaban sesuai dengan yang diharapkan hakim ketua. Sehingga dianggap kooperatif dan termasuk maksim kuantitas.

HA1 : “Aneh, jadi pikiran Saudara jangan takut ditanya. Bayangin itu gara-gara Rp 2000.000 dia ditangkap karena jika masuk penjara nanti sulit bagi kami. Makanya saya tanya bilangkan karena kebijakan Ibu

yang gak mau tau tadi. diperbaiki kursi meja gak mau tau katanya melaksanakan apa saja yang diperintahkan. Baik saya teruskan sekali lagi dipergunakan. Apakah itu semua pembagian uang tadi dilaporkan ke Saudara Rp 1000.000 untuk ini, Rp 10.000.000 untuk kursi dan Rp 1000.000 untuk koran pernah gak dibilang seperti itu?"

SW : "Tidak." (171) (47:18)

Pada tuturan saksi wanita (SW) pada nomor (171) pada situasi 14 mengandung prinsip kerja sama maksim kuantitas. Karena, saksi wanita (SW) memberikan jawaban yang secukupnya terhadap hakim anggota 1 hal ini ditunjukkan dalam pernyataan saksi wanita (SW) "*Tidak.*" Artinya jawaban sesuai dengan yang diharapkan hakim anggota 1 Sehingga dianggap kooperatif dan termasuk maksim kuantitas.

HA1 : "Uang yang diPakai?"

SW : "Iya." (173) (47:40)

Tuturan saksi wanita (SW) pada nomor (173) pada situasi 14 merupakan prinsip kerja sama maksim kuantitas. Karena, saksi wanita (SW) memberikan jawaban yang secukupnya terhadap hakim anggota 1 hal ini ditunjukkan dalam pernyataan saksi wanita (SW) "*Iya.*" Artinya jawaban sesuai dengan yang diharapkan hakim anggota 1 Sehingga dianggap kooperatif dan termasuk maksim kuantitas.

HK : "Dari?"

SW : "Bendahara." (174) (47:44)

Tuturan saksi wanita (SW) pada nomor (174) pada situasi 14 mengandung prinsip kerja sama maksim kuantitas. Karena, saksi wanita (SW) memberikan jawaban yang secukupnya artinya tidak berlebihan. Hal ini dibuktikan dalam pernyataan saksi wanita (SW) "*Bendahara.*" sehingga dapat disimpulkan dengan

mudah oleh hakim ketua. Sehingga dianggap kooperatif dan termasuk maksim kuantitas.

HA1 : “Diambil duluan dari?”
SW : “Anggran.” (175) (47:46)

Tuturan saksi wanita (SW) pada nomor (175) pada situasi 14 mengandung prinsip kerja sama maksim kuantitas. Karena, saksi wanita (SW) memberikan jawaban yang secukupnya artinya tidak berlebihan. Hal ini dibuktikan dalam pernyataan saksi wanita (SW) “*Anggran.*” Sehingga dapat disimpulkan dengan mudah oleh hakim ketua Sehingga dianggap kooperatif dan termasuk maksim kuantitas.

Situasi [15] Hakim Ketua mengambil alih untuk bertanya pada saat persidangan. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 50:41-53:55)

HK : “Bentar tadi kan terdakwa ini mengatakan 17 siswa pindahan Saudara yang tau 10 (sepuluh) aPakah bisa siswa pindah tanpa ada surat rekomendasi pindah?”
SW : “Tidak.” (183) (50:56)

Tuturan saksi wanita (SW) nomor (183) pada situasi 15 merupakan prinsip kerja sama maksim kuantitas. Karena saksi wanita (SW) memberikan kontribusi yang secukupnya artinya tidak berlebihan ditunjukkan dalam pernyataan “*Tidak.*” Hakim ketua dapat memahami dan menyimpulkan apa yang dikatakan saksi wanita (SW) Sehingga dianggap kooperatif dan termasuk maksim kuantitas.

HK : “Bisa gak siswa pindah sekolah tanpa dia rekomendasi dari Saudara?”
SW : “Tidak.” (185) (51:14)

Tuturan saksi wanita (SW) nomor (185) pada situasi 15 mengandung prinsip kerja sama maksim kauntitas. Karena saksi memberikan informasi yang

secukupnya kepada hakim ketua hal ini dibuktikan “*Tidak.*” Hal ini dapat dengan mudah dipahami oleh hakim ketua. Artinya saksi wanita mengatakan tidak bisa pindah apabila tidak ada surat rekomendasi. Sehingga dianggap kooperatif yakni sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HK : “Kan Saudara yang mengontrol tugasnya, kalau dimasukannya siswa sampai 100 (seratus) bagaimana, yang akan terdaftar. Ada kan daftar siswa? (terlihat sedikit emosi mendengar keterangan saksi yang tidak logis)

SW : “Ya Bu .” (191) (52:17)

Tuturan saksi wanita (SW) nomor (191) pada situasi 15 merupakan prinsip kerja sama maksim kuantitas. Karena saksi wanita (SW) memberikan kontribusi yang secukupnya artinya tidak berlebihan dan jelas hal ini ditunjukkan dalam pernyataan “*Ya Bu.*” Jawaban yang diberikan saksi wanita (SW) sesuai dengan yang diharapkan hakim ketua. Artinya saksi wanita membeberitahukan bahwa mempunyai daftar siswa. Sehingga dianggap kooperatif dan termasuk maksim kuantitas.

Situasi [18] : Sidang diambil oleh hakim anggota 2 (dua) untuk meminta keterangan terdakwa. (Data ini berada dalam file 2 durasi 05:35-25.24)

HA2 : “Ibu ya paling terakhir ini, sudah banyak saksi sekolah tapi Ibu masih lari kemana-mana dimana aturannya coba anak Ibu , suami Ibu menjemput uang ke dia. Jangan jawab dulu lah dari tadi bosan saya dengan jawaban Ibu ya, kok guru begitu. Sekolah itu diadakan oleh negara sudah jelas ada dananya. Kita yang merusak manusia ini yang merusak. Ada perbaikan di kemana-kemana akhirnya hancurlah. Begitu yang gak rusak sengaja dirusak takkan kemana-mana. Aturannya Ibu terus terang saja apa penyebabnya? kenapa itu bisa terjadi? Jangan dilarikan kemana-manalah. Manusia mau dikaitkan rata-rata memang begitu hukum belum dijalankan. Pencegahan pun tidak berjalan. Kalau semua kepala sekolah masuk penjara, guru-guru masuk penjara, tata usaha masuk penjara siapa lagi coba abis dipenjara. Seolah seakan-akan kok saya saja yang lain begitu juga semua. Sudah jelas kemarin gak ada aturan seperti itu

gak boleh mungut, gak boleh mengarahkan sudah ada kaki tandanya jemput ke tukang jahit N upahnya Rp 750.000 eh Rp 150.000 per apa Rp 750.000 eh Rp 650.000 5 (lima) stel. Kenapa alasannya apa kami akan pertimbangkan dengan baik tetapi kalau berkilah seperti orang sok suci ya kami yang hidup meyakini semua kok apa yang disampaikan. Perkara ini seharusnya cepat jadi lama banyak yang lari kesanalah. Gak ada masalah sekolah menerima murid ada seragam dijahit sama murid orang ikut ambil bagian supaya menghindari ketidakcocokan seragam, tidak bagus, oke. Tetapi kalau ambil bagian dari kesempatan itu jelas Rp 650.000 banyak kecuali jelas-jelas boleh tak mungut tau Saudara kan tidak boleh mungut apapun ke wali murid. Saudara kan ada tugas pokoknya sekarang sudah dipersidangan biaya gak ada karena keterbatasan kita kumpulkan wali murid ikutkan les tanp bayar kan masuk diakal. Ini Pakaian dikoordinir dari sekolahnya penjahit menerima Rp 650.000 nyatanya dibebankan Rp 1400.000 kan seputar itu saja. Sisanya anak Ibu dan suami Ibu yang jemput uangnya digunakan untuk apa-apa. Okelah jangan munafiklah ya sebagian ada digunakan. Orang Bu kan malaikat di dunia ini gak ada yang sempurna di dunia ini apalagi masalah uang ya semua berdosa ya semua bersalah tapi ini menjengkelkan sekali, gak enak Bu . Yang diperiksa Ibu kami gak memaksa, Ibu sudah bersumpah juga ya. Nyatanya ada saksi mungkin lepas tangan semua tidak tau menau masalah itu tidak boleh dilibatkan itu masalah kepala sekolah itu kata para saksi saya bertanya kalau itu betul. Kami juga yang menentukan kami punya nurani, nurani kamu yang kami jalankan ya. bukan berbelit-belit itu salah seharusnya dari awal Ibu jawab kalau jujur. Gak perlu kami tanyakan ini. Seperti apa sebenarnya jangan seperti orang sok suci masak kepala sekolah punya hutang ya sampai puluhan juta ya. Gak masuk diakal bikin orang emosi. Ibu merasa bersalah gak?

SW : “Iya yang mulia.” (194) (14.03)

Tuturan saksi wanita (SW) nomor (194) pada situasi 18 merupakan prinsip kerja sama maksim kuantitas. Karena saksi wanita (SW) memberikan kontribusi yang secukupnya tidak berlebihan dan jelas terhadap hakim anggota 2 hal ini ditunjukkan dalam pernyataan “*Iya yang mulia.*” saksi merasa bersalah atas semua perbuatannya. Jawaban yang diberikan saksi wanita (SW) sesuai dengan yang diharapkan hakim ketua. Sehingga dianggap kooperatif dan termasuk maksim kuantitas.

Tabel 02. Prinsip Kerja Sama Maksim Kuantitas Dalam Tuturan Deklaratif Saksi Bahasa Persidangan Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru.

No	Maksim Kuantitas	Nomor Urut Tuturan	Jumlah Tuturan
	Koomperatif	1,2,3,4,5,6,8,16,18,23,24,28,31,32,39,41,42,46,47,48,50,53,54,55,58,68,71,73,74,77,78,79,81,82,84,86,88,89,91,95,96,97,98,99,102,104,105,108,109,110,112,114,115,120,125,127,135,136,141,146,147,154,156,158,159,160,164,166,169,171,173,174,175,183,185,191,194.	77

2.2.2.2 Maksim Kualitas.

Maksim kualitas yaitu maksim yang memberikan informasi yang sebenarnya terhadap lawan bicara.

Situasi [2] : Hakim mempersilahkan kedua terdakwa yang diperiksa sebagai saksi untuk melakukan sumpah atas keterangan yang akan diberikan serta memberi intruksi untuk saksi pria yang terlebih dahulu diperiksa sementara saksi wanita dipersilahkan untuk duduk disebelah penasehat hukum. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 00:23-01:50)

HK : “Iya, berita acara tersebut Saudara tanda tangan?”
 SP : “Iya Bu .” (7) (01:39)

Tuturan saksi pria (SP) yang terdapat nomor (7) pada situasi 2 mengandung maksim kualitas. Karena saksi pria (SP) telah memberikan jawaban yang

sebenarnya dalam tuturan (10) hal ini dibuktikan dalam pernyataan saksi pria SP “*Iya Bu .*” Karena faktanya saksi pria (SP) sudah pernah menandatangani berita acara. Sehingga termasuk dalam prinsip kerja sama maksim kualitas.

Situasi [4] : Hakim meminta saksi untuk menggunakan *mikrofon* karena suara saksi kecil sehingga kurang jelas terdengar. (02:41-05:01)

PU : “Gimana caranya?”

SP : “Kalau ada murid pindah, saya terima Pak.” (10) (02:48)

Tuturan saksi pria (SP) yang terdapat nomor (10) pada situasi 4 mengandung maksim kualitas. Hal ini ditunjukkan bahwa saksi pria (SP) telah memberikan jawaban yang sebenarnya hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan saksi pria terhadap penuntut umum “*Kalau ada murid pindah, saya terima Pak.*” Karena faktanya ketika ada siswa masuk saksi pria yang menerima sebelum ke kepala sekolah. Sehingga termasuk dalam prinsip kerja sama maksim kualitas.

Situasi [4] : Hakim meminta saksi untuk menggunakan *mikrofon* karena suara saksi kecil sehingga kurang jelas terdengar. (02:41-05:01)

PU : “Saudara serahkan uangnya ke dia dimana di rumah atau di sekolah?”

SP : “Di kantor.” (14) (04:30)

Tuturan saksi pria (SP) yang terdapat nomor (14) pada situasi 4 terapat maksim kualitas. Karena saksi pria (SP) telah memberikan jawaban yang sebenarnya hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan saksi pria terhadap penuntut umum “*Di kantor.*” Artinya saksi pria membenarkan bahwa pernah menyerahkan uang kepada terdakwa di kator. Sehingga termasuk dalam prinsip kerja sama maksim kualitas.

PU : “Dimana kantornya?”

SP : “Di Jalan Soebrantas” (15) (04:46)

Tuturan saksi pria (SP) yang terdapat nomor (15) pada situasi 4 mengandung maksim kualitas. Karena saksi pria (SP) telah memberikan jawaban yang sebenarnya kepada hakim ketua hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan saksi pria (SP) “*Di Jalan Soebrantas*” Artinya kantornya berda di jalan Soebrantas. Sehingga termasuk dalam prinsip kerja sama maksim kualitas.

Situasi [5] :Penutup Umum mengakhiri pertanyaanya karena sudah merasa cukup dan sidang diambil alih oleh hakim ketua untuk melanjutkan pertanyaan. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 05:01-07:19)

HK : “Saudara di sekolah itu sebagai apa?”
SP : “Tata usaha.” (17) (05:07)

Berdasarkan tuturan saksi pria (SP) yang terdapat nomor (17) pada situasi 5 mengandung maksim kualitas. Dikatakan demikian karena saksi pria (SP) telah memberikan jawaban yang sebenarnya kepada hakim ketua. Hal ini dapat dibuktikan dalam tuturan (17) “*Tata usaha.*” Artinya saksi pria memberitahukan bahwa dirinya di sekolah tersebut bekerja sebagai tata usaha. Sehingga termasuk prinsip kerja sama maksim kualitas.

HK : “Paling rendah berapa?”
SP : “Rp 1500.000.” (25) (06:13)

Pada percakapan saksi pria (SP) dan hakim ketua (HK0 yang terdapat nomor (25) pada situasi 5 mengandung maksim kualitas. Karena saksi pria (SP) telah memberikan jawaban yang sebenarnya kepada hakim ketua dalam tuturan (25) “*Rp 1500.000.*” Artinya uang yang dikutip paling rendah sejumlah “Rp 1500.000.” Sehingga termasuk maksim kualitas.

HK : “Yang paling tinggi?”
SP : “ Rp 2300.000.” (26) (06:17)

Tuturan saksi pria (SP) yang terdapat nomor (26) pada situasi 5 mengandung maksim kualitas. Karena saksi pria (SP) telah memberikan jawaban yang sebenarnya kepada hakim ketua dalam tuturan (26) “ Rp 2300.000.” Artinya uang yang dikutip paling tinggi sejumlah “Rp 2300.000.” Sehingga termasuk prinsip kerja sama maksim kualitas.

HK : “Emangnya sekolah itu gak punya anggaran untuk kursi dan meja?”
SP : “Ada.” (28) (07:13)

Berdasarkan tuturan saksi pria (SP) nomor 28 pada situasi 5 merupakan tuturan prinsip kerja sama maksim kuantitas. Karena saksi pria memberikan kontribusi secukupnya. Hal ini dapat dibuktikan dalam pernyataan saksi “Ada.” Sehingga dapat dipahami oleh hakim ketua. Sehingga termasuk prinsip kerja sama maksim kuantitas.

Situasi [6] : Saksi merasa sedih dan sangat menyesali perbuatannya karna menjalankan tugas yang salah karena permintaan Kepala Sekolah. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 07:19-10:25)

HK : “Itu sekolah negeri kan?”
SP : “Iya.” (30) (07:22)

Tuturan saksi pria (SP) yang terdapat nomor (30) pada situasi 6 merupakan maksim kualitas. Karena saksi pria (SP) telah memberikan jawaban yang sebenarnya kepada hakim ketua dalam tuturan (30) “Iya.” Maksudnya membeberitahukan kepada hakim ketua bahwa sekolah tempatnya bekerja adalah sekolah negeri. Sehingga kooperatif dan termasuk prinsip kerja sama maksim kualitas.

HK : “Karena yang kemaren terdaftar ada ofletnya untuk sekolah ini, berapa satu orang?”
SP : “Rp 760.000.” (35) (08:15)

Tuturan saksi pria (SP) yang terdapat nomor (35) pada situasi 6 mengandung maksim kualitas. Karena saksi pria (SP) telah memberikan jawaban yang sebenarnya terhadap hakim ketua. Hal ini dapat dibuktikan dalam tuturan (35) “Rp 760.000.” Maksudnya harga baju seragam yang harus dibayar ke tukang jahit adalah Rp 760.000. Sehingga kooperatif dan termasuk prinsip kerja sama maksim kualitas.

HK : “Baik dari uang-uang itu ada berapa siswa yang pindah. SMP berapa?”

SP : “SMP A.” (37) (08:49)

Tuturan saksi pria (SP) yang terdapat nomor (37) pada situasi 6 merupakan maksim kualitas. Karena saksi pria (SP) telah memberikan jawaban yang sebenarnya terhadap hakim ketua dalam tuturan (35) “SMP A.” Artinya saksi pria (SP) memberitahukan nama sekolah tempatnya bekerja dengan sebenarnya. Sehingga kooperatif dan termasuk prinsip kerja sama maksim kualitas.

HK : “Melalui Saudara ada berapa siswa yang pindah ke sekolah?”

SP : “Jumlah 17 orang.” (38) (09:06)

Tuturan saksi pria (SP) yang terdapat nomor (38) pada situasi 6 mengandung maksim kualitas. Karena saksi pria (SP) telah memberikan jawaban yang sebenarnya terhadap hakim ketua dalam tuturan (38) “Jumlah 17 orang.” Artinya saksi pria (SP) mengatakan ada 17 (tujuh belas) siswa yang pindah ke sekolah tersebut. Sehingga kooperatif dan termasuk prinsip kerja sama maksim kualitas.

HK : “Kan diserahkan ke tukang jahit, terus tukang jahit nagih uangnya dari mana?”

SP : “Dari sekolah.” (45) (10:17)

Berdasarkan tuturan saksi pria (SP) yang terdapat nomor (45) pada situasi 6 mengandung maksim kualitas. Karena saksi pria (SP) telah memberikan jawaban yang sebenarnya terhadap hakim ketua dalam tuturan (45) “*Dari sekolah.*” Artinya saksi pria (SP) mengatakan bahwa tukang jahit menagih uang pembayaran ke sekolah. Sehingga kooperatif dan termasuk prinsip kerja sama maksim kualitas.

Situasi [7] : Hakim mempertanyakan dan menghitung uang yang diperoleh dari orang tua siswa pindahan secara detail. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 10:25-14:06)

HK : “Baru Rp 19.000.000?”
SP : “Tanah hitam.” (52) (11:20)

Tuturan saksi pria (SP) nomor (52) yan terdapat dalam situasi 7 merupakan prinsip kerja sama maksim kualitas. Karena telah memberikan informasi yang senbenarnya kepada lawan tuturnya. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan saksi “*Tanah hitam.*” Artinya saksi mengatakan bahwa uang dibelikan tanah hitam untuk sekolah. Sehingga hal ini dianggap kooperatif dan termasuk prinsip kerja sama maksim kualitas.

HK : “Yang ketangkap Rp 2000.000?”
SP : “Rp 2000.000.” (56) (11:50)

Pada data du atas tuturan yang diutarakan saksi pria (SP) nomor (56) terdapat dalam situasi 7 merupakan prinsip kerja sama maksim kualitas. Karena, saksi pria (SP) telah memberikan informasi yang senbenarnya kepada hakim ketua hal ini dapat ditunjukkan dari pernyataan saksi pria (SP) “*Rp 2000.000.*” Artinya saksi pria mengatakan uang yang tertangkap sejumlah Rp 2000.000. Sehingga hal ini dianggap kooperatif dan termasuk prinsip kerja sama maksim kualitas.

- HK : “Berarti yang Saudara abiskan dan ketangkep berarti Rp 4500.000 iya ya?”
SP : “Iya Bu .” (57) (11:58)

Berdasarkan tuturan saksi pria (SP) nomor (57) yan terdapat dalam situasi 7 merupakan prinsip kerja sama maksim kualitas. Karena, saksi pria (SP) telah memberikan informasi yang senbenarnya kepada hakim ketua hal ini dapat ditunjukan dari pernyataan saksi pria (SP) kepada hakim ketua “*Iya Bu .*” Artinya saksi pria membernarkan total uang yang dipakai dan tertangkap Rp 4500.000. Sehingga hal ini dianggap kooperatif dan termasuk prinsip kerja sama maksim kualitas.

- HK : “Berapa orang yang belum bayar?”
SP : “8 (delapan) orang.” (61) (12:31)

Tuturan saksi pria (SP) nomor (61) pada situasi 7 adalah prinsip kerja sama maksim kualitas. Karena, saksi pria (SP) telah memberikan penjelasan yang sebenarnya. Hal ini dapat dibuktikan dalam pernyataan saksi “8 (*delapan*) orang.” Maksudnya masih ada siswa pindahan yang belum membayar uang sekolah berjumlah 8 (delapan) orang. Sehingga hal ini dianggap kooperatif dan termasuk maksim kualitas.

- HK : “Ada gak anggaran sekolah dari pemerintah?”
SP : “Ada Bu .” (64) (12:54)

Tuturan saksi pria (SP) nomor (64) pada situasi 7 adalah prinsip kerja sama maksim kualitas. Hal ini dapat dibuktikan dalam pernyataan saksi pria (SP) terhadap hakim ketua “*Ada Bu .*” Karena, saksi pria (SP) telah memberikan penjelasan yang sebenarnya. Maksudnya sekolah mempunyai anggaran dari

pemerintah. Sehingga hal ini dianggap kooperatif dan termasuk prinsip kerja sama maksim kualitas.

HK : “Gaji Saudara dari mana?”
SP : “Dari APBD Bu .” (69) (13:35)

Tuturan saksi pria (SP) yang terdapat pada tuturan nomor 69 pada situasi 7 merupakan prinsip kerja sama maksim kualitas. Karena, saksi pria memberikan jawaban yang sebenarnya kepada hakim “*Dari APBD Bu .*” Maksudnya saksi pria mengatakan bahwa gajinya dari APBD Bu kan dari kepala sekolah. Sehingga hal ini dianggap kooperatif dan termasuk maksim kualitas.

HK : “Yang mengeluarkan SK Saudara siapa?”
SP : “Dinas Pendidikan.” (70) (13:40)

Tuturan saksi pria (SP) yang terdapat pada tuturan nomor 70 pada situasi 7 merupakan prinsip kerja sama maksim kualitas. Karena, saksi pria memberikan jawaban yang sebenarnya kepada hakim hal ini dapat dibuktikan dalam pernyataan saksi pria (SP) “*Dinas Pendidikan.*”. Maksudnya saksi pria (SP) mengatakan bahwa yang mengeluarkan SK adalah Dinas Pendidikan. Sehingga hal ini dianggap kooperatif dan termasuk maksim kualitas.

Situasi [8] :Pertanyaan diambil alih oleh hakim anggota untuk dilanjutkan sehingga kasus ini dapat dipertimbangkan dengan baik. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 14:06-20:37)

HA1 : “Uang mereka itu di mana anda terima?”
SP : “Di sekolah Pak.” (76) (14:39)

Berdasarkan tuturan saksi pria (SP) nomor (76) pada situasi 8 mengandung prinsip kerja sama maksim kualitas. Karena, saksi pria (SP) telah memberikan informasi yang sebenarnya hal ini dapat ditunjukkan dalam pernyataan saksi pria (SP) “*Di sekolah Pak.*” Artinya saksi pria mengatakan bahwa lokasi saat ia

menerima uangnya adalah di sekolah. Sehingga hal ini dianggap kooperatif dan termasuk maksim kualitas.

HA1 : “Berapa orang Saudara menerima?”
SP : “1 (satu) orang Pak.” (80) (13:04)

Pada tuturan saksi pria (SP) nomor (80) pada situasi 8 mengandung prinsip kerja sama maksim kualitas. Karena, saksi pria (SP) telah memberikan informasi yang sebenarnya terhadap hakim ketua “1 (satu) orang Pak.” Artinya saksi pria mengatakan bahwa hanya 1 (orang) siswa yang memberikan uangnya di kantin sekolah. Sehingga hal ini dianggap kooperatif dan termasuk prinsip kerja sama maksim kualitas.

HA1 : “Sudah berapa tahun menjadi tata usaha di sekolah SMP itu?”
SP : “Lebih 13 tahun.” (93) (19:54)

Berdasarkan tuturan saksi pria (SP) nomor (93) pada situasi 8 mengandung prinsip kerja sama maksim kualitas. Karena, saksi pria (SP) telah memberikan kontribusi yang sebenarnya kepada hakim anggota 1 saat di persidangan hal ini dapat dibuktikan dalam pernyataan saksi pria “*Lebih 13 tahun.*” Artinya saksi pria mengatakan bahwa dirinya sudah 13 (tiga belas) tahun bekerja di sekolah tersebut. Sehingga hal ini dianggap kooperatif dan termasuk prinsip kerja sama maksim kualitas.

HA1 : “Tbu R sudah berapa tahun menjadi kepala sekolah?”
SP : “Lebih kurang 1 (satu) tahun.” (94) (20:07)

Berdasarkan tuturan saksi pria (SP) nomor (94) pada situasi 8 mengandung prinsip kerja sama maksim kualitas. Karena, saksi pria (SP) telah memberikan kontribusi yang sebenarnya kepada hakim anggota 1 saat di persidangan “*Lebih kurang 1 (satu) tahun.*” Artinya saksi pria mengatakan bahwa kepala sekolah

lebih kurang 1 (satu) tahun bekerja di sekolah tersebut. Sehingga hal ini dianggap kooperatif dan termasuk maksim kualitas.

HA1 : “Sesuai pengetahuan saksi sudah lama ni jadi TU di sekolah tersebut, baju seragamnya tahun sebelumnya ada berapa sebelumnya ada berapa di sekolah ini?”

SP : “5 juga.” (103) (23.44)

Tuturan saksi pria (SP) pada nomor (103) pada situasi 9 merupakan prinsip kerja sama yang mengandung maksim kualitas. Karena, saksi pria telah memberikan informasi yang sebenarnya hal ini dapat dibuktikan dalam pernyataan saksi pria (SP) “5 juga.” Artinya saksi pria memberikan informasi kepada hakim anggota 1 bahwa jumlah seragam sekolah pada tahun sebelumnya adalah 5. Sehingga hal ini dianggap kooperatif dan termasuk prinsip kerja sama maksim kualitas.

Situasi [13] : Hakim ketua meminta pertanyaanya merujuk pada kesaksian terdakwa sebagai saksi dari E. dan kemudian sidang diambil alih kembali kepada hakim ketua. (Data ini berada di file 1 durasi 30.05-38.42)

HK : “Baik terus Saudara, berapa lama jadi kepala sekolah?”

SW : “Di sana 1 (satu) tahun Bu .” (121) (33:09)

Tuturan saksi pria (SP) pada nomor (121) pada situasi 13 merupakan prinsip kerja sama yang mengandung maksim kualitas. Karena, saksi wanita telah memberikan informasi yang sebenarnya hal ini dapat dibuktikan dalam pernyataan saksi “Di sana 1 (satu) tahun Bu .” Artinya saksi wanita memberikan informasi kepada hakim ketua bahwa telah menjabat sebagai kepala sekolah sudah 1 (satu) tahun. Sehingga hal ini dianggap kooperatif dan termasuk maksim kualitas.

HK : “Sebelumnya dimana?”

SW : “Di SMP Z Bu .” (122) (33:15)

Tuturan saksi pria (SP) pada nomor (122) pada situasi 13 merupakan prinsip kerja sama yang mengandung maksim kualitas. Karena, saksi wanita telah memberikan informasi yang sebenarnya “*Di SMP Z Bu .*” Artinya saksi wanita memberikan informasi kepada hakim ketua bahwa mengenai nama sekolahnya. Sehingga hal ini dianggap kooperatif dan termasuk maksim kualitas.

HK : “Jadi kepala sekolah juga?”

SW : “Iya.” (123) (33:16)

Pada data tuturan saksi pria (SP) pada nomor (123) pada situasi 13 merupakan prinsip kerja sama yang mengandung maksim kualitas. Hal ini ditunjukkan karena, saksi wanita telah memberikan informasi yang sebenarnya “*Iya.*” Artinya saksi wanita memberikan informasi kepada hakim ketua bahwa di sekolahnya yang sebelumnya juga menjabat sebagai kepala sekolah. Sehingga hal ini dianggap kooperatif dan termasuk maksim kualitas.

HK : “Sudah berapa kali jadi kepala sekolah sebelumnya?”

SW : “3 (tiga) kali.” (124) (33:17)

Tuturan saksi pria (SP) pada nomor (124) pada situasi 13 merupakan prinsip kerja sama yang mengandung maksim kualitas. Karena, saksi wanita telah memberikan informasi yang sebenarnya kepada hakim ketua “*3 (tiga) kali.*” Artinya saksi wanita memberikan informasi kepada hakim ketua bahwa mengenai nama sekolahnya. Sehingga hal ini dianggap kooperatif dan termasuk prinsip kerja sama maksim kualitas.

HK : “Dari 3 (tiga) kali jadi kepala sekolah itu, masa berlaku jadi kepala sekolah sudah berapa tahun?”

SW : “10 (sepuluh) tahun.” (125) (33:26)

Tuturan saksi pria (SP) pada nomor (125) pada situasi 13 merupakan prinsip kerja sama yang mengandung maksim kualitas. Karena, saksi wanita telah memberikan informasi yang sebenarnya kepada hakim ketua hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan saksi “10 (*sepuluh*) tahun.” Artinya saksi wanita memberikan informasi kepada hakim ketua bahwa masa berlakunya 10 tahun menjadi kepala sekolah. Sehingga hal ini dianggap kooperatif dan termasuk prinsip kerja sama maksim kualitas.

HK : “Saudara sekolah negeri ya?”
SW : “Iya.” (126) (33:37)

Berdasarkan tuturan saksi wanita (SW) nomor (126) pada situasi 13 merupakan prinsip kerja sama maksim kualitas. Karena, saksi wanita memberikan kontribusi yang sebenarnya terhadap hakim ketua. Hal ini ditunjukkan dari jawaban saksi wanita (SW) “Iya.” Mengatakan bahwa sekolahnya adalah sekolah negeri. Sehingga hal ini dianggap kooperatif dan termasuk maksim kualitas.

HK : “Terus, pernah gak Saudara terima?”
SW : “Pernah.” (140) (36:49)

Pada data tuturan saksi wanita (SW) nomor (140) pada situasi 13 mengandung prinsip kerja sama maksim kualitas. Karena, saksi wanita memberikan kontribusi yang sebenarnya terhadap hakim ketua hal ini ditunjukkan dari jawaban saksi wanita (SW) “Pernah.” Artinya pernah menerima uang dari terdakwa. Sehingga hal ini dianggap kooperatif dan termasuk prinsip kerja sama maksim kualitas.

Situasi [8] :Pertanyaan diambil alih oleh hakim anggota untuk dilanjutkan sehingga kasus ini dapat dipertimbangkan dengan baik. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 14:06-20:37)

HA1 : “Uang mereka itu di mana anda terima?”
SP : “Di sekolah Pak.” (76) (14:39)

Tuturan saksi pria (SP) nomor (76) pada situasi 8 mengandung prinsip kerja sama maksim kualitas. Karena, tuturan saksi wanita (SW) memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada hakim ketua. Hal ini dibuktikan dari jawaban saksi “*Di sekolah Pak.*” Artinya saksi memberitahukan kepada hakim anggota 1 pernah menerima uang di sekolah. Sehingga hal ini dianggap kooperatif dan termasuk prinsip kerja sama maksim kualitas.

HA1 : “Anggran tahun berapa?”
SW : “Kerjanya baru tahun 2017.” (176) (48:47)

Berdasarkan tuturan saksi wanita (SW) nomor (176) pada situasi 14 mengandung prinsip kerja sama maksim kualitas. Karena, tuturan saksi wanita (SW) memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada hakim ketua. Hal ini dibuktikan dari jawaban saksi “*Kerjanya baru tahun 2017.*” Artinya saksi memberitahukan kepada hakim anggota 1 menggunakan anggaran tahun 2017. Sehingga hal ini dianggap kooperatif dan termasuk prinsip kerja sama maksim kualitas.

HA1 : “Tbu pegawai disitu tahun?”
SW : “28 September 2017.” (177) (48:12)

Berdasarkan tuturan saksi wanita (SW) nomor (177) pada situasi 14 mengandung prinsip kerja sama maksim kualitas. Karena, tuturan saksi wanita (SW) memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada hakim ketua. Hal ini dibuktikan dari jawaban saksi “*28 September 2017.*” Artinya saksi memberitahukan kepada hakim anggota 1 bahwa sejak tanggal 28 September

2017 bekerja di sekolah tersebut. Sehingga hal ini dianggap kooperatif dan termasuk prinsip kerja sama maksim kualitas.

HA1 : “Uangnya di Pakai?
SW : “2018 kejadian Juni.” (178) (48:37)

Tuturan saksi wanita (SW) nomor (178) pada situasi 14 mengandung prinsip kerja sama maksim kualitas. Karena, tuturan saksi wanita (SW) memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada hakim ketua. Hal ini dibuktikan dari jawaban saksi “2018 kejadian Juni.” Artinya saksi memberitahukan kepada hakim anggota 1 bahwa kejadian terjadi pada Bu lan juni 2018. Sehingga hal ini dianggap kooperatif dan termasuk prinsip kerja sama maksim kualitas.

Situasi [15] Hakim Ketua mengambil alih untuk bertanya pada saat persidangan. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 50:41-53:55)

HK : “Bisa gak siswa pindah sekolah tanpa dia rekomendasi dari
HK : “Saudara tidak tau jumlah siswa?”
SW : “Tau Bu .” (188) (51:55)

Tuturan saksi wanita (SW) nomor (188) pada situasi 15 mengandung prinsip kerja sama maksim kualitas. Karena, tuturan saksi wanita (SW) memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada hakim ketua. Hal ini dibuktikan dari jawaban saksi “*Tau Bu .*” Artinya dirinya sebagai kepala sekolah mengetahui jumlah siswa sehingga hal ini dianggap kooperatif dan termasuk maksim kualitas.

HK : “Iya, tata usaha naungan siapa?”
SW : “Saya” (190) (52.00)

Data tuturan saksi wanita (SW) nomor (190) pada situasi 15 mengandung prinsip kerja sama maksim kualitas. Karena, tuturan saksi wanita (SW) memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada hakim ketua. Hal ini

dibuktikandari jawaban saksi yang mengatakan “*Saya*” Artinya tata usaha dibawah naungan dirinya di sekolah tersebut sehingga hal ini dianggap kooperatif dan termasuk prinsip kerja sama maksim kualitas.

Tabel 03. Prinsip Kerja Sama Dalam Tuturan Deklaratif Maksim Kualitas Saksi Bahasa Persidangan Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru.

No	Maksim Kualitas	Nomor Urut Tuturan	Jumlah Tuturan
	Koomperatif	7, 10, 14, 15, 17, 25, 26, 30, 35, 37, 38, 45, 52, 56, 57, 61, 64, 69, 70, 76, 80, 93, 94, 103, 121,122, 123 124,125, 126, 140, 176, 177, 178, 188, 190.	36

2.2.2.3 Maksim Relevansi

Maksim relevansi adalah maksim yang menhendaki lawan bicaranya memberikan respon yang relevan saat berkomunikasi.

Situasi [4] : Hakim meminta saksi untuk menggunakan *mikrofon* karena suara saksi kecil sehingga kurang jelas terdengar. (02:41-05:01)

PU : “Kan mendapatkan uang ni, inisiatif siapa Saudara meminta uang tadi. inisiatif siapa Saudara ngambil uang tadi?”

SP : “Uang tadi ditangan saya, inisiatif kepala sekolah Pak.” (11) (03:17)

Tuturan saksi pria (SP) nomor (11) terlihat bahwa jawaban saksi telah memenuhi maksim relevansi dalam prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksim relevansi karena dalam tuturan tersebut, saksi pria (SP) memberikan

kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan saksi “*Uang tadi ditangan saya, inisiatif kepala sekolah Pak.*” relevan dengan pertanyaan penutup umum dan hubungan implikasionalnya dapat diterangkan. Tuturan saksi mengimplikasikan bahwa uang ditangganya sendiri atas inisiatif kepala sekolah.

Situasi [5] : Penutup Umum mengakhiri pertanyaannya karena sudah merasa cukup dan sidang diambil alih oleh hakim ketua untuk melanjutkan pertanyaan. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 05:01-07:19)

HK : “Tata usaha, apakah untuk anak yang pindah di sekolah itu penerimaannya melalui Saudara?”

SP : “Iya Bu , selama ini Saya.” (19) (05:22)

Tuturan saksi pria (SP) nomor (19) pada situasi 5 terlihat bahwa jawaban saksi telah memenuhi maksimum relevansi dalam prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksimum relevansi karena dalam tuturan tersebut, saksi pria (SP) memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan saksi “*Iya Bu , selama ini Saya.*” Hubungan implikasionalnya dapat diterangkan. Tuturan saksi mengimplikasikan bahwa uang selama ini siswa masuk melalui dirinya terlebih dahulu.

HK : “Yang diperintahkan kepada Saudara?”

SP : “Tak tentu, ada yang Rp 1500.000.” (21) (05:48)

Tuturan saksi pria (SP) nomor (21) pada situasi 5 terlihat bahwa jawaban saksi terhadap hakim ketua telah memenuhi maksimum relevansi dalam prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksimum relevansi karena dalam tuturan tersebut, saksi pria (SP) memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan saksi pria (SP) “*Tak tentu, ada yang Rp 1500.000.*” Hubungan implikasionalnya dapat diterangkan. Tuturan saksi

mengimplikasikan bahwa uang yang diperintahkan oleh kepala sekolah menentu jumlahnya ada yang Rp 1500.000.

- HK : “Terus yang menentukan besaran itu siapa?”
SP : “Saya dan kepala sekolah Bu .” (22) (05:56)

Tuturan saksi pria (SP) nomor (22) pada situasi 5 terlihat bahwa jawaban saksi terhadap hakim ketua telah memenuhi maksim relevansi dalam prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksim relevansi karena, dalam tuturan tersebut saksi pria (SP) memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan terhadap hakim ketua. Hal ini dapat dibuktikan dalam pernyataan saksi “*Saya dan kepala sekolah Bu .*”. Dengan demikian hubungan implikasionalnya dapat diterangkan. Tuturan saksi mengimplikasikan bahwa dalam menentukan jumlah uang yang dikutip dari orang tua siswa berdasarkan kesepakatan antara dirinya dan kepala sekolah.

- HK : “Itu kegunaan uang itu yang anaknya pindah ke situ, kan Saudara mengatakan ada Rp 1500.000 ada Rp 2300.000?”
SP : “Untuk seragam, meja sama kursi Bu .” (27) (06:58)

Berdasarkan tuturan saksi pria (SP) nomor (27) pada situasi 5 terlihat bahwa jawaban saksi pria (SP) terhadap hakim ketua telah memenuhi maksim relevansi dalam prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksim relevansi karena, dalam tuturan tersebut, saksi pria (SP) memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan terhadap hakim ketua “*Untuk seragam, meja sama kursi Bu .*” Hubungan implikasionalnya dapat diterangkan. Tuturan saksi mengimplikasikan bahwa uang yang dikutip dari orang tua siswa gunanya untuk seragam, meja dan kursi.

Situasi [6] : Saksi merasa sedih dan sangat menyesali perBu atanya karna menjalankan tugas yang salah karena permintaan Kepala Sekolah. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 07:19-10:25)

HK : “Kenapa ditagih kepada siswa yang pindah?”

SP : “Kurang tau Bu saya cuma menjalankan apa kata kepala sekolah.”
(29) (07:20)

Pada data di atas menurut teori prinsip kerja sama tuturan saksi pria telah memenuhi maksim relevansi karena, dalam tuturan tersebut, saksi pria (SP) memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan terhadap hakim ketua “*Kurang tau Bu saya cuma menjalankan apa kata kepala sekolah.*” Artinya, hubungan implikasionalnya dapat diterangkan. Tuturan saksi mengimplikasikan bahwa hanya menjalankan perintah kepala sekolah. Sehingga termasuk prinsip kerja sama maksim relevansi.

HK : “Berapa jauh dari sekolah itu?”

SP : “Sekitar 2 kilo sampai 3 kilo.” (34) (08:01)

Tuturan saksi pria (SP) yang terdapat pada nomor (34) dalam situasi 6 mengandung prinsip kerjasama maksim relevansi. Karena, memberikan kontribusi yang relevan terhadap pertanyaan hakim ketua “*Sekitar 2 kilo sampai 3 kilo.*”. Hubungan implikasionalnya dapat diterangkan, tuturan saksi mengimplikasikan bahwa jarak antara sekolah dan tukang jahit sekitar 2 (dua) kilo sampai 3 (tiga) kilo.

HK : “Terus baju mereka sudah selesai dijahit?”

SP : “Yang saya suruh sudah dijahit Bu .” (43) (10:01)

Tuturan saksi pria (SP) (43) terlihat bahwa jawaban saksi pria (SP) pada situasi 6 telah memenuhi maksim relevansi dan prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksim relevansi karena dalam tuturan tersebut, saksi pria (SP)

memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Hal ini dapat dibuktikan dalam pernyataan saksi *“Yang saya suruh sudah dijahit Bu .”* Artinya, hubungan implikasionalnya dapat diterangkan. Informasi yang diinginkan hakim ketua (HK) yaitu dengan memberitahukan bahwa baju yang sudah dijahit yaitu baju yang mendapatkan intruksinya.

HK : *“Uangnya dari mana?”*
SP : *“Dari uang masuk pembayaran Bu , Rp 1500.000 sampai Rp 2300.000.”* (44) (10:07)

Pada data tuturan saksi pria (SP) (44) terlihat bahwa jawaban saksi pria (SP) pada situasi 6 telah memenuhi maksim relevansi dan prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksim relevansi karena dalam tuturan tersebut, saksi pria (SP) memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Hal ini dapat dibuktikan dalam pernyataan saksi *“Dari uang masuk pembayaran Bu , Rp 1500.000 sampai Rp 2300.000.”* Artinya, hubungan implikasionalnya dapat diterangkan. Informasi yang diinginkan hakim ketua (HK) yaitu dengan memberitahukan bahwa sumber uang berasal dari uang pembayaran siswa pindahan.

Situasi [7] : Hakim mempertanyakan dan menghitung uang yang diperoleh dari orang tua siswa pindahan secara detail. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 10:25-14:06)

HK : *“Baik, itu Rp 23600.000 dari uang itu berapa banyak Saudara serahkan ke terdakwa ini?”*
SP : *“Rp 7600.000 Bu .”* (48) (10:34)

Tuturan saksi pria (SP) tuturan nomor (48) pada situasi 7 terlihat bahwa jawaban saksi pria (SP) telah memenuhi maksim relevansi dan prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksim relevansi karena dalam tuturan tersebut, saksi

pria (SP) memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. “Rp 7600.000 Bu .” Hubungan implikasionalnya dapat diterangkan. Informasi yang diinginkan hakim ketua (HK) yaitu dengan memberitahukan bahwa memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp 7600.000 Bu. Sehingga termasuk dalam prinsip kerja sama maksim relevansi.

HK : “Baik, terus sisanya?”
SP : “Merehap kursi, meja.” (49) (10:40)

Tuturan saksi pria (SP) tuturan nomor (49) pada situasi 7 terlihat bahwa jawaban saksi pria (SP) telah memenuhi prinsip kerja sama maksim relevansi. Dikatakan memenuhi maksim relevansi karena dalam tuturan tersebut, saksi pria (SP) memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. “*Merehap kursi, meja.*” Hubungan implikasionalnya dapat diterangkan. Informasi yang diinginkan hakim ketua (HK) yaitu dengan penggunaan siswa uang yang dikutip dari orang tua siswa. Sehingga termasuk dalam prinsip kerja sama maksim relevansi.

HK : “Terus apalagi, kan uang Rp 23600.000. Perbaiki kursi dan meja Rp10.000.000 lebih untuk terdakwa ini Rp 7000.000 baru Rp 17000.000?”
SP : “Membeli cat untuk lokal Rp 1000.000, rokok Rp 1000.000, bayar koran Rp 1000.000.” (51) (11:03)

Tuturan saksi pria (SP) tuturan nomor (51) pada situasi 7 terlihat bahwa jawaban saksi pria (SP) telah memenuhi maksim relevansi dan prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksim relevansi karena dalam tuturan tersebut, saksi pria (SP) memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. “*Membeli cat untuk lokal Rp 1000.000, rokok Rp 1000.000, bayar koran Rp 1000.000.*” Artinya, hubungan implikasionalnya dapat diterangkan. Informasi

yang diinginkan hakim ketua (HK) yaitu dengan memberitahukan secara detail mengenai penggunaan uang yang dikutip dari orang tua siswa.

HK : “Ada gak peraturan yang membolehkan kalau anak-anak pindah diminta uang?”

SP : “Saya tidak tahu Bu .” (59) (12:17)

Tuturan saksi pria (SP) tuturan nomor (59) pada situasi 7 terlihat bahwa jawaban saksi pria (SP) telah memenuhi maksim relevansi dan prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksim relevansi karena dalam tuturan tersebut, saksi pria (SP) memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. “*Saya tidak tahu Bu .*” Artinya, hubungan implikasionalnya dapat diterangkan. Informasi yang diinginkan hakim ketua (HK) yaitu dengan memberitahukan ketidaktahuan dirinya terhadap tindakan mengutip merupakan tindakan yang dilarang dalam dunia pendidikan.

HK : “Yang sudah bayar sudah diserahkan ke tukang jahit?”

SP : “Mau diserahkan Bu .” (62) (12:37)

Tuturan saksi pria (SP) tuturan nomor (62) pada situasi 7 terlihat bahwa jawaban saksi pria (SP) telah memenuhi maksim relevansi dan prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksim relevansi karena dalam tuturan tersebut, saksi pria (SP) memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Hal ini dapat dibuktikan dalam pernyataan “*Mau diserahkan Bu.*” Artinya, hubungan implikasionalnya dapat diterangkan. Informasi yang diinginkan hakim ketua (HK) yaitu dengan memberitahukan akan menyerahkan uang kepada tukang jahit. Sehingga termasuk prinsip kerja sama maksim relevansi.

HK : “Kenapa gak ambil dari situ, kenapa gak ambil dari anggaran sekolah?”

SP : “Saya cuma belum keluar Bu , makanya didahulukan.” (65) (13:00)

Tuturan saksi pria (SP) tuturan nomor (65) pada situasi 7 terlihat bahwa jawaban saksi pria (SP) telah memenuhi maksim relevansi dan prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksim relevansi karena dalam tuturan tersebut, saksi pria (SP) memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Hal ini dapat dibuktikan dalam pernyataan “*Saya cuma belum keluar Bu , makanya didahulukan.*” Hubungan implikasionalnya dapat diterangkan. Informasi yang diinginkan hakim ketua (HK) yaitu dengan memberitahukan alasan mengutip uang dari orang tua siswa karena anggaran pada saat itu belum keluar sehingga didahulukan dengan cara meminta uang kepada orang tua siswa.

HK : “Oh, belum keluar baik, apa yang melandasi pikiran Saudara mau melakukan itu?”

SP : “Karena itu suruhan kepala sekolah Bu .” (66) (13:14)

Data tuturan saksi pria (SP) tuturan nomor (66) pada situasi 7 terlihat bahwa jawaban saksi pria (SP) telah memenuhi maksim relevansi dan prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksim relevansi karena dalam tuturan tersebut, saksi pria (SP) memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Hal ini dapat dibuktikan dalam pernyataan “*Karena itu suruhan kepala sekolah Bu .*” Hubungan implikasionalnya dapat diterangkan. Informasi yang diinginkan hakim ketua (HK) yaitu dengan memberitahukan bahwa hal yang melandasi melakukan perbuatan yang salah itu adalah karena suruhan kepala sekolah sehingga termasuk dalam prinsip kerja sama maksim relevansi.

HK : “Mesti itu salah?”

SP : “Ya, kalau salah saya gak mau Bu .” (67) (13:22)

Berdasarkan tuturan saksi pria (SP) tuturan nomor (67) pada situasi 7 terlihat bahwa jawaban saksi pria (SP) telah memenuhi maksim relevansi dan prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksim relevansi karena dalam tuturan tersebut, saksi pria (SP) memberikan kontribusi yang relevan kepada hakim ketua dengan masalah pembicaraan. Hubungan implikasionalnya dapat diterangkan. Informasi yang diinginkan hakim ketua (HK) yaitu dengan memberitahukan apa saja yang diintruksikan kepala sekolah kepada dirinya dilaksanakan kecuali jika itu salah.

Situasi [8] : Pertanyaan diambil alih oleh hakim anggota untuk dilanjutkan sehingga kasus ini dapat dipertimbangkan dengan baik. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 14:06-20:37)

HA1 : “Kenapa gak ada?”
SP : “Takutnya tersinggung.” (87) (16:26)

Berdasarkan tuturan saksi pria (SP) tuturan nomor (87) pada situasi 8 terlihat bahwa jawaban saksi pria (SP) telah memenuhi maksim relevansi dan prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksim relevansi karena dalam tuturan tersebut, saksi pria (SP) memberikan kontribusi yang relevan kepada hakim ketua dengan masalah pembicaraan “*Takutnya tersinggung.*” Hubungan implikasionalnya dapat diterangkan. Informasi yang diinginkan hakim ketua (HK) yaitu dengan memberitahukan kepada lawan tuturnya bahwa takut kepala sekolah tersinggung apabila mengatakan perbuatan mengutip adalah perbuatan yang salah dan melanggar aturan dalam dunia pendidikan.

HA1 : “Apa katanya?”
SP : “Ibu kepala sekolah telfon saya “Jadi anak itu masuk Pak? “Jadi Bu “Berapa uangnya? “Rp 2000.000 “Bisa diantar ke rumah gak? “Gak bisa saya ada tamu”. Saya suruh anak saya jemput selepas itu direkam sama penyelidik, Ibu sekarang dilaporkan.” (92) (18:29)

Tuturan saksi pria (SP) tuturan nomor (92) pada situasi 8 terlihat bahwa jawaban saksi pria (SP) telah memenuhi maksim relevansi dan prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksim relevansi karena dalam tuturan tersebut, saksi pria (SP) memberikan kontribusi yang relevan kepada hakim ketua dengan masalah pembicaraan *“Ibu kepala sekolah telfon saya “jadi anak itu masuk Pak? “Jadi Bu “Berapa uangnya?” “Rp 2000.000 “Bisa diantar ke rumah gak? “Gak bisa saya ada tamu. Saya suruh anak saya jemput selepas itu direkam sama penyelidik, Ibu sekarang dilaporkan.”* Hubungan implikasionalnya dapat diterangkan maksudnya saksi pria (SP) menjelaskan isi percakapan di via telepon bersama terdakwa. Sehingga dianggap memenuhi prinsip kerja sama maksim relevansi.

Situasi [9] : Hakim ketua mengambil alih sidang dan mulai mengajukan pertanyaan kepada saksi. (Data ini berada dalam file 1 durasi 20:37-24:39)

HA1 : “Namun di BAP 4 stel mana yang benar?”

SP : “Ada 3 stel ada 4 stel.” (100) (22:31)

Berdasarkan tuturan saksi pria (SP) tuturan nomor (100) pada situasi 9 terlihat bahwa jawaban saksi pria (SP) telah memenuhi maksim relevansi dan prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksim relevansi karena dalam tuturan tersebut, saksi pria (SP) memberikan kontribusi yang relevan kepada hakim ketua dengan masalah pembicaraan *“Ada 3 stel ada 4 stel.”* Hubungan implikasionalnya dapat diterangkan. Informasi yang diinginkan hakim ketua (HK) yaitu dengan memberitahukan kepada lawan tuturnya bahwa baju seragam siswa ada 3 stel dan ada juga yang 4 stel.

Situasi [10] : Saat hakim memberi kesempatan kepada terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi terdakwa malah menanggapi dan hakim terlihat kesal. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 24:39- 28:21)

HK : “Baik, itu untuk keterangan Saudara nanti keterangan saudar disangkal, katanya yang menetakan biaya katanya kesePakatan jadi katanya gak inisitif sendri, yang diperintahkan baju dinas diganti dan kursi rusak hanya di peruntukan tapi tidak ditentukan kisaranya tapi yang menentukan Saudara. Itu kata terdakwa terus mau berubah keterangan?”

SP : “Tidak Bu .” (Saksi terlihat sedih sekali matanya berkaca-kaca karena banyak tuduhan dari keterangan terdakwa yang ditujukan kepadanya) (107) (27:47)

Berdasarkan tuturan saksi pria (SP) tuturan nomor (107) pada situasi 10 terlihat bahwa jawaban saksi pria (SP) telah memenuhi maksim relevansi dan prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksim relevansi karena dalam tuturan tersebut, saksi pria (SP) memberikan kontribusi yang relevan kepada hakim ketua dengan masalah pembicaraan “*Tidak Bu .*” Artinya, hubungan implikasionalnya dapat diterangkan. Informasi yang diinginkan hakim ketua (HK) yaitu dengan memberitahukan tetap mempertahankan keteranganya dan tidak mau merubah keterangan. Sehingga termasuk prinsip kerja sama maksim relevansi.

Situasi [12] : Hakim mempersilahkan penuntut umum untuk terlebih dahulu bertanya kepada saksi. (Data ini berada dalam file 1 durasi 29.32-30.00)

PU : “Itu berapa kali?”

SW : “Itu saya gak ingat.” (111) (29:51)

Berdasarkan tuturan saksi wanita (SW) tuturan nomor (111) pada situasi 12 terlihat bahwa jawaban saksi wanita (SW) telah memenuhi maksim relevansi dan prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksim relevansi karena dalam tuturan tersebut, saksi wanita (SW) memberikan kontribusi yang relevan kepada penuntut umum dengan masalah pembicaraan “*Itu saya gak ingat.*”. Hubungan

implikasionalnya dapat diterangkan. Informasi yang diinginkan penuntut umum yaitu dengan memberitahukan bahwa dirinya tidak mengingat berapa kali menerima uang. Sehingga termasuk dalam prinsip kerja sama maksim relevansi.

Situasi [13] : Hakim ketua meminta pertanyaanya merujuk pada kesaksian terdakwa sebagai saksi dari E. dan kemudian sidang diambil alih kembali kepada hakim ketua. (Data ini berada di file 1 durasi 30.05-38.42)

HK : “Ada gak di sekolah anggaran meja dan kursi?”

SW : “Ibu , ada tetapi tidak pada masa itu dan untuk itu fokusnya tidak ada.” (133) (34:42)

Tuturan saksi pria (SP) yang terdapat pada nomor (133) dalam situasi 13 mengandung prinsip kerja sama maksim relevansi. Karena, memberikan kontribusi yang relevan terhadap pertanyaan hakim ketua “*Ibu , ada tetapi tidak pada masa itu dan untuk itu fokusnya tidak ada.*” Hubungan implikasionalnya dapat diterangkan, tuturan saksi mengimplikasikan bahwa punya anggaran sekolah tetapi pada masa itu belum keluar sehingga meminta uang kepada orang tua siswa untuk didahulukan.

HK : “Iya ada, tapi sama kayak keterangan Saudara tadi bisa dicairkan baik, kalau emang tidak ada kursi dan meja kenapa diterima?”

SW : “Nah saya itu Bu kalau ada yang mau bayar silahkan.” (134) (35.04)

Tuturan saksi wanita nomor (134) pada situasi 13 termasuk dalam maksim relevansi. Karena, memberikan informasi yang relevan terhadap topik pembicaraan. Hal ini dapat dibuktikan dalam pernyataan saksi wanita (SW) “*Nah saya itu Bu kalau ada yang mau bayar silahkan.*” Artinya saat hakim ketua bertanya jika tidak ada kursi kenapa siswa diterima. Dan saksi wanita menjawab jika ada siswa mau membayar kursi dan meja maka pihak sekolah akan menerimanya. Sehingga, termasuk dalam prinsip kerja sama maksim relevansi.

- HK : “Iya kan Rp 7000.000 dikasih sama Saudara?”
SW : “Nah Rp 7000.000 itu saya gak tau karena saya nagasih-ngasih.”
(138) (36:43)

Tuturan tuturan saksi wanita (SW) tuturan nomor (138) pada situasi 13 terlihat bahwa jawaban saksi wanita (SW) telah memenuhi maksim relevansi dan prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksim relevansi karena dalam tuturan tersebut, saksi wanita (SW) memberikan kontribusi yang relevan kepada hakim ketua dengan masalah pembicaraan “*Nah Rp 7000.000 itu saya gak tau karena saya nagasih-ngasih.*” Hubungan implikasionalnya dapat diterangkan. Informasi yang diinginkan hakim ketua yaitu dengan memberitahukan bahwa dirinya hanya memberikan uang dan tidak terlalu mengingatnya. Sehingga termasuk dalam prinsip kerja sama maksim relevansi.

- HK : “Iya kan Rp 7000.000 dikasih sama Saudara”
SW : “Nah Rp 7000.000 itu saya gak tau karena saya ngasih-ngasih.” (138)
(36:43)
HK : “Iya terus?”
SW : “Gak ingat saya jumlahnya sampai Rp 7000.000.” (139) (36:48)

Tuturan saksi wanita (SW) nomor 139 pada situasi 13 merupakan prinsip kerja sama maksim relevansi. Karena, memberikan informasi yang relevan. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan saksi kepada hakim ketua “*Gak ingat saya jumlahnya sampai Rp 7000.000.*” Artinya ketika hakim ketua bertanya mengenai uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi wanita (SW) tetapi saksi mengetakan tidak mengingat jumlahnya sampai RP 7000.000. Sehingga, termasuk prinsip kerja sama maksim relevansi.

- HA1 : “Baik hanya 10? (sepuluh).”
SW : “Setau saya.” (143) (37:34)

Tuturan tuturan saksi wanita (SW) tuturan nomor (143) pada situasi 13 terlihat bahwa jawaban saksi wanita (SW) telah memenuhi maksim relevansi dan prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksim relevansi karena dalam tuturan tersebut, saksi wanita (SW) memberikan kontribusi yang relevan kepada hakim anggota 1 dengan masalah pembicaraan “*Setau saya.*” Hubungan implikasionalnya dapat diterangkan. Informasi yang diinginkan hakim ketua yaitu dengan memberitahukan bahwa dirinya mengetahui hanya 10 siswa pindahan. Sehingga termasuk dalam prinsip kerja sama maksim relevansi.

Situasi [14] : Sidang diambil alih oleh Hakim anggota (1) dan memperjelas kembali maksud pertanyaannya. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 38:42-50:41)

HA1 : “Ha (hakim terkejut) dia yang minta? Karena untuk Pakaian, kursi, meja ya kan itu kan minta ke orang tua.”

SW : “Iya Pak terdakwa ini yang minta langsung kepada saya.” (150) (39:39)

Tuturan tuturan saksi wanita (SW) tuturan nomor (150) pada situasi 13 terlihat bahwa jawaban saksi wanita (SW) telah memenuhi maksim relevansi dan prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksim relevansi karena dalam tuturan tersebut, saksi wanita (SW) memberikan kontribusi yang relevan kepada hakim anggota 1 dengan masalah pembicaraan “*Iya Pak terdakwa ini yang minta langsung kepada saya.*” Hubungan implikasionalnya dapat diterangkan. Jawaban yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan oleh hakim anggota 2 yang dan dapat disimpulkan bahwa terdakwa meminta uang langsung kepada dirinya. Sehingga termasuk dalam prinsip kerja sama maksim relevansi.

HA1 : “Saudara bertanggung jawab gak?”

SW : “Kalau saya bertanggung jawab Pak memang harus.” (152) (41:26)

Berdasarkan tuturan saksi wanita (SW) tuturan nomor (152) pada situasi 14 terlihat bahwa jawaban saksi wanita (SW) telah memenuhi maksim relevansi dan prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksim relevansi karena dalam tuturan tersebut, saksi wanita (SW) memberikan kontribusi yang relevan kepada hakim anggota 1 dengan masalah pembicaraan “*Kalau saya bertanggung jawab Pak memang harus.*”. Hubungan implikasionalnya dapat diterangkan, maksudnya memberitahukan bahwa dirinya bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Oleh karena itu, termasuk dalam prinsip kerja sama maksim relevansi.

HA1 : “Bu kan itu persoalannya sekarang, ada uang ada kursi meja diperbaiki terdakwa itu. Uang dari mana, ada uang Rp 1000.000 bayar koran uang dari mana?”

SW : “Uang yang langsung dia berurusan dengan orang tua.” (162) (43:31)

Tuturan saksi wanita (SW) tuturan nomor (162) pada situasi 14 terlihat bahwa jawaban saksi wanita (SW) telah memenuhi maksim relevansi dan prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksim relevansi karena dalam tuturan tersebut, saksi wanita (SW) memberikan kontribusi yang relevan kepada hakim anggota 1 dengan masalah pembicaraan “*Uang yang langsung dia berurusan dengan orang tua.*” Hubungan implikasionalnya dapat diterangkan. Artinya saksi wanita mengatakan bahwa uang hasil mengutip terdakwalah yang berurusan langsung dengan orang tua siswa. Sehingga termasuk dalam prinsip kerja sama maksim relevansi.

HA1 : “Uang dari mana katanya?”

SW : “Uang dari mengerjakan kursi meja.”(167) (44:54)

Tuturan saksi wanita (SW) tuturan nomor (167) pada situasi 14 terlihat bahwa jawaban saksi wanita (SW) telah memenuhi maksim relevansi dan prinsip

kerja sama. Dikatakan memenuhi maksim relevansi karena dalam tuturan tersebut, saksi wanita (SW) memberikan kontribusi yang relevan kepada hakim anggota 1 dengan masalah pembicaraan “*Uang dari mengerjakan kursi meja.*”. Hubungan implikasionalnya dapat diterangkan. Artinya memberitahukan bahwa sumber uangnya didapat dari mengerjakan kursi dan meja. Sehingga termasuk dalam prinsip kerja sama maksim relevansi.

Situasi [15] Hakim Ketua mengambil alih untuk bertanya pada saat persidangan. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 50:41-53:55)

HK : “Loh makanya saya tanya Saudara jawab, bisa gak masuk tanpa rekomendasi kenapa Saudara terima terima yang 7 (tujuh)?”

SW : “Saya tidak terima Bu , begitu datang kursi baru ada anak tapi belum rekomendasi ke saya.” (187) (51:46)

Tuturan saksi wanita (SW) tuturan nomor (187) pada situasi 15 terlihat bahwa jawaban saksi wanita (SW) telah memenuhi maksim relevansi dan prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksim relevansi karena dalam tuturan tersebut, saksi wanita (SW) memberikan kontribusi yang relevan kepada hakim anggota 1 dengan masalah pembicaraan “*Saya tidak terima Bu , begitu datang kursi baru ada anak tapi belum rekomendasi ke saya.*” Artinya tidak menerima siswa yang tidak ada surat rekomendasi dan baru mengetahui kalau ada siswa yang belum terdaftar. Sehingga termasuk dalam prinsip kerja sama maksim relevansi.

HK : “Yaudah, bagaimana mungkin dia guru honor macam-macamkan tanpa Saudara. Logikanya disitu, gak usah ngeles kemana-mana ini sudah terjadi. Logika hukum disitu, gak mungkin sekolah asal mengeluarkan tanpa rekomendasi itu peraturan dunia pendidikan. Karena kami sering pindahkan anak kami kalau tidak ada tidak bisa.”

SW : “Ternyata tidak ada Bu .” (192) (53.05)

Tuturan saksi wanita (SW) tuturan nomor (192) pada situasi 15 terlihat bahwa jawaban saksi wanita (SW) telah memenuhi maksim relevansi dan prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksim relevansi karena dalam tuturan tersebut, saksi wanita (SW) memberikan kontribusi yang relevan kepada hakim anggota 1 dengan masalah pembicaraan “*Ternyata tidak ada Bu .*” Artinya tidak memiliki surat rekomendasi. Sehingga termasuk dalam prinsip kerja sama maksim relevansi.

Tabel 04. Prinsip Kerja Sama Dalam Tuturan Deklaratif Maksim Relevansi Saksi Bahasa Persidangan Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru.

No	Maksim Relevansi	Nomor Urut Tuturan	Jumlah Tuturan
	Koomperatif	11, 19, 21, 22, 27, 29, 34, 43, 44, 48, 49, 51, 59, 62, 65, 66, 67, 92, 100, 107, 111, 133, 134, 138, 139 143, 150, 152, 162, 167, 186, 187, 192.	33

4.Maksim Pelaksanaan/Cara Tuturan Saksi.

Maksim pelaksanaan/ cara adalah menghendaki bertutur tidak taksa dan tidak tidak kabur sehingga lawan tutur dapat memahami apa yang disampaikan dengan baik.

Situasi [3] : Hakim memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk bertanya kepada saksi. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 01:50-02:41)

PU : “Berapa uang yang sudah ada di map sebelumnya?”
 SP : “Waktu ditangkap Bu Rp 2000.000.” (9) (02:08)

Pada data di atas menurut teori prinsip kerja sama telah memenuhi maksim pelaksanaan/cara prinsip kerja sama. Dikatakan memenuhi maksim pelaksanaan/cara karena dalam tuturan tersebut, saksi pria (SP) memberikankontribusisecara langsung dan jelas dan tidak berlebihan “*Waktu ditangkap Bu Rp 2000.000.*” Tuturan saksi pria (SP) adalah yang diharapkan hakim ketua yang langsung disimpulkan oleh hakim ketua tersebut, tanpa proses pemahaman, karena jawaban tersebut tidak panjang dan berbelit.

TABEL 05. Prinsip Kerja Sama Dalam Tuturan Deklaratif Maksim Pelaksanaan/Cara Saksi Bahasa Persidangan Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru.

No	Maksim Pelaksanaan/ Cara	Nomor Urut Tuturan	Jumlah Tuturan
1	Koomperatif	9	1

2.2.3 Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Tuturan Deklaratif Saksi Bahasa Persidangan Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru.

2.2.3.1 Maksim Kuantitas.

Tuturan tidak kooperatif yaitu tuturan yang memberikan kontribusi yang berlebih-lebihan kepada lawan tuturnya. Tuturan tiak kooperatif dapat dilihat dalam tuturan antara hakim, penuntut umum, dan saksi di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru, pada situasi dan nomor utut berikut ini.

Situasi [4] : Hakim meminta saksi untuk menggunakan *mikrofon* karena suara saksi kecil sehingga kurang jelas terdengar. (02:41-05:01)

PU : “Nah itu yang saya maksud pertanyaan saya, uang itu dikembalikan semua?”

SP : “Diserahkan kepada kepala sekolah Pak sebagian yang ada Rp 500.000 ada juga Rp 1000.000.” (12) (03:40)

Konteks situasi tutur 4 tidak memenuhi maksim kuantitas pada prinsip kerja sama. Dikatakan tidak memenuhi maksim kuantitas karena dalam tuturan tersebut, saksi pria (SP) telah memberikan kontribusi yang berlebihan. Hal ini dibuktikan “*Diserahkan kepada kepala sekolah Pak sebagian yang ada Rp 500.000 ada juga Rp 1000.000.*” Dengan saksi pria (SP) menjelaskan sebagian yang ada Rp 500.000 ada juga Rp 1000.000. Penuntut umum sudah mengerti dengan maksud saksi pria (SP) tersebut.

Situasi [5] : Penutup Umum mengakhiri pertanyaanya karena sudah merasa cukup dan sidang diambil alih oleh hakim ketua untuk melanjutkan pertanyaan. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 05:01-07:19)

HK : “Baik, selama ini dari kan Saudara tadi mengatakan yang pindah sekolah lalu meminta uang Rp. 2300.000 tiap orang?”

SP : “Gak Bu ada yang Rp 2300.000” (20) (05:40)

Pada data di atas menurut teori prinsip kerja sama tuturan saksi pria (SP) melanggar prinsip kerja sama maksim kuantitas. Dikatakan tidak memenuhi maksim kuantitas karena dalam tuturan tersebut, saksi pria (SP) telah memberikan kontribusi yang berlebihan. Hal ini dibuktikan “*Gak Bu ada yang Rp 2300.000.*”

Dengan saksi pria (SP) menjelaskan sebagian yang ada yang membayar Rp 2300.000.

HK : “Karena sebagai guru honor itu semuanya yang gaji Dinas Pendidikan.” (72) (13:50)

SP : “Tidak semua Bu , ada honor komite juga Bu .”

Situasi [7] : Hakim mempertanyakan dan menghitung uang yang diperoleh dari orang tua siswa pindahan secara detail. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 10:25-14:06)

Tuturan saksi pria (SP) dalam tuturan nomor (72) pada situasi 7 tidak memenuhi maksim kuantitas pada prinsip kerja sama. Dikatakan tidak memenuhi maksim kuantitas karena dalam tuturan tersebut, saksi pria (SP) telah memberikan kontribusi yang berlebihan hal ini dibuktikan dengan pernyataan “*Tidak semua Bu , ada honor komite juga Bu .*” Dengan saksi pria (SP) menjelaskan tidak semua honor dinas sebenarnya hakim ketua sudah paham tanpa mengatakan ada honor komite. Sehingga termasuk prinsip kerja sama maksim kuantitas.

Situasi [8] : Pertanyaan diambil alih oleh hakim anggota untuk dilanjutkan sehingga kasus ini dapat dipertimbangkan dengan baik. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 14:06-20:37)

HA1 : “Tadi Saudara jelaskan seBukan ada 17 siswa yang melalui anda dan anda terima uangnya?”

SP : “Iya Pak, ada yang bayar separo.” (75) (14:33)

Tuturan saksi pria (SP) dalam tuturan nomor (75) pada situasi 8 tidak memenuhi maksim kuantitas pada prinsip kerja sama. Dikatakan tidak memenuhi maksim kuantitas karena dalam tuturan tersebut, saksi pria (SP) telah memberikan kontribusi yang berlebihan “*Iya Pak, ada yang bayar separo.*”. Dengan saksi pria (SP) mengatakan iya Pak Hakim ketua sudah mengerti dengan maksud saksi pria (SP) tersebut tanpa memberikan informasi yang membayar hanya separo.

HA1 : “Kenapa bisa tidak tau?”

SP : “Biasa Pak, cuma kalau permintaan kepala sekolah baru saya apa.” (85) (15:53)

Tuturan saksi pria (SP) dalam tuturan nomor (85) pada situasi 8 tidak memenuhi maksim kuantitas pada prinsip kerja sama. Dikatakan tidak memenuhi

maksim kuantitas karena dalam tuturan tersebut, saksi pria (SP) telah memberikan kontribusi yang kurang hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan hakim “*Biasa Pak, cuma kalau permintaan kepala sekolah baru saya apa.*” Sehingga hakim anggota 1 sulit memahami apa yang disampaikan saksi pria (SP) oleh karena itu, termasuk dalam prinsip kerja sama pelanggaran maksim kuantitas.

Situasi [9] : Hakim ketua mengambil alih sidang dan mulai mengajukan pertanyaan kepada saksi. (Data ini berada dalam file 1 durasi 20:37-24:39)

HA1 : “Berarti uang Rp 2500.000 tersebut ada 3 stel. Baju seragam sekolah BaPak selaku TU berapa seragam anak sekolah?”

SP : “Kalau biasanya harganya, biasa satu itu harganya” (pembicaraan langsung si potong hakim karena Bu kan itu yang hakim harapkan jawabanya) (101) (22:49)

Tuturan saksi pria (SP) dalam tuturan nomor (101) pada situasi 9 tidak memenuhi maksim kuantitas pada prinsip kerja sama. Dikatakan tidak memenuhi maksim kuantitas karena dalam tuturan tersebut, saksi pria (SP) telah memberikan kontribusi kurang hal ini memBu at bertanya kembali. Sehingga dianggap pelanggaran dalam prinsip kerja sama maksim kauntitas.

Situasi [13] : Hakim ketua meminta pertanyaanya merujuk pada kesaksian terdakwa sebagai saksi dari E. dan kemudian sidang diambil alih kembali kepada hakim ketua. (Data ini berada di file 1 durasi 30.05-38.42)

HK : “Seperti kata terdakwa ini tadi ia menyerahkan kepada Saudara saat jadi saksi sekitar Rp 7000.000 lebih?”

SW : “Kemungkinan itu benar, karena saya tidak pernah menghitungnya.” (115) (30:06)

Tuturan saksi wanita (SW) dalam tuturan nomor (115) pada situasi 13 tidak memenuhi maksim kuantitas pada prinsip kerja sama. Dikatakan tidak memenuhi maksim kuantitas karena dalam tuturan tersebut, saksi wanita (SW) telah

memberikan kontribusi kurang hal ini membuat bertanya kembali. Sehingga dianggap pelanggaran dalam prinsip kerja sama maksim kauntitas.

- HK : “Iya, dari yang Rp 7000.000 lebih itu kemana Saudara Pakai?
SW : “Uang tersebut Bu karena beliau ini anaknya ditangkap narkoba di Bengkalis. dia mau pergi sidang dan Bu tuh uang.” (116) (31:17)

Tuturan saksi wanita (SW) dalam tuturan nomor (116) pada situasi 13 tidak memenuhi maksim kuantias pada prinsip kerja sama. Dikatakan tidak memenuhi maksim kuantitas karena dalam tuturan tersebut, saksi wanita (SW) telah memberikan kontribusi kurang hal ini membuat bertanya kembali. Sehingga dianggap pelanggaran dalam prinsip kerja sama maksim kauntitas.

- HK : “Setelah di sekolah ini, Saudara kan tau tidak boleh ada pungutan. Terus kenapa berani mengadakan pungutan?”
SW : “Saya tidak mungut cuma saya bilang.” (129) (33:53)

Tuturan saksi wanita (SW) dalam tuturan nomor (129) pada situasi 13 tidak memenuhi maksim kuantias pada prinsip kerja sama. Dikatakan tidak memenuhi maksim kuantitas karena dalam tuturan tersebut, saksi wanita (SW) telah memberikan kontribusi kurang lengkap hal inimembuat hakim ketua kesulitan memahami apa yang ingin disampaikan oleh saksi wanita. Sehingga dianggap pelanggaran dalam prinsip kerja sama maksim kauntitas.

- HK : “Itu namanya apa?”
SW : “Orang luar menyangka cuma gak.” (132) (34:36)

Berdasarkan tuturan saksi wanita (SW) dalam tuturan nomor (132) pada situasi 13 tidak memenuhi maksim kuantias pada prinsip kerja sama. Dikatakan tidak memenuhi maksim kuantitas karena dalam tuturan tersebut, saksi wanita (SW) telah memberikan kontribusi yang kurang. Sehingga hakim ketua kesulitan

dalam memahami apa yang ingin disampaikan. Hal ini dianggap pelanggaran dalam prinsip kerja sama maksim kauntitas.

HA1 : “Baik Saudara saksi, menurut keterangan terdakwa ada 17 (tujuhbelas) orang siswa pindahan. APakah Saudara selama Saudara jadi kepala sekolah situ setiap orang itu dilaporkan terhadap anda?”

SW : “Yang dilaporkan kepada saya Pak 10 (sepuluh) dan saya terkejut ko 17 (tujuh belas) karena yang lain.” (142) (37:44)

Tuturan saksi wanita (SW) dalam tuturan nomor (142) pada situasi 13 tidak memenuhi maksim kuantitas pada prinsip kerja sama. Dikatakan tidak memenuhi maksim kuantitas karena dalam tuturan tersebut, saksi wanita (SW) telah memberikan kontribusi yang berlebihan terhadap hakim anggota 1. Sebenarnya apabila saksi wanita (SW) mengatakan yang dilaporkan 10 saja sudah dapat dipahami. Sehingga dianggap pelanggaran dalam prinsip kerja sama maksim kauntitas.

HA1 : “Baik, nah kemudian ada dikutip uang apakah dilaporkan si A sekian rupiah?”

SW : “Tidak ada, karena itu urusannya suruh dia cari Pakaian sendiri.” (145) (38:32)

Tuturan saksi wanita nomor (145) dalam situasi 13 termasuk prinsip kerja pelanggaran maksim kuantitas. Karena, saksi memberikan kontribusi yang berlebihan. Hal ini dapat dibuktikan dalam pernyataan saksi “*Tidak ada, karena itu urusannya suruh dia cari Pakaian sendiri.*” Sebenarnya saat saksi mengatakan tidak ada saja sudah dapat dipahami oleh hakim ketua. sehingga dianggap tidak kooperatif dan termasuk maksim kuantitas.

Situasi [14] : Sidang diambil alih oleh Hakim anggota (1) dan memperjelas kembali maksud pertanyaanya. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 38:42-50:41)

HA1 : “Apakah anda sebagai kepala sekolah bolehkan mengutip uang tanpa Saudara tau?”

SW : “Selama ini tidak Pak, saya tidak minta uang Pak.” (149) (39:17)

Tuturan saksi wanita (SW) dalam (149) pada situasi 14 merupakan tuturan yang tidak memenuhi maksim kuantitas. Hal ini terlihat jelas dengan jawaban yang diberikan oleh saksi wanita (SW) berlebih-lebihan sehingga tidak memenuhi maksim kuantitas. Tuturan saksi wanita (SW) dalam (149) dianggap tidak kooperatif, yakni tidak sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HA1 : “Iya, baik begini dengarkan dulu pertanyaannya baik-baik. Krangka pertanyaannya itu kan sekolah Saudara, otoritas semua Saudara yang bertanggungjawab, tanggungjawab Saudara itu terbagi ke staf yang lain. Ini soal uang, tahun lalu saya pindahkan anak saya ke sini persis seperti ini saya. Saya sebagai orang tua marah saya tau tidak boleh tapi supaya anak saya sekolah, saya tunggu setelah dia tamat kursi meja di bawa pulang setelah tamat memang tidak, satu saya sedih meja kemarin kemana kepala sekolah terus sebulan penuh saya datang meja barukah atau tidak. Ternyata tidak baru, ini nyata saya alami SMA B baru kursi meja Saudara tidak tau, ini menjengkelkan orang tua. Berapa uang yang dikutip dia. Tau kalau Saudara mestinya tau pertanyaannya adalah berapa uang yang dikutipnya Saudara tidak tau.”

SW : “Kalau saya.” (151) (41:21)

Tuturan saksi wanita (SW) dalam (151) pada situasi 14 merupakan tuturan yang tidak memenuhi maksim kuantitas. Hal ini terlihat jelas dengan jawaban yang diberikan oleh saksi wanita (SW) kurang sehingga kurang jelas dan tidak memenuhi maksim kuantitas. Tuturan saksi wanita (SW) dalam (151) dianggap tidak kooperatif, yakni tidak sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HA1 : “Tadi sudah jelas, dia terangkan Rp 10.000.000 untuk rehap kursi meja dia terangkan.”

SW : “Iya Pak, kenyataan saya disana lebih dari 50 (lima puluh) yang tidak layak Pakai lagi.” (161) (43:11)

Tuturan saksi wanita (SW) dalam (161) pada situasi 14 merupakan tuturan yang tidak memenuhi maksim kuantitas. Hal ini terlihat jelas dengan jawaban yang diberikan oleh saksi wanita (SW) berlebihan sehingga kurang jelas dan tidak memenuhi maksim kuantitas. Hal ini dapat dibuktikan dalam pernyataan saksi *“Iya Pak, kenyataan saya disana lebih dari 50 (lima puluh) yang tidak layak Pakai lagi.”* Tuturan saksi wanita (SW) dalam (161) dianggap tidak kooperatif, yakni tidak sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HA1 : *“Sumber uangnya kan gak mungkin uang yan diambil dari perbaiki”*
SW : *“Karena orang tua siswa minta jadi dia.”* (168) (44:15)

Tuturan saksi wanita (SW) dalam (168) pada situasi 14 merupakan tuturan yang tidak memenuhi maksim kuantitas. Hal ini terlihat jelas dengan jawaban yang diberikan oleh saksi wanita (SW) kurang sehingga kurang jelas dan tidak memenuhi maksim kuantitas. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan saksi wanita kepada hakim anggota 1 *“Karena orang tua siswa minta jadi dia.”* Tuturan saksi wanita (SW) dalam (161) dianggap tidak kooperatif, yakni tidak sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

Situasi [15] Hakim Ketua mengambil alih untuk bertanya pada saat persidangan.
(Data ini berada di dalam file 1 durasi 50:41-53:55)

HK : *“Tidak, yang tanda tangan rekomendasi siapa?”*
SW : *“Saya, ada sebagian yang tidak saya tanda tangan.”* (184) (51.01)

Tuturan SW dalam (184) pada situasi 15 merupakan tuturan yang tidak memenuhi maksim kuantitas, hal ini terlihat jelas bahwa jawaban diberikan oleh saksi wanita (SW) berlebih-lebihan sehingga tidak memenuhi maksim kuantitas.

Tuturan SW dalam (184) dianggap tidak kooperatif, yakni tidak sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

Situasi [18] : Sidang diambil oleh hakim anggota 2 (dua) untuk meminta keterangan terdakwa. (Data ini berada dalam file 2 durasi 05:35-25.24)

HA2 : “Aturan apa yang Ibu langgar? Kami gak tau aturan apa disekolah itu aturan apalah?”

SW : “Maaf yang mulia saya merasa selama ini.” (195) (14.23)

Tuturan SW dalam (195) pada situasi 18 merupakan tuturan yang tidak memenuhi maksim kuantitas, hal ini terlihat jelas bahwa jawaban diberikan oleh saksi wanita (SW) kurang sehingga tidak memenuhi maksim kuantitas. Tuturan SW dalam (195) dianggap tidak kooperatif, yakni tidak sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

HA2 : “Kan saya dah bilang bohongilah kami di dunia ini, camkan dengan baik juga jangan bikin orang jengkel. Gak ada yang masuk diakal omongan Ibu ya dihubungkan dengan saksi-saksi yang jelas, mak itam orang kepercayaan Ibu tangan kanan Ibu tanpa tata usaha gak jalan sekolah. Masuk diakal dia saya ini honorer di bawah perintah pimpinan apa yang dikatakan kepala sekolah itulah yang saya laksanakan. Masuk diakal ya tapi dia bermain dibelakang itu persoalan lain lagi. Tanggung jawab Ibu tetap Ibu yang terima memang rekomendasi Ibu 10 (sepuluh) yang diterima 17 (tujuh belas) itu secara gak akan diterima tanpa dikoordinir. Sebenarnya Ibu berda di akhir cerita, kejujuran Ibu di sanalah letaknya ya berat hukumanya kebohongan yang nampak itu. Kami gak maksa tapi dari tadi kan capek gondok dengan kesaksian anda seharusnya Ibu tata dengan baik ceritanya sebenarnya begini Pak, Bu memang tidak sesuai dengan aturan tapi apa mau di kata kondisi lapangan seperti ini masuk diakal juga. Kita ajukan anggaran untuk ini tidak mendapat juga tapi ini kan persoalan lain baju seragam anak-anak sekolah. Saya ingin tanya 1 (satu) betul gak diterima oleh dia hanya Rp 650.000?”

SW : “Kalau hitungan itu Pak kan.” (196) (17.41)

Tuturan SW dalam (196) pada situasi 18 merupakan tuturan yang tidak memenuhi maksim kuantitas, hal ini terlihat jelas bahwa jawaban diberikan oleh

saksi wanita (SW) kurang sehingga tidak memenuhi maksim kuantitas. Tuturan SW dalam (196) dianggap tidak kooperatif, yakni tidak sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

Tabel 06. Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Dalam Tuturan Deklaratif Maksim Kuantitas Saksi Bahasa Persidangan Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru.

No	Maksim Kuantitas	Nomor Urut Tuturan	Jumlah Tuturan
	Tidak Koomperatif	12, 20, 72, 75, 85, 101, 115, 116, 129, 132, 142, 145, 149, 151, 161, 168 184, 195, 196.	19

2.2.3.2 Pelanggaran Maksim Kualitas.

Tuturan tidak koomperatif yaitu tuturan yang memberikan kontribusi yang tidak sebenarnya.

Situasi [8] :Pertanyaan diambil alih oleh hakim anggota untuk dilanjutkan sehingga kasus ini dapat dipertimbangkan dengan baik. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 14:06-20:37)

HA1 : “Saudara tadi menjawab apa pun diperintah, dilaksanakan. Saudara juga bilang kalau salah tidak dilaksanakan Saudara tau kalau tindakan itu merugikan negara?”

SP : “Saya tidak tau.” (83) (15:41)

Berdasarkan tuturan saksi pria (SP) nomor (83) pada situasi 8 mengandung pelanggaran prinsip kerja sama maksim kualitas “*Saya tidak tau.*” karena, sebagai tata usaha tidak mungkin tidak mengetahui bahwa tindakan mengutip adalah

tindakan yang salah dalam dunia pendidikan. Dianggap tidak kooperatif, yakni tidak sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim kuantitas.

Tabel 07. Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Dalam Tuturan Deklaratif Maksim Kualitas Saksi Bahasa Persidangan Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru.

No	Maksim Kualitas	Nomor Urut Tuturan	Jumlah Tuturan
	Tidak Koomperatif	83.	1

2.2.3.3 Pelanggaran Maksim Relevansi

Tuturan tidak koomperatif yaitu tuturan yang memberikan kontribusi yang tidak relevan dengan pembicaraan dalam peristiwa tutur.

Situasi [4] : Hakim meminta saksi untuk menggunakan *mikrofon* karena suara saksi kecil sehingga kurang jelas terdengar. (02:41-05:01)

PU : “Mana banyak kepala sekolah atau Saudara?”

SP : “Tolong anak masuk membayar meja, kursi.” (13) (04:13)

Tuturan saksi pria (SP) nomor 13 pada situasi 4 merupakan prinsip kerja sama yang melanggar maksim relevansi. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan saksi “*Tolong anak masuk membayar meja, kursi.*” Yang tidak sesuai dengan topik pembicaraan. Penuntut umum bertanya mengenai pembagian uang yang dikutip tetapi saksi menjawab hal yang lain. Sehingga dianggap melanggar prinsip kerja sama maksim relevansi.

Situasi [6] : Saksi merasa sedih dan sangat menyesali perbuatannya karena menjalankan tugas yang salah karena permintaan Kepala Sekolah. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 07:19-10:25)

HK : “Berarti sisa Rp 750.000. Kalau jadi uang tersebut bagaimana pembagian antara Saudara dan terdakwa?”

SP : “Kadang Rp 1500.000 saya ambil.” (36) (08:30)

Berdasarkan tuturan saksi pria (SP) nomor 36 pada situasi 6 terdapat prinsip kerja sama yang melanggar maksim relevansi. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan saksi pria (SP) “*Kadang Rp 1500.000 saya ambil.*” Yang tidak sesuai dengan topik pembicaraan. Sebenarnya hakim ketua bertanya mengenai bagaimana pembagian uang antara terdakwa dan saksi namun jawaban yang diberikan tidak relevan dengan topik pembicaraan. Sehingga dianggap melanggar prinsip kerja sama maksim relevansi.

Situasi [7] : Hakim mempertanyakan dan menghitung uang yang diperoleh dari orang tua siswa pindahan secara detail. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 10:25-14:06)

HK : “Terus nanti, kalau tukang jahit menagih uang apa yang anda katakan?”

SP : “Itu pun ada yang belum bayar.” (60) (12:25)

Tuturan saksi pria (SP) nomor (60) pada situasi 7 terdapat pelanggaran prinsip kerja sama pada maksim relevansi. Hal ini dapat dibuktikan pada jawaban saksi yang memberikan kontribusi yang tidak relevan dengan topik pembicaraan “*Itu pun ada yang belum bayar.*” Sebenarnya yang ditanyakan oleh hakim ketua adalah apa yang akan dikatakan apabila tukang jahit menagih uang seragam sekolah. Sehingga dianggap tidak kooperatif, yakni tidak sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim relevansi.

HK : “Yang sudah bayar sudah diserahkan ke tukang jahit?”

SP : “Mau diserahkan Bu .” (62) (12:37)

- HK : “Kan sudah ketangkep kamu.”
SP : “Uang itu gunanya untuk merehap meja dan kursi Bu jadi uang itu ke Pakai.” (63) (12:41)

Data tuturan pada situasi tutur 7 menunjukkan bahwa mitra tutur yaitu saksi pria (SP) melanggar maksim relevansi. Karena memberikan kontribusi yang tidak relevan dengan topik pembicaraan. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan saksi “*Uang itu gunanya untuk merehap meja dan kursi Bu jadi uang itu ke Pakai.*” sedangkan yang ditanyakan hakim ketua adalah bagaimana menyerahkan uang ke tukang jahit tetapi sudah ditangkap oleh pihak kepolisian namun saksi memberikan kontribusi yang tidak sesuai. Sehingga termasuk pelanggaran maksim relevansi.

Situasi [9] : Hakim ketua mengambil alih sidang dan mulai mengajukan pertanyaan kepada saksi. (Data ini berada dalam file 1 durasi 20:37-24:39)

- HA1 : “Rp1400.000 untuk 5 (lima) stel, Saudara saksi dalam penerimaan Siswa, saat Ibu ini jadi kepala sekolah apakah sebagai anggota?”
SP : “Ikut.” (106) (24:33)

Konteks situasi tutur 9 merupakan pelanggaran maksim relevansi. Karena memberikan kontribusi yang tidak relevan dengan topik pembicaraan. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan saksi “*Ikut.*” Sedangkan hakim ketua bertanya apakah dalam penerimaan sisa menjadi anggota atau tidak saksi pria hanya perlu menjawab iya atau tidak tetapi saksi pria menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan. Sehingga termasuk pelanggaran maksim relevansi.

Situasi [13] : Hakim ketua meminta pertanyaannya merujuk pada kesaksian terdakwa sebagai saksi dari E. dan kemudian sidang diambil alih kembali kepada hakim ketua. (Data ini berada di file 1 durasi 30.05-38.42)

- HK : “Inilah yang diterangkanya tadi, ketika Saudara tidak membantah penerimaan duit. Yang Saudara, Saudara tidak menentukan besaran.”

SW : “Uang yang Rp 7000.000 saya terima itu, saya anggap itu uang yang dipinjam dia. Saya kembalikan ke dia lagi pada saat itu juga, kan dia bayar ni. Bu ada uang jadi misalnya ada Rp 7000.000 saya anggap hutang yang diPakainya.” (118) (32:26)

Konteks situasi tutur 13 menunjukkan bahwa penutur yaitu saksi wanita (SW) tidak kooperatif, yakni tidak sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim relevansi. Hal ini dapat dibuktikan pada jawaban saksi yang memberikan kontribusi yang tidak relevan dengan topik pembicaraan pada saat di persidangan “*Uang yang Rp 7000.000 saya terima itu, saya anggap itu uang yang dipinjam dia. Saya kembalikan ke dia lagi pada saat itu juga, kan dia bayar ni. Bu ada uang jadi misalnya ada Rp 7000.000 saya anggap hutang yang dipakainya.*”

Sebenarnya yang menjadi topik pembicaraan mengenai keterangan yang terdahulu. Sehingga dianggap tidak kooperatif, yakni tidak sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim relevansi.

HK : “Kenapa Saudara berani mengadakan pungutan?”

SW : “Sekolah kami yang lama tidak ada pungutan.” (128) (33:44)

Percakapan di atas menurut teori prinsip kerja sama telah melanggar maksim relevansi. Hal ini dapat dibuktikan pada jawaban saksi yang memberikankontribusi yang tidak relevan dengan topik pembicaraan pada saat di persidangan “*Sekolah kami yang lama tidak ada pungutan.*” Sebenarnya hakim ketua bertanya kenapa mengadakan pungutan teteapi saksi menjawab hal yang tidak relevan dengan pertanyaan. Sehingga dianggap tidak kooperatif, yakni tidak sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim relevansi.

HK : “Itu namanya apa?” (terlihat kesal)

SW : “Tapi saya gak ada uang.” (131) (34:30)

Tuturan saksi wanita (SW) nomor (131) pada situasi 13 terdapat pelanggaran prinsip kerja sama pada maksim relevansi. Hal ini dapat dibuktikan pada jawaban saksi yang memberikan kontribusi yang tidak relevan dengan topik pembicaraan pada saat di persidangan “Tapi saya gak ada uang.” Sebenarnya hakim ketua bertanya meminta uang kepada orang tua siswa padahal sudah tau tidak diperbolehkan itu apa namanya namun, saksi wanita memberikan jawaban yang tidak relevan. Sehingga dianggap tidak kooperatif, yakni tidak sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim relevansi.

HK : “Rekomendasi itu kewenangan Saudara, itu yang Saudara perintahkan ketika ada uang Saudara minta beberapa kali, untuk apa Saudara meminta?”

SW : “Uang oprasional gak ada lagi kan Bu jadi, uang yang diPakai oleh terdakwa Rp.4000.000 yang saya tau yang lain gak tau lah Bu . Soalnya yang saya tau Rp 4000.000 itu yang pasti yang lain ada apa ndak.” (137) (36:14)

Percakapan di atas menurut teori prinsip kerja sama dapat dikatakan bahwa saksi wanita (SW) yang memberikan kontribusi yang tidak relevan dengan topik pembicaraan pada saat di persidangan “*Uang oprasional gak ada lagi kan Bu jadi, uang yang diPakai oleh terdakwa Rp.4000.000 yang saya tau yang lain gak tau lah Bu . Soalnya yang saya tau Rp 4000.000 itu yang pasti yang lain ada apa ndak.*” Sebenarnya yang menjadi pertanyaan saksi adalah tujuan meminta uang kepada orang tua siswa Bu kan alasan mengutip uang. Sehingga dianggap tidak kooperatif, yakni tidak sesuai dengan prinsip kerja sama dalam relevansi.

HA1 : “Sekaligus atau setiap minggu 2 (dua) orang dilaporkan?”

SW : “Pada saat siswa masuk kalau masih bisa silahkan, kalau tidak lebih dari 32 (tiga puluh dua) silahkan masuk.” (144) (38:04)

Tuturan ini merupakan cuplikan pembicaraan antara hakim anggota 1 (HA1) dengan saksi wanita (SW) tidak sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim relevansi. Hal ini dapat dibuktikan pada jawaban saksi yang memberikan kontribusi yang tidak relevan dengan topik pembicaraan pada saat di persidangan *“Pada saat siswa masuk kalau masih bisa silahkan, kalau tidak lebih dari 32 (tiga puluh dua) silahkan masuk.”* Sebenarnya yang menjadi pertanyaan hakim anggota 1 adalah sistem pelaporan siswa masuk kepada kepala sekolah itu Bu ka tetapi saksi menjelaskan mengenai kouta di sekolah tersebut. Sehingga dianggap tidak kooperatif, yakni tidak sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim relevansi.

Situasi [14] : Sidang diambil alih oleh Hakim anggota (1) dan memperjelas kembali maksud pertanyaannya. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 38:42-50:41)

HA1 : *“Saudara sangat percaya dengan dia, ini uang?”*

SW : *“Karena saya tidak ada minta uang hanya orang tua itu menyanggupi.”* (148) (39:01)

Dialog di atas adalah percakapan antara saksi wanita (SW) dan hakim anggota 1 (HA1) pada situasi 14 terdapat pelanggaran prinsip kerja sama pada maksim relevansi. Hal ini dapat dibuktikan pada jawaban saksi yang memberikan kontribusi yang tidak relevan dengan topik pembicaraan pada saat di persidangan *“Karena saya tidak ada minta uang hanya orang tua itu menyanggupi.”* Sebenarnya yang menjadi pertanyaan hakim anggota 1 adalah apakah saksi sangat percaya terhadap terdakwa atau tidak tetapi saksi menjawab tidak sesuai dengan topik mengatakan bahwa dirinya tidak ada mengutip uang

kepada orang tua siswa. Sehingga dianggap tidak kooperatif, yakni tidak sesuai dengan prinsip kerja sama dalam relevansi.

HA1 : “Itu, jangan ngelak-ngelak baik. Si terdakwa ini sewaktu jadi saksi sudah menerangkan ada Rp 10.000.000 meja dan kursi benar?”

SW : “Dia menggunakan Pak.” (153) (41:26)

Dituturkan oleh seorang saksi wanita (SW) kepada mitra tutur pada situasi 14 terdapat pelanggaran prinsip kerja sama pada maksim relevansi. Hal ini dapat dibuktikan pada jawaban saksi yang memberikan kontribusi yang tidak relevan dengan topik pembicaraan pada saat di persidangan “*Dia menggunakan Pak.*” Sebenarnya yang menjadi pertanyaan hakim anggota 1 adalah apakah benar uang dipakai untuk merehap meja dan kursi, namun saksi memberikan jawaban yang tidak relevan. Sehingga dianggap tidak kooperatif, yakni tidak sesuai dengan prinsip kerja sama dalam relevansi.

HA1 : “Dari mana Saudara tau uang dari mana, ada tata usaha memperbaiki kursi gak Saudara tanya uang dari mana. Ada staf memperbaiki kursi Saudara tanya kah?”

SW : “Pak itu uang dana sekolah Rp 1000.000 itu.” (155) (42:16)

Data tuturan pada situasi 14 menunjukkan bahwa mengandung pelanggaran prinsip kerja sama pada maksim relevansi. Hal ini dapat dibuktikan pada jawaban saksi yang memberikan kontribusi yang tidak relevan dengan topik pembicaraan pada saat di persidangan “*Pak itu uang dana sekolah Rp 1000.000 itu.*” Sebenarnya yang menjadi pertanyaan hakim anggota 1 adalah dari mana sumber uang untuk memperbaiki kursi dan meja. Sehingga dianggap tidak kooperatif, yakni tidak sesuai dengan prinsip kerja sama dalam relevansi.

HA1 : “Adakah Saudara tanya uang dari mana?”

SW : “Saya tau Pak.” (165) (44:43)

Tuturan saksi wanita (SW) nomor (165) pada situasi 14 terdapat pelanggaran prinsip kerja sama pada maksim relevansi. Hal ini dapat dibuktikan pada jawaban saksi yang memberikan kontribusi yang tidak relevan dengan topik pembicaraan pada saat di persidangan “*Saya tau Pak.*” Sebenarnya yang menjadi pertanyaan hakim anggota 1 adalah dari mana sumber uang tetapi saksi menjawab hal yang tidak relevan dengan topik pembicaraan. Sehingga dianggap tidak kooperatif, yakni tidak sesuai dengan prinsip kerja sama dalam relevansi.

HA1 : “Gak ditanya? rumah Saudara dibenahi tapi gak tau dari mana?”

SW : “Karena dia ambil Rp 4000.000 itu Pak.” (170) (44:52)

Berdasarkan tuturan saksi wanita (SW) nomor (170) pada situasi 14 terdapat pelanggaran prinsip kerja sama pada maksim relevansi. Hal ini dapat dibuktikan pada jawaban saksi yang memberikan kontribusi yang tidak relevan dengan topik pembicaraan pada saat di persidangan “*Karena dia ambil Rp 4000.000 itu Pak.*” Sebenarnya yang menjadi pertanyaan hakim anggota 1 adalah sumber uang untuk membenahi sekolah tetapi saksi menjawab tidak sesuai dengan topik. Sehingga dianggap tidak kooperatif, yakni tidak sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim relevansi.

HA1 : “Jadi ada uang yang diambil dia untuk perbaikan kursi?”

SW : “Dia pribadi menggunakan.” (179) (48:47)

Tuturan saksi wanita (SW) nomor (179) pada situasi 14 terdapat pelanggaran prinsip kerja sama pada maksim relevansi. Hal ini dapat dibuktikan pada jawaban saksi yang memberikan kontribusi yang tidak relevan dengan topik pembicaraan pada saat di persidangan “*Dia pribadi menggunakan.*”

Sebenarnya yang menjadi pertanyaan hakim anggota 1 adalah adakah saksi mengambil uang untuk memperbaiki kursi. Sebenarnya cukup saksi cukup menjawab iya atau tidak, hakim anggota 1 sudah dapat memahami. Namun faktanya saksi memberikan kontribusi yang tidak relevan. Sehingga dianggap tidak kooperatif, yakni tidak sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim relevansi.

- HA1 : “Bisa dia.”
SW : “Karena dia berjanji untuk mengerjakan, untuk perbaikan itu pun tidak cukup karena pada saat itu banyak sekali kursi yang tidak bisa dipakai karena.” (180) (47:00)
HA1 : “Benar karena tidak bisa sekaligus misalnya 10 (sepuluh) 5 (lima) diperbaiki.”
SW : “Itu pun tidak cukup banyak sekali kursi yang tidak layak. Itulah yang terjadi di sekolah kami Pak.” (181) (49:25)

Tuturan saksi wanita (SW) nomor (181) pada situasi 14 terdapat pelanggaran prinsip kerja sama pada maksim relevansi. Hal ini dapat dibuktikan pada jawaban saksi yang memberikan kontribusi yang tidak relevan dengan topik pembicaraan pada saat di persidangan “*Itu pun tidak cukup banyak sekali kursi yang tidak layak. Itulah yang terjadi di sekolah kami Pak.*” Sebenarnya yang menjadi pertanyaan hakim anggota 1 adalah sumber uang untuk memperbaiki sekolah tetapi saksi menjawab tidak sesuai dengan topik. Sehingga dianggap tidak kooperatif, yakni tidak sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim relevansi.

- HA1 : “Negara ini gak bisa sekaligus kalau uangnya aja kasian dia cari mati itu yang salah. Walaupun kursi rusak 100 (Seratus) anggaran ada 10 (sepuluh) ya 10 (sepuluh) saja diperbaiki. Baik kita teruskan ya, kemudian ada dari uang yang dikutip untuk bayar uang jahit? Rusak atau tidak bisa diPakan tadi sudah ditanya.”
SW : “Dia lapor bahwa penjahit tidak bisa menjahit lagi, saya kasih nomor handphone bukan orang itu langsung dibayar disitu. Ini nomor

handphone bicarakanlah saya tidak ada ikut campur tangan sedikitpun.” (182) (50:08)

Berdasarkan tuturan saksi wanita (SW) nomor (182) pada situasi 14 terdapat pelanggaran prinsip kerja sama pada maksim relevansi. Hal ini dapat dibuktikan pada jawaban saksi yang memberikan kontribusi yang tidak relevan dengan topik pembicaraan pada saat di persidangan “*Dia lapor bahwa penjahit tidak bisa menjahit lagi, saya kasih nomor handphone Bu kan orang itu langsung dibayar disitu. Ini nomor handphone bicarakanlah saya tidak ada ikut campur tangan sedikitpun.*” Sebenarnya yang menjadi pertanyaan hakim anggota 1 adalah udah ada uang yang diberikan ke tukang jahit atau tidak tetapi saksi menjawab tidak sesuai dengan topik. Sehingga dianggap tidak kooperatif, yakni tidak sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim relevansi.

Situasi [15] Hakim Ketua mengambil alih untuk bertanya pada saat persidangan. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 50:41-53:55)

HK : “Jadi kenapa anak duduk disitu tetapi tidak terdaftar?”
SW : “Karena dia tata usaha Bu .” (189) (52:03)

Tuturan saksi wanita (SW) nomor (189) pada situasi 15 terdapat pelanggaran prinsip kerja sama pada maksim relevansi. Hal ini dapat dibuktikan pada jawaban saksi yang memberikan kontribusi yang tidak relevan dengan topik pembicaraan pada saat di persidangan “*Karena dia tata usaha Bu .*” Sebenarnya yang menjadi pertanyaan hakim ketua adalah kenapa anak bisa sekolah jika terdaftar atau tidak tetapi saksi menjawab tidak sesuai dengan topik, saksi wanita (SW) menjawab pekerjaan terdakwa di sekolah tersebut. Sehingga

dianggap tidak kooperatif, yakni tidak sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim relevansi.

Situasi [15] Hakim Ketua mengambil alih untuk bertanya pada saat persidangan. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 50:41-53:55)

- HK : “Itu kan aneh bagi kami kok bisa pencuri masuk ke sekolah tanpa tau Saudara, apakah semua itu terdaftar? Kan ada ini ya ketika mau mendaftar UN kok Saudara kasih jawaban konyol.”
- SW : “Seperti itu sudah terjadi Bu saya kan 17 (tujuh belas) panggil semua ketahuan disitu setau saya dia lapor sama saya ada 10 tau-tau 17 (tujuh belas).” (193) (53:33)

Tuturan saksi wanita (SW) nomor (193) pada situasi 15 terdapat pelanggaran prinsip kerja sama pada maksim relevansi. Hal ini dapat dibuktikan pada jawaban saksi yang memberikan kontribusi yang tidak relevan dengan topik pembicaraan pada saat di persidangan “*Seperti itu sudah terjadi Bu saya kan 17 (tujuh belas) panggil semua ketahuan disitu setau saya dia lapor sama saya ada 10 tau-tau 17 (tujuh belas).*” Sebenarnya yang menjadi pertanyaan hakim ketua adalah apakah siswa siswa terdaftar disekolah tersebut tanpa ada surat rekomendasi. Namun, saksi memeberikan jawaban yang tidak sesuai dengan topik pembicaraan. Sehingga dianggap tidak kooperatif, yakni tidak sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim relevansi.

Tabel 08. Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Dalam Tuturan Deklaratif Maksim Relevansi Saksi Bahasa Persidangan Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Peanbaru.

No	Maksim Relevansi	Nomor Urut Tuturan	Jumlah Tuturan
1	Tidak	13, 36, 60, 63, 106,118, 119, 128,	21

	Koomperatif	131, 137,144, 148, 153, 155, 165, 170, 179, 181, 182, 189,193.	

2.2.3.4 Pelanggaran Maksim Pelaksanaan/Cara

Tuturan tidak koomperatif yaitu tuturan yang memberikan kontribusi yang mempunyai arti ganda (ambigu), kabur, dan berbelit-belit.

Situasi [6] : Saksi merasa sedih dan sangat menyesali perBu atanya karna menjalankan tugas yang salah karena permintaan Kepala Sekolah. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 07:19-10:25)

HK : “Yang memBu ka oflet, atau apa namanya ya memBu ka dimana?”
 SP : “Gak jauh dari sekolah itu.” (33) (07:55)

Pada data di atas menurut teori prinsip kerja sama tuturan saksi pria (SP) melanggar maksim pelaksanaan/ cara karena memberikan kontribusi yang ambigu atau bermakna ganda. Hal ini dapat dibuktikan pada pernyataan saksi “*Gak jauh dari sekolah itu.*” pada kata *itu* hal ini dapat membingungkan hakim ketua, sehingga termasuk prinsip kerja sama melanggar maksim pelaksanaan/cara.

HK : “Dari uang Rp 23600.000, berapa yang di serahkan utuk tukang jahit?”
 SP : “Rencana kepada sekolah saya serahkan dari uang koran.” (40) (09:28)

Percakapan diaatas menurut teori prinsip kerja sama tuturan saksi pria nomor (40) pada situasi 6 mengandung aspek pelanggaran prinsip kerjasama maksim pelaksanaan/ cara. Kerena saksi pria (SP) memberikan kontribusi yang tidak jelas. Hal ini dapat dibuktikan pada pernyataan saksi “*Rencana kepada sekolah saya serahkan dari uang koran.*” Artinya tidak jelas apa yang akan

diserahkan. Hal ini termasuk prinsip kerja sama melanggar maksim pelaksanaan/cara.

Situasi [8] : Pertanyaan diambil alih oleh hakim anggota untuk dilanjutkan sehingga kasus ini dapat dipertimbangkan dengan baik. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 14:06-20:37)

HA1 : “Baik kan sudah tau ternyata tidak boleh, perasaan saudara saat ini bagaimana?”

SP : “Ya kalau saya menyesal Pak, lepas kejadian kemaren pas saya ketangkep tangan, penyelidik langsung cek semua ruang tata usaha BB diambil sesudah itu Ibu kepala sekolah telfon saya ‘jadi siswa itu masuk Pak’ jadi bisa antar uangnya gak bisa saya ada tamu jadi anaknya yang jemput pembicaraan saya dan kepala sekolah direkam.” (90) (17:12)

Percakapan di atas telah melanggar maksim pelaksanaan/cara. Karena saksi memberikan kontribusi yang berbeli-belit. Tidak ringkas hal ini menyulitkan hakim anggota 1 pada saat memahami tuturan di dalam persidangan. Hal ini dibuktikandari jawaban saksi pria (SP) *“Ya kalau saya menyesal Pak, lepas kejadian kemaren pas saya ketangkep tangan, penyelidik langsung cek semua ruang tata usaha BB diambil sesudah itu Ibu kepala sekolah telfon saya ‘jadi siswa itu masuk Pak’ jadi bisa antar uangnya gak bisa saya ada tamu jadi anaknya yang jemput pembicaraan saya dan kepala sekolah direkam.”* Sehingga dianggap tidak kooperatif, yakni tidak sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim pelaksanaan/cara.

Situasi [13] : Hakim ketua meminta pertanyaanya merujuk pada kesaksian terdakwa sebagai saksi dari E. dan kemudian sidang diambil alih kembali kepada hakim ketua. (Data ini berada di file 1 durasi 30.05-38.42)

HK : “Uang yang diserahkan ke Saudara lo Rp 7000.000.”

SW : “Iya Pakai uang sekolah Rp 4000.000. Saya kasih langsung saya kembalikan lagi ke dia, belilah apa saja yang belum dibayar. Maka

dibayarliah untuk koran dan oprasional lain, tanah hitam dan dia memakai uang dari dalam sekolah Rp 4000.000” (117) (31:33)

Berdasarkan tuturan saksi wanita (SW) nomor (117) pada situasi 13 merupakan pelanggaran prinsip kerja sama maksim pelaksanaan/cara. Karena saksi pria (SP) memberikan kontribusi yang berbelit-belit sehingga hakim ketua kurang memahami apa yang disampaikan oleh saksi wanita (SW). Dapat dibuktikan “*Iya Pakai uang sekolah Rp 4000.000. Saya kasih langsung saya kembalikan lagi ke dia, belilah apa saja yang belum dibayar. Maka dibayarliah untuk koran dan oprasional lain, tanah hitam dan dia memakai uang dari dalam sekolah Rp 4000.000*” Hal ini dianggap tidak kooperatif, yakni tidak sesuai dengan prinsip kerja sama dalam maksim pelaksanaan/cara.

Situasi [13] : Hakim ketua meminta pertanyaanya merujuk pada kesaksian terdakwa sebagai saksi dari E. dan kemudian sidang diambil alih kembali kepada hakim ketua. (Data ini berada di file 1 durasi 30.05-38.42)

- HK : “Setelah di sekolah ini, Saudara kan tau tidak boleh ada pungutan. Terus kenapa berani mengadakan pungutan?”
- SW : “Saya tidak mungut cuma saya bilang.” (129) (33:53)
- HK : “Bu kan.”
- SW : “Gak ada Bu, kami bahwa terdakwa ini hanya menyampaikan kepada orang tua agar menyiapkan Pakaian seragamnya yang tidak cocok. Karena sekolah kita itu Bu banyak rusak tidak layak diPakai lagi, jika ingin sekolah disini carilah kursi meja sementara sudah tanggal-tanggal semua.” (130) (33:57)

Dituturkan oleh seorang saksi wanita (SW) kepada hakim ketu (HK) pada situas 13 merupakan pelanggaran prinsip kerja sama maksim pelaksanaan/cara. Karena saksi wanita (SW) memberikan informasi berbelit-belit. Sehingga hakim ketua kesulitan untuk memahami apa yang disampaikan, hal ini dapat dibuktikan dalam pernyataan saksi wanita “*Gak ada Bu , kami bahwa terdakwa ini hanya menyampaikan kepada orang tua agar menyiapkan Pakaian seragamnya yang*

tidak cocok. Karena sekolah kita itu Bu banyak rusak tidak layak diPakai lagi, jika ingin sekolah disini carilah kursi meja sementara sudah tanggal-tanggal semua.” Sehingga termasuk prinsip kerja sama dan melanggar maksim pelaksanaan/cara.

Situasi [14] : Sidang diambil alih oleh Hakim anggota (1) dan memperjelas kembali maksud pertanyaanya. (Data ini berada di dalam file 1 durasi 38:42-50:41)

HA1 : “Dari mana Saudara tau uang dari mana, ada tata usaha memperbaiki kursi gak Saudara tanya uang dari mana. Ada staf memperbaiki kursi Saudara tanya kah?”

SW : “Pak itu uang dana sekolah Rp 1000.000 itu.” (155) (42:16)

HA1 : “Dari mana?”

SW : “Dana sekolah.” (156) (42.18)

HA1 : “Tadi dia bilang uang yang dari yang dikutip dari orang tua yang pindahan itu sedangkan gak ada anda bantah tadi.”

SW : “Sekarang orang tua, minta tolong Pak saya gak ada menyuruh dia dan dia kerjakan dia itu mungkin atas berurusan dari orang tua langsung yang berhuBu ngan dengan dia.” (157) (42:31)

Konteks situasi tutur (14) menunjukkan bahwa tuturan saksi wanita (SP) sebagai mitra tutur di persidangan telah melanggar prinsip kerja sama maksim pelaksanaan/cara. Karena, memberikan informasi yang berbelit-belit sehingga susah untuk dipahami dan tidak jelas. Hal ini dapat dibuktikan dalam pernyataan saksi wanita (SW) “*Sekarang orang tua, minta tolong Pak saya gak ada menyuruh dia dan dia kerjakan dia itu mungkin atas berurusan dari orang tua langsung yang berhuBu ngan dengan dia.*” Oleh karena itu, termasuk prinsip kerja sama pelanggaran maksim pelaksanaan/cara.

HA1 : “Aneh, jadi pikiran Saudara jangan takut ditanya. Bayangin itu gara-gara Rp 2000.000 dia ditangkap karena jika masuk penjara nanti sulit bagi kami. Makanya saya tanya bilangkan karena kebijakan Ibu yang gak mau tau tadi. diperbaiki kursi meja gak mau tau katanya melaksanakan apa saja yang diperintahkan. Baik saya teruskan sekali lagi dipergunakan. AaPakah itu semua pembagian uan tadi

- dilaporkan ke Saudara Rp 1000.000 untuk ini, Rp 10.000.000 untuk kursi dan Rp 1000.000 untuk koran pernah gak dibilang seperti itu?"
- SW : "Tidak." (171) (47:18)
- HA1 : "Saudara menikmati baca koran, menikmati taman yang indah."
- SW : "Uang itu Pak dia bayar tapi dia sudah diPakai dulu." (172) (47:29)

Percakapan tuturan saksi wanita nomor (172) pada situasi 14 merupakan prinsip kerja sama pelanggaran maksim pelaksanaan/cara. Karena, memberikan informasi yang tidak jelas sehingga susah untuk dipahami dan tidak jelas. Hal ini dapat dibuktikan dalam pernyataan saksi wanita (SW) "*Uang itu Pak dia bayar tapi dia sudah diPakai dulu.*" Oleh karena itu, termasuk prinsip kerja sama pelanggaran maksim pelaksanaan/cara.

- HA1 : "Uangnya di Pakai?"
- SW : "2018 kejadian Juni." (178) (48:37)
- HA1 : "Jadi ada uang yang diambil dia untuk perbaiki kursi?"
- SW : "Dia pribadi menggunakan." (179) (48:47)
- HA1 : "Bisa dia."
- SW : "Karena dia berjanji untuk mengerjakan, untuk perbaiki itupun tidak cukup karena pada saat itu banyak sekali kursi yang tidak bisa diPakai karena." (180) (47:00)

Data tuturan pada situasi situasi 14 menunjukkan bahwa mitra tutur di persidangan mengandung pelanggaran maksim pelaksanaan/cara. Karena, memberikan informasi yang berbelit-belit sehingga susah untuk dipahami dan tidak jelas. Hal ini dapat dibuktikan dalam pernyataan saksi wanita (SW) "*Karena dia berjanji untuk mengerjakan, untuk perbaiki itupun tidak cukup karena pada saat itu banyak sekali kursi yang tidak bisa diPakai karena.*" Oleh karena itu, termasuk prinsip kerja sama pelanggaran maksim pelaksanaan/cara.

Tabel 09. Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Dalam Tuturan Deklaratif Maksim Pelaksanaan/Cara Saksi Bahasa Persidangan Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru.

No	Maksim Relevansi	Nomor Urut Tuturan	Jumlah Tuturan
1	Tidak Koomperatif	33, 40, 90, 117, 130, 157, 172 180.	8

Tabel 010. Rekapitulasi Hasil Analisis Data Maksim Tuturan Prinsip Kerja Sama Tuturan Deklaratif Saksi Di Persidangan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru.

No	Jenis Maksim	Tutran Kooperatif	Jumlah Tuturan	Tuturan Tidak Kooperatif	Jumlah Tuturan	Jumlah Setiap Maksim
1	Maksim Kuantitas	1,2,3,4,5,6,8,16, 18,23,24,28,31, 32,39,41,42,46, 47,48,50,53,54, 55,58,68,71,73, 74,77,78,79,81, 82,84,86,88,89, 91,95,96,97,98, 99,102,104,105, 108,109,110,11 2,114,115,120,1 25,127,135,136, 141,146,147,15 4,156,158,159,1 60,164,166,169, 171,173,174,17 5,183,185,191, 94.	77	12,20,72, 75,85,101 ,115,116, 129,13,14 2,145,149 ,151,161, 168,184, 195, 196.	19	96

No	Jenis Maksim	Tutran Kooperatif	Jumlah Tuturan	Tuturan Tidak Kooperatif	Jumlah Tuturan	Jumlah Setiap Maksim
2	Maksim Kualitas	7, 10, 14, 15, 17, 25, 26, 30, 35, 37, 38, 45, 52, 56, 57, 61, 64, 69, 70, 76, 80, 93, 94, 103, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 140, 176, 177, 178, 188, 190.	36	83.	1	37
3	Maksim Relevansi	11, 19, 21, 22, 27, 29, 34, 43, 44, 48, 49, 51, 59, 62, 65, 66, 67, 92, 100, 107, 111, 133, 134, 138, 139, 143, 150, 152, 162, 167, 186, 187, 192.	33	13, 36, 60, 63, 106, 118, 119, 128, 131, 137, 144, 148, 153, 155, 165, 170, 179, 181, 182, 189, 193.	21	54
4	Maksim Pelaksanaan/Cara	9	1	33, 40, 90, 117, 130, 157, 172, 180.	8	9

2.3 Interpretasi Data

Berdasarkan hasil analisis ini, penulis menginterpretasikan penelitian tentang “prinsip kerja sama Tuturan Deklaratif Bahasa Persidangan Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru”. Setelah melakukan pengambilan data. Hasil analisis data penelitian tentang prinsip kerja sama dalam tuturan antara hakim, penuntut umum dan saksi di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru.

2.3.1 Tuturan Deklaratif Saksi Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, maka tuturan deklaratif ditemukan 196 (seratus sembilan puluh enam) yang terdiri dari deklaratif dengan maksud menyatakan informasi faktual 84 (delapan puluh empat). Deklaratif dengan maksud menyatakan keputusan atau penilaian ditemukan 6 (enam). Deklaratif dengan maksud menyatakan perjanjian, peringatan, dan nasihat ditemukan 1 (satu). Deklaratif dengan maksud menyatakan ucapan selamat atas suatu keberhasilan atau ucapan prihatin atas kemalangan 1 (satu). Deklaratif dengan maksud memberikan penjelasan, keterangan atau perincian 72 (tujuh puluh dua). Pada tuturan deklaratif saksi dalam bahasa persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru lebih dominad menggunakan tuturan deklaratif yang bermaksud menyatakan informasi faktual, karena didalam persidangan tempat mencari kebenaran dari keterangan saksi agar hakim dapat memberikan pertimbangan terhadap vonis yang dijatuhkan kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara.

2.3.2 Tuturan Deklaratif Yang Memenuhi Prinsip Keja Sama Dalam Tuturan Saksi Dalam Bahasa Persidangan Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru.

(a) Maksim Kuantitas.

Maksim kuantitas menghendaki di dalam pritiwa tutur memberikan jawaban yang secukupnya atau sebanyak yang di bu tuhkan lawan bicaranya. Berdasarkan data yang penulis peroleh dan di analisis, ditemukan tuturan yang mengandung maksim kuantitas ditemukan 96 tuturan yang terdiri dari 77 tuturan kooperatif. Dalam hal ini paling banyak ditemukan di dalam persidangan karena

saksi pada saat persidangan memberikan kontribusi yang secukupnya. Sehingga cenderung lebih lugas dan mudah dipahami.

(b) Maksim Kualitas

Berdasarkan data yang penulis peroleh, maka tuturan yang mengandung maksim kualitas saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru ditemukan 36 (tiga puluh enam) maksim kualitas. Dalam hal ini hanya sedikit ditemukan tuturan maksim kualitas, karena dalam bertutur saksi tidak selalu mengatakan hal yang sebenarnya.

(c) Maksim Relevansi

Berdasarkan data yang penulis peroleh, maka tuturan yang mengandung maksim relevansi saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru ditemukan 33 (tiga puluh enam tiga) maksim relevansi.

(c) Maksim Pelaksanaan/Cara

Maksim Pelaksanaan atau cara mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan secara runtut. Tuturan saksi di dalam persidangan yang dikelompokkan ke dalam maksim pelaksanaan ditemukan 1 (satu).

Didalam tuturan saksi pada persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru lebih dominad menggunakan maksim kuantitas dibanding dengan maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan/cara.

2.3.3 Tuturan Deklaratif Yang Melanggar Prinsip Kerja Sama Dalam Tuturan Saksi Dalam Bahasa Persidangan Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru.

(a) Maksim Kuantitas

Berdasarkan data yang penulis peroleh, maka tuturan yang mengandung pelanggaran maksim kuantitas saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru ditemukan 19 (sembilan belas) maksim kuantitas. Dalam hal ini hanya sedikit ditemukan tuturan maksim kuantitas, karena dalam bertutur saksi tidak selalu memberikankontribusi yang secukupnya.

(b) Maksim Kualitas

Berdasarkan data yang penulis peroleh, maka tuturan yang mengandung pelanggaran maksim kualitas saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru ditemukan 1 (satu) maksim kualitas. Dalam hal ini paling sedikit ditemukan tuturan maksim kuantitas, karena dalam bertutur tidak selalu saksi memberikan jawaban yang sebenarnya.

(d) Maksim Relevansi

Berdasarkan data yang penulis peroleh, maka tuturan yang mengandung pelanggaran maksim relevansi saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru ditemukan 21 (dua puluh satu) maksim relevansi. Dalam hal ini paling banyak ditemukan tuturan maksim kuantitas, karena dalam bertutur tidak selalu saksi memberikan jawaban yang relevan dengan topik pembicaraan dan membuat hakim sulit memahami apa yang disampaikan dari keterangan saksi tersebut.

(d) Maksim Pelaksanaan/Cara

Berdasarkan data yang penulis peroleh, maka tuturan yang mengandung pelanggaran maksim pelaksanaan/cara saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru ditemukan 8 (delapan) maksim pelaksanaan/cara.

Dalam hal ini hanya sedikit ditemukan tuturan maksim pelaksanaan, karena dalam bertutur tidak selalu saksi memberikan jawaban yang jelas, tidak taksa, dan tidak kabur di dalam persidangan. Di dalam tuturan saksi pada persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru lebih dominad terjadi pelanggaran pada maksim relevansi dibanding dengan maksim kuantitas, maksi kualitas, dan maksim relevansi.

BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapatlah disimpulkan bahwa prinsip kerja sama dalam tuturan deklaratif saksi di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut. Dari seluruh tuturan deklaratif ditemukan 196 (seratus sembilan puluh enam) tuturan yang terdiri dari menyatakan informasi faktual 84 (delapan puluh empat) tuturan. Menyatakan keputusan atau penilaian terdapat 6 (enam) tuturan. Menyatakan perjanjian, peringatan dan nasehat 1 (satu) tuturan. Menyatakan ucapan terimakasih atas suatu keberhasilan atau ucapan prihatin atas kemalangan 1 (satu) tuturan. Dan menyatakan penjelasan atau keterangan 72 tuturan. Dalam bertutur saksi lebih banyak menyatakan informasi faktual kepada hakim, tuturan saksi adalah jawaban yang diharapkan oleh hakim karena jawabanya memberikan informasi yang sebenarnya.

Dalam prinsip kerja sama terdapat empat maksim yaitu maksim kuantitas 77 (tujuh puluh tujuh) tuturan kooperatif, maksim kualitas 36 (tiga puluh enam) tuturan kooperatif, maksim relevansi 33 (tiga puluh tiga) tuturan kooperatif, maksim pelaksanaan 1 (satu) tuturan kooperatif.

Sedangkan pelanggaran prinsip kerja sama terdapat empat maksim yaitu pelanggaran maksim kuantitas 19 (sembilan belas) tuturan tidak kooperatif, maksim kualitas 1 (satu) tuturan tidak kooperatif, maksim relevansi 21 (dua puluh satu) tuturan tidak kooperatif, maksim pelaksanaan 8 (delapan) tuturan tidak kooperatif.

BAB IV HAMBATAN DAN SARAN

4.1 Hambatan

Selama penulisan skripsi ini penulis menemui berbagai hambatan baik pada saat pengumpulan data di lapangan dan pada saat menganalisis data. Adapun hambatan tersebut adalah :

4.1.1 Sulitnya pengurusan surat riset di Pengadilan harus memakai format hukum sesuai dengan aturan yang ada di Pengadilan.

4.1.2 Sulitnya penulis dalam merekam tuturan karena jarak tamu persidangan dan hakim serta saksi cukup jauh.

4.1.3 Berlimpahnya jumlah data deklaratif yang dianalisis sangat menguji kesabaran penulis.

4.2 Saran

Pada akhir tulisan ini penulis ingin memberikan saran-saran agar dapat dijadikan masukan peneliti selanjutnya dan bagi pembaca skripsi ini, saran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Penelitian ini dapat dijadikan sarana menambah wawasan dibidang pragmatik untuk penelitian selanjutnya.
2. Hendaknya ketika bertutur di persidangan saksi memberikan kontribusi yang mudah di pahami hakim sehingga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, Abdul. (2009). *Sintaksis Bahasa Indonesia* (Cetakan 1). Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul. dan Leoni. Agustina. (2010). *Sosiolingustik Perkenalan Awal* (Edisi Revi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Cummings, Louise. (2007). *Pragmatik sebuah Prespektif Multidisipliner*. (I. A. Syukur, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Depdiknas. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi 4). Jakarta: Balai Pustaka.
- Ibrahim. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. (E. Kurnanto, Ed.) (Cetakan 1). Bandung: Alfabeta.
- Leech, Geoffrey. (1993). *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Mahsun. (2005). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya* (Edisi 1). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Melita, Enny. 2018. *prinsip kerja sama Dalam Tuturan Performatif Acara Just Alvin Episode "Nothing Is Impossible" D Metro TV*. Skripsi. Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Moleong, lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhammad. (2004). *Metode Penelitian Bahasa*. (S. Meita, Ed.). Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nandar, F.X . (2009). *Pragmatik & Penelitian Pragmatik* (Cetakan 1). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahardi, Kunjana. (2005). *Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. (I. dan Y. S. Syafrida, Ed.). Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, Suci. (2015). *prinsip kerja sama Dalam Tuturan Pedagang Dan Pembeli Di Pasar Wisata Pekanbaru*. Skripsi. Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Sari, Ni. Wayan. Eminda. (2013). Pelaksanaan Prinsip Kerja Sama Dalam Percakapan Guru Dan Siswa Serta DamPaknya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Kelas XI SMA 1 Kediri. *Santiajin Pendidikan, Volume 3 Nomor 2*, 178–187. Retrieved from <http://jurnal.unmas.ac.id/index.php/JSP/article/view/19>

- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Cetakan 21). Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cetakan 1). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sulistyowati, Winda. (2003). Pelanggaran prinsip kerja sama Dan Implikatur Percakapan Dalam Film Petualangan Sherina Karya Riri Riza. *Skriptorium, Volume 2 Nomor 2*. Retrieved from <http://journal.unair.ac.id/Skripsi@pelanggaran-prinsip-kerja-sama-dan-implikatur-percakapan-dalam-film-petualangan-sherina-karya-riri-riza-article-7842-media-45-category-8.html>
- Suryabrata, Sumadi. (2003). *Metodologi Penelitian* (Cetakan 14). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susanti. Ratna (2016). Pelanggaran prinsip kerja sama Dalam Proses Perkuliahan Di Politeknik Indinusa Surakarta. *Sainstech, Volume 3 N*. Retrieved from <http://www.poltekindonusa.ac.id/jurnal/jurnal-sainstech/>
- Utami, Riana. (2012). *prinsip kerja sama Dalam Tuturan Tukang Becak Terhadap Penumpang Di Kecamatan Tebing Tinggi KaBu paten Kepulauan Meranti*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Wijana, I. Dewa. Putu. (1996). *Dasar-Dasar Pragmatik* (Cetakan 1). Yogyakarta: Andi.
- Yule, George. (2006). *Pragmatik* (Cetakan 1). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.